



Book Chapter Abdimas
Ekonomi dan Ilmu Administrasi



Persembahkan

UNITOMO

Untuk Negeri

Editor :

Sayyidatul Khoiridah, S.Si., MT.

Dr. Dian Ferriswara, SE., MM

Dr. Dra. Fedianty Augustinah, MM.

Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP.

Dwi Cahyono, S. Kom., MT.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM.



Book Chapter Abdimas
Ekonomi dan Ilmu Administrasi



Persembahkan

UNITOMO

Untuk Negeri

Editor :

Sayyidatul Khoiridah, S.Si., MT.

Dr. Dian Ferriswara, SE., MM

Dra. Fedianty Augustinah, MM.

Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP.

Dwi Cahyono, S. Kom., MT.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM.

PERSEMBAHAN UNITOMO UNTUK NEGERI

Editor:

**Sayyidatul Khoiridah, S.Si., MT.; Dr. Dra. Fedianty Augustinah, MM;
Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP; Dwi Cahyono, S. Kom., MT.
Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM; Dr. Dian Ferriswara, SE., MM.**

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2021

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp: (031) 592 5970
Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : 13 Juli 2021

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 198 halaman

ISBN: 978-623-6665-14-5 (jil.2 PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KONTRIBUTOR

Ilya Farida, Sri Susilowati, Yoosita Aulia, Alberta Esti Handayani, Andry Herawati, Liling Listyawati, Firdaus, Sutarmin, Wiwik Budiarti, Rika Puspita Sari, Jajuk Suprijati, Lumadya Adi, Shanty Ratna Damayanti, Fedianty Augustinah, Sri Astutik, Zulaikha, Putut Handoko, Cicilia Tantri Suryawati, Agustiawan Djoko Baruno, Aldea Noor Alina, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, Sutarmin dan Sugiyanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), karena berkat rahmat, anugerah dan perkenan-Nya maka luaran dalam bentuk buku bunga rampai atau *book chapter* kumpulan hasil pengabdian dari dosen-dosen Universitas Dr. Soetomo dengan tema “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri” dapat terselesaikan. Buku ini diterbitkan juga dalam rangka menyambut dies natalis Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang ke 40.

Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Unitomo Press (UP) sebagai *leading* sektor dalam hal penerbitan buku sekaligus penggagas dari penerbitan *book chapter* “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri”. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua dosen UNITOMO yang telah memberikan sumbangan pemikiran atas kegiatan pengabdian masyarakatnya yang dikemas dalam bentuk artikel pada *book chapter* ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua dekan di lingkungan UNITOMO yang telah *support* kegiatan pengabdian dosen sampai dengan penerbitan *book chapter* ini. Kami berharap hasil luaran berupa kumpulan hasil pengabdian ini memberikan nilai kermanfaatan terutama dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen saat ini dan di masa yang akan datang.

Book chapter “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri” berisi kumpulan dari artikel pengabdian dosen-dosen Universitas Dr. Soetomo yang terbagi menjadi dua lingkup buku. Lingkup pertama yaitu pendidikan, teknologi, ilmu komunikasi, hukum, pertanian,

pangan, dan perikanan. Lingkup kedua yaitu ekonomi dan ilmu administrasi.

Semoga dengan terbitnya *book chapter* ini mampu membangkitkan semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional adalah dosen yang kreatif dalam pengajaran serta mampu meneliti dan mengabdikan, yang mana hasil penelitian maupun pengabdianya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah maupun buku seperti ini.

Tidak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan YME. *Book chapter* ini pun masih belum sempurna, maka atas ketidaksempurnaan dari *book chapter* ini kami mewakili panitia penerbitan *book chapter* mengucapkan permohonan maaf serta membuka diri atas saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pada penerbitan buku-buku berikutnya.

Akhir kata semoga Tuhan YME melimpahkan kasih dan berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin.

Surabaya, Juli 2021

Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KONTRIBUTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN PERTAMA: ASPEK EKONOMI

A. PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN APLIKASI <i>MICROSOFT EXCEL</i> PADA BENGKEL MOBIL "MAS ALIEF" DI BANGKALAN (Oleh: Ilya Farida dan Sri Susilowati)	1
B. PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI <i>EXCELL</i> PADA MASJID DAARUT-TAUBAH GAYUNGAN SURABAYA (Oleh: Yoosita Aulia).....	13
C. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA KECIL PEMBUATAN TEMPE DI DESA MANGLIAWAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG (Oleh: Alberta Esti Handayani)	23
D. MEMBANGUN KEBERLANJUTAN BISNIS KULINER PASCA PANDEMI COVID 19 : REFLEKSI KEGIATAN PPM DI DESTINASI WANA WISATA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO (Oleh: Andry Herawati dan Liling Listyawati).....	35

E.	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI SI APIK PADA KELOMPOK UMK MITRA SETIA KAWAN (MSK) MUTIARA CITRA GRAHA SIDOARJO (Oleh: Firdaus)	53
F.	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI JURUSAN SURABAYA–MALANG-BLITAR (Oleh: Sutarmin dan Wiwik Budiarti)	63
G.	PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA REAL ESTAT DI SIDOARJO (Oleh: Rika Puspita Sari)	75
H.	PELATIHAN PENGOLAHAN JAMUR TIRAM UNTUK MENJAMURKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PADA GENERASI MILENIAL (Oleh: Jajuk Suprijati, Lumadya Adi, dan Shanty Ratna Damayanti)	85

BAGIAN KEDUA: ASPEK ILMU ADMINISTRASI

A.	PELATIHAN TATA KELOLA KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR SURABAYA (Oleh: Fedianty Augustinah, Sri Astutik, dan Zulaikha)	101
B.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA WISATA SUMBER DHUWUR WONOSARI MOJOKERTO (Oleh: Putut Handoko dan Cicilia Tantri Suryawati)	121
C.	PERAN PEREMPUAN DESA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP KELUARGA DALAM SIAGA BENCANA (Oleh: Fedianty Augustinah dan Agustiawan Djoko Baruno) ..	131
D.	EVALUASI TEKNIS SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 (Oleh: Aldea Noor Alina)	143

E.	PENYULUHAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA MELALUI MANAJEMEN KEARSIPAN DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO (Oleh: Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, dan Fedianty Augustinah)	161
F.	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI METODE 3R (<i>REUSE, REDUCE, RECYCLE</i>) DI LINGKUNGAN PERUMAHAN LARANGAN MEGA DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO (Oleh: Sutarmin dan Sugiyanto).....	175

Bagian
Pertama

ASPEK EKONOMI



ASPEK EKONOMI

PERSEMBAHAN **UNITOMO** UNTUK NEGERI

PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN APLIKASI *MICROSOFT EXCEL* PADA BENGKEL MOBIL “MAS ALIEF” DI BANGKALAN

Ilya Farida¹, Sri Susilowati²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: ilya.farida@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: sri.susilowati@unitomo.ac.id

Email korespondensi: ilya.farida@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Saat ini industri otomotif berkembang dengan pesat seiring semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Kepemilikan kendaraan bermotor khususnya mobil semakin dibutuhkan sebagai alat transportasi untuk menunjang kelancaran aktivitas. Berbagai kebijakan dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk mempermudah kepemilikan mobil oleh masyarakat. Kondisi tersebut merupakan peluang berdirinya UKM jasa perawatan mobil atau bengkel mobil oleh masyarakat.

Di Madura khususnya di Bangkalan tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya di tanah air, penggunaan mobil terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi faktor semakin banyaknya UKM bengkel mobil di kota Bangkalan. Salah satunya adalah bengkel mobil “Mas Alief” yang berada di daerah Ketengan Kota Bangkalan.

Bengkel mobil “Mas Alief” merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh Bapak Ismanto yang memberikan pelayanan berupa perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) mobil dari berbagai merek mobil spesialis kaki-kaki mobil seperti di bagian *sokbreker*, *ball joint*, *tie rod*, hingga *rack steer electronic power* (EPS) serta bagian lain yang berhubungan dengan kaki-kaki mobil. Usaha tersebut telah digeluti selama lebih dari 20 tahun dan beralamat di Jalan Raya Ketengan No. 42, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Usaha bengkel ini setiap hari beroperasi dari jam 08.00 sampai 17.00 WIB kecuali hari Jumat libur. Karyawan bengkel mobil “Mas Alief” saat ini berjumlah 6 orang.

Berdasarkan survei yang sudah dilakukan, bengkel mobil “Mas Alief” mempunyai beberapa keunggulan yaitu (1) lokasi yang strategis berada di dekat jalan raya (Jalan Propinsi), (2) memiliki kemampuan tenaga kerja yang tidak diragukan lagi dalam hal memperbaiki kaki-kaki mobil karena sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun (hasil pekerjaan bagus), (3) harga jasa bisa bersaing dengan bengkel besar lain, (4) memiliki nama yang sudah dikenal di Madura khususnya di Bangkalan serta memiliki pelanggan yang setia dan loyal, (5) memiliki lahan area kerja bengkel yang cukup luas serta memiliki fasilitas pendukung untuk kenyamanan pelanggan seperti tempat tunggu pelanggan, mushola, toilet, dan kantin.



Gambar 1. Area kerja bengkel mobil “Mas Alief”



Gambar 2. Aktifitas bengkel “Mas Alief” spesialis kaki-kaki mobil

Terlepas dari semua keunggulan yang dimiliki, bengkel mobil Mas Alief memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang harus dibenahi agar bisa berkembang menjadi UKM yang lebih baik dan besar. Kelemahan tersebut terutama di sistem administrasi bengkel dan kinerja keuangannya.

Sistem administrasi bengkel belum terlaksana dengan tertib, tidak terkecuali dengan aktivitas pencatatan laporan keuangan. Akibatnya, tidak tersedianya data *customer*, data karyawan kaitannya dengan sistem

penggajian dan transaksi servis, data *supplier*, data barang/persediaan di bengkel, data tentang servis yang dilakukan, data transaksi keluhan, data transaksi jenis servis dan penjualan, data komisi untuk karyawan, dan data penerimaan bengkel dalam periode tertentu. Tidak tersedianya data memunculkan persoalan yaitu pemilik bengkel tidak mengetahui secara pasti kemajuan usahanya, tidak mengetahui tingkat kenaikan harga *sparepart* yang cenderung menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar rupiah sehingga pemilik bengkel kesulitan menentukan harga pokok untuk jasa layanannya. Jika terjadi pergantian *sparepart* barang/persediaan di bengkel sering hilang dan baru diketahui ketika hendak digunakan, dan sering terjadi kesalahan dalam menghitung tagihan servis ke pelanggan. Persoalan-persoalan tersebut jika dibiarkan akan menghambat pengembangan bengkel ke depan.

Usaha ini masih menggunakan cara manual untuk pencatatan pembukuan keuangannya. Oleh karena itu, pemilik merasakan kesulitan dalam menghitung omset, laba kotor serta pendapatan bersih usaha. Selain karyawan bagian mekanik, putri pemilik bengkel yang mempunyai pendidikan cukup juga membantu di bagian pembukuan dan *sparepart* sehingga dapat dilatih untuk mengelola pencatatan keuangan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*.

Adapun permasalahan berdasarkan analisis situasi yang dilakukan pada bengkel mobil Mas Alief sebagai berikut.

- a. Mitra belum memahami tentang pentingnya kinerja keuangan perusahaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik.
- b. Mitra belum menggunakan aplikasi *excel* dalam melakukan pencatatan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangannya sehingga mengalami masalah dalam menghitung omset, laba kotor serta pendapatan bersih.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menghasilkan pemahaman mengenai pencatatan pembukuan keuangan dengan menggunakan aplikasi *Excel* agar lebih memudahkan dalam kegiatan tersebut dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik atau meningkat. Solusi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pencatatan pembukuan keuangan (kas masuk dan kas keluar) dengan menggunakan aplikasi *Excel*

sehingga pada akhirnya akan mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Manfaat kegiatan pengabdian ini adalah (1) untuk menambah pengetahuan pengelola bengkel tentang pentingnya kinerja keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan (2) menambah pengetahuan dan keterampilan pengelola dan karyawan dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi *Excel*.

2. KAJIAN TEORI

Kinerja keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah dunia usaha terkait perusahaan, baik bagi internal maupun eksternal. Dalam membahas mengenai penilaian tentang kinerja suatu perusahaan, maka laporan tentang keuangan menjadi salah satu kunci yang tidak dapat di lupakan.

Menurut Jumingan: (Jumingan, 2005) kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Keuangan sebuah perusahaan menjadi tolak ukur bagaimana suatu perusahaan dapat bertahan kedepannya. Seluruh data mengenai keuangan akan dihadirkan dalam sebuah laporan kinerja/keuangan, mulai dari uang masuk dan laporan uang keluar sehingga seluruh pergerakan keuangan dapat dipantau dengan jelas.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan memiliki beberapa tujuan (Yuli, 2009) sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan memper-

timbang kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan. Tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti.

Dalam buku *Intermediate Accounting*, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2004). Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, juga menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan *output* dari proses atau siklus akuntansi dalam suatu kesatuan akuntansi usaha, di mana proses akuntansi meliputi kegiatan-kegiatan (Sofyan, 2007) (1) mengumpulkan bukti-bukti transaksi, (2) mencatat transaksi dalam jurnal, (3) *posting* dalam buku besar dan membuat kertas kerja, dan (4) menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala.

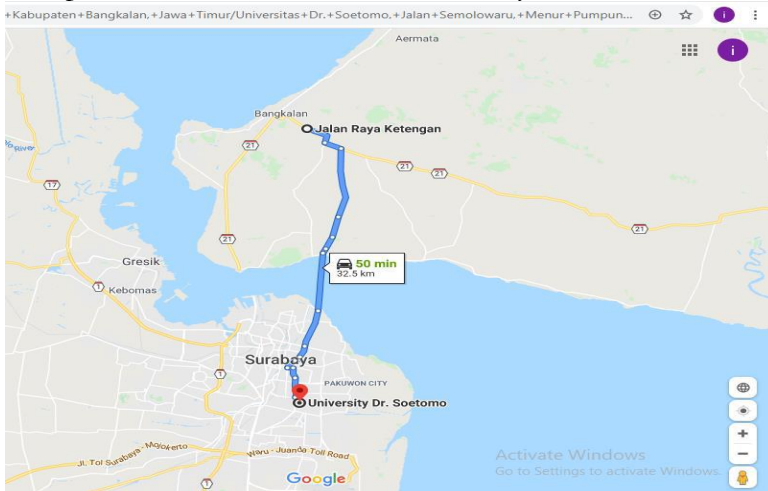
Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan (Kasmir, 2019) seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas.

Kegunaan laporan keuangan (Irham, 2012), menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi Pengabdian

Bengkel mobil “Mas Alief” berlokasi di Jalan Raya Ketengan No. 42 Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi pengabdian berjarak sekitar 32,5 Km dari kampus Universitas Dr. Soetomo Surabaya.



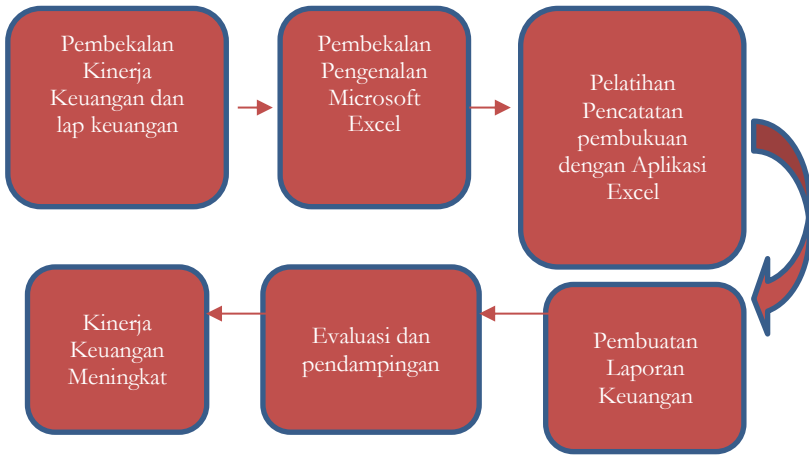
Gambar 3. Jarak dan lokasi tempat mitra dari kampus UNITOMO

3.2 Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra/bengkel mobil Mas Alief, maka dalam usulan pengabdian masyarakat ini, solusi yang dapat ditawarkan yaitu:

1. pembekalan tentang kinerja keuangan dan laporan keuangan;
2. pembekalan tentang aplikasi *microsoft excel*;
3. pelatihan pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi *microsoft excel*;
4. praktik pembuatan laporan keuangan dengan *microsoft excel*;
5. evaluasi dan pendampingan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan saat pengabdian masyarakat digambarkan seperti bagan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan pengabdian Peserta kegiatan pelatihan dan pendampingan ini adalah staf dan pengelola/pemilik bengkel mobil “Mas Alief”.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2021. Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pembekalan tentang pengertian kinerja keuangan perusahaan dan pentingnya pencatatan keuangan yang baik. Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 10 pagi bertempat di bengkel Mas Alief yang diikuti oleh Bapak Ismanto dan putrinya yang membantu di bagian pembukuan keuangan. Materi pembekalan meliputi pengertian kinerja keuangan, manfaat kinerja keuangan bagi perkembangan usaha, dan hubungan antara kinerja keuangan dengan laporan keuangan. Hasil yang diperoleh dari pembekalan tersebut, pemilik bengkel menjadi termotivasi untuk membuat laporan keuangan yang baik agar kinerja keuangannya menjadi lebih baik.
2. Pembekalan tentang aplikasi *microsoft excel* tentang manfaat dan cara kerjanya dalam membuat laporan keuangan. Dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 22 Januari dan 5 Februari

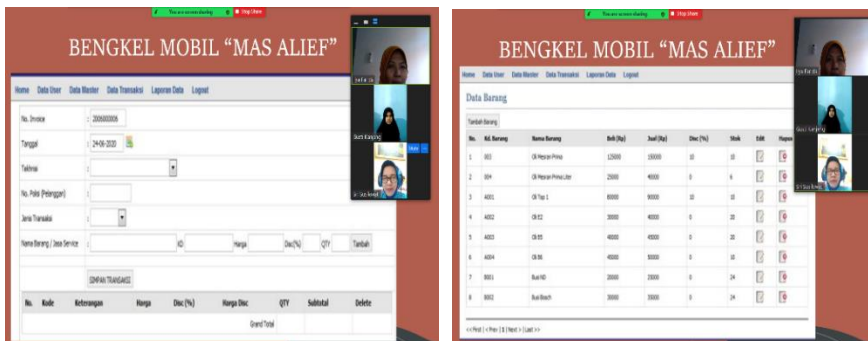
2021 jam 09.00 WIB yang diikuti oleh putri pemilik bengkel yang berperan sebagai staf di bagian pembukuan keuangan. Hasil dari kegiatan ini staf menjadi memahami tentang fungsi aplikasi *excel* dan mampu menggunakannya untuk membuat catatan keuangan sederhana dengan aplikasi *excel* tersebut.

3. Pelatihan pencatatan transaksi keuangan dengan standar akuntansi menggunakan *software Microsoft Excel*. Dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 19 Februari dan 19 Maret 2021 jam 09.00 WIB yang diikuti oleh putri pemilik bengkel yang berperan sebagai staf di bagian pembukuan keuangan. Materi pelatihan yaitu pencatatan jurnal akuntansi, pembuatan buku besar, pembuatan laporan laba – rugi, dan pembuatan laporan neraca saldo. Hasil dari kegiatan ini yaitu staf menjadi memahami tentang jenis-jenis laporan keuangan dan cara menyusunnya dengan menggunakan aplikasi *excel*.
4. Membuat laporan keuangan dari hasil pelatihan berjalan dengan baik.
5. Evaluasi dan pemdampingan dilakukan secara daring setiap minggu ke-2 hari Jumat bulan April dan Mei. Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengabdian telah berlangsung dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil laporan keuangan yang sudah disusun oleh staf dan hanya ada beberapa koreksi untuk perbaikan.

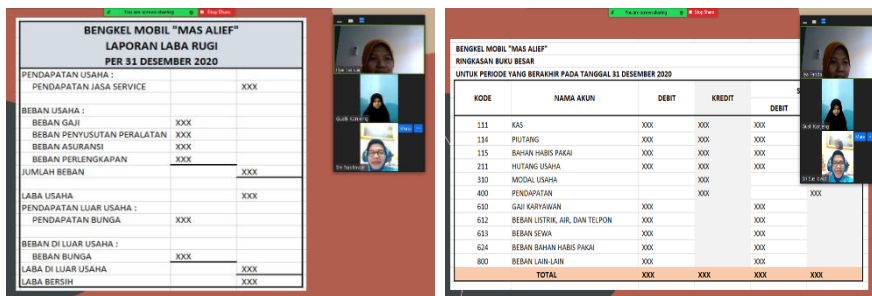
Berikut ini gambaran kegiatan yang disertai dengan foto – foto kegiatan.



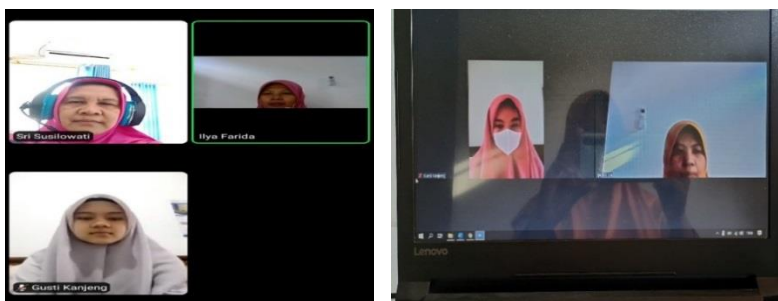
Gambar 5. Pembekalan tentang kinerja keuangan dan laporan keuangan



Gambar 6. Pembekalan tentang aplikasi *microsoft excel* dan pencatatan data transaksi



Gambar 7. Pelatihan penyusunan laporan keuangan.



Gambar 8. Evaluasi dan pendampingan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa pelaksanaan pembekalan tentang pentingnya kinerja keuangan dan pencatatan pembukuan keuangan yang lebih baik, dengan menggunakan *personal computer* dengan *software Microsoft Excel* telah berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang bisa digunakan untuk membuat perencanaan pengembangan usaha bengkel Mas Alief ke depan.

REFERENSI

- Irham, Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan* (2nd ed.). Alfabeta. Juminan. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2019. *Analisis laporan keuangan* (Revisi 201). PT. Raja Grafindo Persada.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting* (Kedelapan). BPFE Universitas Gajah Mada.
- Sofyan, Harahap. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuli, Orniati. 2009. Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 208.

Biografi Penulis 1



Ilya Farida lahir di Bangkalan Jawa Timur pada 22 Desember 1972. Pekerjaan menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sejak tahun 1998 sampai sekarang. Alumni program Magister Manajemen konsentrasi keuangan Universitas Brawijaya. Aktif di berbagai pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di berbagai bidang terutama di bidang keuangan. Beberapa buku bahan ajar yang sudah dihasilkan di antaranya Akuntansi Biaya, Statistik Bisnis 1, dan Statistik Bisnis 2 beserta modul praktikum.

Biografi Penulis 2



Sri Susilowati lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada 2 Juli 1966. Lulus SMA negeri 3 Surakarta tahun 1985. Tahun 1985 melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1991 dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Dra, Ec). Selanjutnya pada 2002 melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2), Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2005 dengan memperoleh gelar (M.Si). Pekerjaan sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1995 sampai sekarang, Aktif di berbagai pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang utama Manajemen Sumberdaya Manusia. Buku bahan ajar yang sudah dihasilkan Manajemen Operasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI *EXCELL* PADA MASJID DAARUT-TAUBAH GAYUNGAN SURABAYA

Yoosita Aulia

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: yoosita.aulia@unitomo.ac.id

Email korespondensi: yoosita.aulia@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK, 2009). Dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang tidak menghiraukan tujuan laporan keuangan tersebut dengan beralasan bahwa menyusun laporan keuangan memakan biaya, tenaga, dan waktu. Padahal dengan laporan keuangan mereka dapat menyusun strategi bisnis mereka ke depannya sehingga tujuan yang mereka harapkan dapat tercapai.

Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh entitas yang bertujuan mencari keuntungan saja, seperti perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Namun, diperlukan juga oleh entitas nirlaba yang kegiatan operasionalnya bukan untuk mencari laba. Lembaga nirlaba merupakan lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan (Nainggolan, 2005). Selain itu, entitas dituntut untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah berlaku.

Kemajuan teknologi memungkinkan entitas dapat menyusun laporan keuangan yang seluruh kegiatannya dapat dilakukan menggunakan program komputer. Pencatatan laporan keuangan menggunakan komputer dapat dijadikan alternatif, dibandingkan dengan pencatatan manual yang memakan banyak waktu dan tenaga.

Ada begitu banyak entitas (nirlaba) di Indonesia yang sebagian besar pelaporan keuangannya belum sesuai dengan standar yang berlaku, contohnya adalah Masjid. Pada umumnya Masjid hanya mencatat uang masuk dan uang keluar saja. Selain itu, masjid juga

tidak mencatat aset lain selain kas yang ada pada masjid tersebut sehingga sulit untuk mengetahui posisi keuangan masjid yang sebenarnya. Selain itu, pada umumnya pencatatan yang dilakukan oleh pengurus masjid masih menggunakan pencatatan manual yang memakan waktu dan tenaga, ditambah dengan adanya risiko catatan tersebut dapat hilang, berantakan, dan tidak rapi dalam penyusunannya.

Masjid tidak hanya tempat ibadah bagi umat muslim, masjid juga digunakan sebagai sarana dalam mendidik anak-anak dan remaja dalam mendalami ilmu agama, merayakan hari besar umat muslim, ceramah agama, dan lain-lain. Banyaknya kegiatan tersebut, pastinya masjid membutuhkan dana yang besar dalam melakukan kegiatannya. Sebagian besar sumber dana masjid berasal dari para donatur atau jemaah masjid. Dana tersebut bisa berupa sumbangan donatur tetap dan infak/sedekah yang diberikan oleh jemaah masjid. Dana yang terkumpul dimasukkan ke dalam kas masjid yang dikelola oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan aset masjid. Pengurus masjid diharapkan dapat mengelola aset masjid dengan sebaik-baiknya dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada jemaah masjid dan kepada donatur agar donatur dan jemaah puas karena apa yang mereka amanahkan tidak sia-sia dan semakin menambah keinginan donatur dan jemaah untuk menyisihkan pendapatan mereka agar disumbangkan ke masjid sebagai bekal di akhirat kelak.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan dalam hal penyusunan laporan keuangan masjid dengan menggunakan program *Excell*. Manfaat yang diharapkan dari program pendampingan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pengurus masjid tentang penyusunan laporan keuangan berbasis komputer, sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang baik dan transparan bagi para pemakainya. Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan donatur dan jemaah Masjid untuk dengan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan.

1.1. Permasalahan Mitra

Tabel 1. Permasalahan yang dihadapi oleh pengurus masjid Daarut Taubah secara garis besar

Masalah Prioritas	Rincian Masalah	Dampak
Masalah pelaporan keuangan	1. Belum adanya tata administrasi dokumen keuangan masjid.	Hal ini memunculkan kecurigaan warga kepada pengurus masjid dan memunculkan intrik dan konflik kecil di masyarakat.
	2. Belum ada pelaporan keuangan masjid yang memadai.	Hal ini memunculkan kecurigaan warga kepada pengurus masjid dan memunculkan intrik dan konflik kecil di masyarakat.
	3. Belum ada pelaporan keuangan zakat, infak dan shodaqoh yang memadai.	Hal ini memunculkan kecurigaan warga kepada pengurus masjid selaku pengelola dana zakat, infak dan shodaqoh dan memunculkan intrik dan konflik kecil di masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Masjid, Fungsi Masjid, dan Manajemen Masjid

a. Pengertian masjid

Menurut Ridin (2013) M. Quraish Shihab mendefinisikan masjid sebagai bangunan tempat shalat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Masjid juga sebagai tempat ibadah dan pendidikan dalam arti luas.

Menurut Aziz (2014) pengertian masjid secara etimologis merupakan isim makan dari kata "*sajada*"-"*yasjudu*"-"*sujudan*", yang artinya tempat sujud, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT atau tempat untuk mengerjakan shalat. Pengertian masjid secara sosiologis, masjid merupakan suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jama'ah. Masjid diperuntukkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain dan melaksanakan shalat Jum'at. (Aziz, 2014).

b. Fungsi masjid

Fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, dapat diuraikan antara lain, sebagai berikut: (1) untuk melaksanakan ibadah *mahdhab* seperti shalat wajib, shalat sunnah, sujud, *i'tikaf*, dan shalat-shalat sunnah seperti shalat Id, shalat gerhana dan sebagainya. Seminggu sekali setiap hari jum'at dilaksanakan shalat jum'at dengan didahului dua khutbah untuk membina keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. (2) sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Nabi SAW sering menerima wahyu dalam masjid Madinah, dan mengajarkannya pada para sahabat dalam berbagai hal seperti hukum, kemasyarakatan, perundang-undangan dan berbagai ajaran lainnya. Para sahabat nabi melakukan berbagai kegiatan ilmiah di masjid, termasuk memperelajari dan membahas sumber-sumber ajaran Islam. (3) sebagai pusat informasi Islam. Rasulullah SAW menyampaikan berbagai macam informasi di masjid termasuk menjadikannya sebagai tempat bertanya bagi para sahabat (4) tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat. (5) sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang dimaksud kegiatan ekonomi, tidak berarti sebagai pusat perdagangan atau industri, tetapi sebagai pusat untuk melahirkan ide-ide dan sistem ekonomi yang islami, yang melahirkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan bagi umat manusia secara adil dan berimbang. (6) sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Kegiatan sosial, tidak bisa dipisahkan dengan masjid sebagai tempat berkumpulnya para jama'ah dalam berbagai lapisan masyarakat. (Abdul, 2014).

Perkembangan masjid secara umum di masa sekarang, terutama dalam hal kepengurusan identik dengan seorang Imam, muadzin, khatib, dan pengurus lain yang sering disebut juga dengan ta'mir masjid. Ta'mir biasanya adalah orang yang sudah sepuh dan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Hal ini menimbulkan persoalan ketika dana masjid yang diperoleh dari infak atau sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya. (Rosita 2016).

c. Manajemen masjid

Pengelolaan dana masjid atau Yayasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, yang hampir setiap bulan dilakukan, demi memberikan informasi pemasukan maupun pengeluaran dana yang ada dalam Yayasan tersebut”. (Yahya dan Rahmat. 2016). Agar masjid dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya maka masjid perlu dikelola, yaitu diperlukan manajemen masjid. Manajemen masjid adalah kegiatan yang menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi ditempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT melalui ibadah dalam arti seluas-luasnya. Semua tindakan manajemen itu tidak hanya dalam tataran konsep melainkan harus dilaksanakan, dipraktikkan agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. (Ridin. 2013). Manajemen masjid akan banyak dibutuhkan untuk memberikan dasar dari kontribusi dalam menumbuh kembangkan profesionalisme pengelola agar mampu mengelola potensi umat melalui kegiatan-kegiatan dilingkungan masjid.

Dalam konteks manajemen masjid, maka tujuan utama manajemen masjid yaitu “memakmurkan masjid”. (Ridin, 2013). Masjid bisa dikatakan sebagai salah satu organisasi publik yang mengelola sumber daya masjid. Pengelolaan sumber daya ini dilakukan di masjid dan dilakukan oleh Ta'mir (orang yang mengelola Masjid atas kepercayaan masyarakat) dengan tanpa mendapatkan apa-apa atau dengan kata lain mereka melakukan kegiatan pemberdayaan sumber daya ini dengan suka rela. Maka masjid ini juga disebut sebagai organisasi nonprofit namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya masjid sering menjadi sorotan terutama dalam pelaksanaan pelaporan keuangan masjid. Harapan masyarakat adalah bagaimana pengurus masjid atau Ta'mir itu lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan laporan keuangan. Maka penerapan sistem keuangan yang baik akan memberikan jawaban yang tepat untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan Ta'mirnya. (Munir, 2015). Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari kegiatan sholat maupun pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap, misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa

dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar dan kegiatan lainnya. (Aziz, 2014).

2.2 Pengertian *Microsoft Office Excel*

Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja (*spreadsheet*) yang dibuat dan didistribusikan oleh *Microsoft Corporation* untuk sistem operasi *Microsoft Windows* dan *Mac OS*. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang menarik. *Microsoft Excel* dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari *Microsoft Office* suatu *suite programme* (gabungan beberapa program namun berfungsi sebagai satu kesatuan program/ saling terkoneksi satu sama lain). Perangkat lunak (*software*) tipe *spreadsheet* mulai dikenal Ketika diperkenalkannya *software VisiCalc* pada suatu pameran computer di Amerika pada tahun 1979. Pada saat itu *VisiCalc* masih diperuntukkan untuk komputer berbasis Sistem Operasi UNIX. Program ini kemudian dibeli oleh perusahaan Lotus. Akhirnya, Lotus membuat *software spreadsheet* sendiri yang dibuat berdasarkan pengembangan dari *VisiCalc* yang diberi nama Lotus 1-2-3. Lotus 1-2-3 menjadi standar *software spreadsheet* untuk beberapa waktu lamanya sebelum kemudian *Microsoft* mempopulerkan produknya dengan basis Windows (*Microsoft Excel 4.0 for Windows*).

Sukartini, dkk (2014) menyampaikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam *Excel for Accounting* adalah sebagai berikut: (1) Fungsi SUM, adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada beberapa sel dalam suatu range tertentu. Rumus fungsi SUM adalah =SUM(Range). (2) Fungsi IF, adalah sebuah fungsi logika yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai atau jawaban jika sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Rumus fungsi IF adalah =IF(kondisi; kemungkinan 1; kemungkinan 2). (3) Fungsi SUMIF, adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai yang terdapat pada beberapa sel dalam suatu range tertentu dengan kriteria tertentu yang dihubungkan dengan range kriterianya. Rumus fungsi SUMIF adalah =SUMIF (Range, Kriteria, Sum_range).

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah di Masjid Daarut-Taubah yang terletak di Perumahan The Gayungsari Surabaya (Gambar 1).



Gambar 1. Masjid Daarut Taubah

3.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun metode pelaksanaan pemecahan masalah dalam pengabdian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Metode pendekatan pemecahan masalah

Uraian			Metode Pelaksanaan Pemecahan Masalah
No.	Masalah	Solusi	
1.	Belum adanya tata administrasi dokumen keuangan masjid.	Diberikan pelatihan dan pendampingan dalam tata cara pembuatan dan pengisian dokumen pelaksanaan administrasi keuangan masjid	Dibuatkan modul dan format dokumen kelengkapan pengelolaan masjid ringkas dan aplikatif. Diberikan workshop tata administrasi masjid

2.	Belum ada pelaporan keuangan masjid yang memadai.	Diberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan masjid	Diberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan komputer <i>software/</i> program <i>excell</i>
3.	Belum ada pelaporan keuangan zakat, infak dan shodaqoh yang memadai.	Diberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan masjid	Dibuatkan format model laporan keuangan zakat, infak dan shodaqoh yang sederhana tetapi memenuhi syarat akuntabilitas yang baik

Prioritas masalah yang telah teridentifikasi pada mitra coba dipecahkan dan diselesaikan dengan melibatkan partisipasi mitra tersebut. Pelaksanan pengabdian merancang kegiatan sesuai dengan masalah yang muncul dan dampak negatif dari masalah tersebut. Metoda yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah disajikan pada Tabel 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini diawali dengan pengurusan izin dan melakukan koordinasi dengan pihak perumahan The Gayungsari dan pengurus masjid selaku mitra pengabdian kepada masyarakat. Setelah mendapatkan izin dari pengurus RT perumahan The Gayungsari dan para pengurus Masjid Daarut-Taubah, tim Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, penulis yang juga sekaligus pelaksana melakukan analisis pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan masjid yang telah berjalan sejauh ini, kemudian memetakan kelemahan dan kekuarangan yang ada. Selanjutnya, pelaksana melakukan diskusi terkait temuan pemetaan tersebut dan merumuskan aktivitas yang akan dijalankan.

Dari analisis pemetaan kelemahan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan masjid ditemukan bahwa masjid mitra program memiliki kelemahan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3. Selanjutnya berdasarkan temuan itu, dilakukan pelatihan dan pendam-

pingan oleh pelaksana yang diselenggarakan sebanyak empat pertemuan. Pelatihan dan pendampingan berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan masjid meliputi: pelatihan penyusunan laporan keuangan menggunakan program *excell* dan penyusunan laporan akuntabilitas yang lebih baik dan transparansi pelaporan keuangan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, penulis juga mengadakan tanya jawab dan diskusi mendalam agar pemahaman dari pengurus masjid selaku mitra menjadi lebih mendalam. Setiap sesi tanya jawab cukup menarik karena biasanya para anggota mitra akan menyampaikan masalah-masalah detail yang dihadapi dan selanjutnya akan didiskusikan untuk menemukan solusi terbaiknya. Setelah beberapa waktu berjalan, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan masjid di tempat mitra menunjukkan *progress* yang baik. Hal ini dapat dilihat adanya pelaporan keuangan berbasis komputer dan transparansi yang baik. Kondisi ini menggiring kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dari semakin antusiasnya masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid dan mengikuti agenda-agenda masjid.

5. KESIMPULAN

Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di Masjid Daarut-Taubah tersebut. Dari hasil pelaksanaan program ini, pelaksana menyimpulkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan di masjid Daarut-Taubah menjadi lebih baik dan transparan. Konflik terkait prasangka buruk yang muncul dari sebagian kecil masyarakat terkait pengelolaan keuangan masjid mulai termitigasi. Kegiatan masjid juga semakin semarak sehingga memicu *ghiroh* masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid menjadi lebih baik.

REFRENSI

- Abdul, Rochman. 2014. Perancangan Sistem Informasi Keuangan Masjid Raudhatul Jannah Makassar. *Jurnal IT.Vol. 15*.
- Aziz, Muslim. 2014. Manajemen Pengelolaan Masjid. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama.Vol. V, No. 2*
- Munir, Is'adi. 2015. Kontruksi Laporan Keuangan Masjid Berbasis Syariah. *Al-Masbraf.Vol.2, No. 1*
- Nainggolan, Pahala. (2005). *Akuntansi keuangan yayasana dan lembaga nirlaba sejenis* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridin, Sofwan. 2013. Penguatan Manajemen Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fatihah di Kelurahan Krapyak Semarang. *Jurnal Dimas.Volume 13, No. 2*
- Rosita, Andarsari Pipit. 2016. Laporan Keuangan Organisas Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi.Vol 1, No. 2*
- Sukartini, dkk. 2014. “*Komputer Akuntansi I (Excel For Accounting - Aplikasi Untuk Perusahaan Kecil)*”. Padang: Politeknik Negeri Padang.
- Welim Yahya Yohanes. 2016. Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Dana Masjid Pada Yayasan Al-Muhajirin. *Jurnal Simetris.Vol.7 No. 1*

Biografi Penulis



Dr Yoosita Aulia, SE., MM., Ak. Lahir di Pasuruan, 21 Agustus 1973. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 di Universitas Brawijaya (Akuntansi) pada tahun 1997, dilanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Dr. Soetomo yang ditamatkan pada tahun 2005, serta Pendidikan S-3 Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) Universitas Airlangga yang diselesaikannya pada tahun 2018. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi Akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya (tahun 1998-sekarang).

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
DAN PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA
KECIL PEMBUATAN TEMPE DI DESA MANGLIAWAN
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG**

Alberta Esti Handayani

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: alberta.esti@unitomo.ac.id

Email korespondensi: alberta.esti@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Rahayu & Day, 2017). Pemafaatan teknologi informasi dilakukan oleh UMKM umumnya diawali dari proses pemasaran. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, Choudrie, Mahbubur, dan Alzougool bahwa sektor usaha kecil (UMKM) memanfaatkan teknologi pada proses pemasarannya untuk memperluas pangsa pasar atas produk yang dijual (Rahayu & Day, 2017). Pelaku usaha tersebut pun berkeyakinan bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media pemasaran berbasis *online* dapat mewujudkan pertumbuhan dan peningkatan penjualan produk yang dipasarkan sehingga pelaku usaha tersebut dapat meningkatkan potensi keuntungan yang maksimal. Namun, keuntungan maksimal tersebut tidak serta merta terwujud hanya dengan transaksi penjualan produk yang tinggi sebagai akibat bertambah luasnya pangsa pasar atas produk yang dijual. Keuntungan usaha yang dilakukan baru dapat terlihat jika pelaku UMKM tersebut membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan suatu badan usaha. (Hakiki, Rahmawati, & Novriansa, 2020) Sehingga diperlukan pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk pelaku UMKM.

Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjalankan usahanya tidak terlepas dari kemampuan UMKM mengelola dana. Ketidak mampuan atau kesalahan pengelolaan dana yang dilakukan pemilik meskipun sepele, tetapi dapat mengancam keberlangsungan UMKM. Pengelolaan dana yang buruk juga berakibat perusahaan

tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan yang terjadi di perusahaan (Warsono dkk, 2010:8). Misalnya, pelaku UMKM sering melakukan kesalahan dengan tidak memisahkan uang hasil usaha dengan uang pribadi. Mencampur adukkan dua jenis uang yang seharusnya beda peruntukan semacam ini mengakibatkan UMKM tiba-tiba mengalami kekurangan uang tunai untuk operasional harian. Contoh lainnya dapat dijumpai ketika pemilik UMKM diberikan pertanyaan mengenai laba yang diperoleh dan mereka banyak yang menjawab bukan dengan nominal rupiah tertentu, tetapi dengan benda berwujud seperti mobil, motor, rumah atau sawah.

Masalah yang cukup dominan muncul dalam pengembangan UMKM (Usaha mikro kecil menengah) adalah terkait dengan pemahaman mengenai informasi akuntansi (Wirjono dkk, 2012). Sebagian besar UMKM (Usaha mikro kecil menengah) tidak melakukan pencatatan dengan baik, bahkan tidak ada pencatatan sehingga menimbulkan masalah keuangan yang imbasnya perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil menengah) menjadi terhambat. Selain membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana, bagian dari akuntansi yaitu laporan keuangan juga berguna untuk meningkatkan kapasitas permodalan dengan meningkatkan akses UMKM (Usaha mikro kecil menengah) ke lembaga kredit formal. Lembaga kredit formal seperti bank saat ini telah banyak menyediakan fasilitas kredit usaha yang sifatnya lunak. Hanya saja mayoritas mensyaratkan laporan keuangan sebagai dasar kelayakan.

Tempe merupakan salah satu makanan kesukaan masyarakat. Sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyukai tempe sehingga permintaan akan tempe semakin banyak. Permintaan tempe tidak hanya dari rumah tangga, tetapi dari rumah makan dan hotel. Namun, pada kenyataannya para produsen tempe mengalami kesulitan dalam memasarkan tempe karena harga yang diminta pengelola rumah makan dan hotel lebih murah daripada harga tempe pada saat dijual kepada konsumen individu. Pada umumnya produksi tempe bermuara pada tahapan kegiatan pemasaran. Tahapan ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan suatu usaha. Pembuatan dan pengemasan suatu produk harus dilakukan dengan menarik agar dapat menggugah minat distributor. Diharapkan dengan adanya

kegiatan pengabdian masyarakat dapat memajukan dan meningkatkan penjualan dan perekonomian Usaha Kecil pembuatan tempe yg berada di Desa Mangliawan.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pada bidang penyusunan laporan keuangan dan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang menerapkan konsep konvensional memerlukan biaya yang tinggi, tetapi dengan semakin berkembangnya sosial media maka dapat menjadi sarana yang efisien dalam membuka jalur pemasaran bagi produk UMKM (Usaha mikro kecil menengah). Melalui sosial media penyebaran informasi tentang keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih cepat serta jangkauannya lebih luas. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan kepada pelatihan pemanfaatan media *online* sebagai salah satu media pemasaran produk UMKM (Usaha mikro kecil menengah) dan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI.(Andriani, Atmadja, & Sinarwati, 2014)

2. KAJIAN TEORI

2.1. Akuntansi dan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian akuntansi adalah proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya (Dr. Sony Warsono, MAFIS, Akuntan Endra Murti Sagoro, Msc M. Arsyadi Ridha, 2010). Akuntansi digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam wujud laporan keuangan. Laporan keuangan akan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan berbagai macam kebijakan. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan antara lain: 1. Informasi kinerja keuangan perusahaan; 2. Informasi perubahan jumlah modal pemilik dalam suatu perusahaan; 3. Informasi posisi keuangan perusahaan terkait dengan sumber dana dan jenis penggunaan dana; dan 4. Informasi pemasukan uang (kas) dan pengeluaran uang (kas).

Beberapa macam laporan keuangan dan manfaat yang dihasilkan dari informasi keuangan dalam laporan keuangan adalah 1. Laporan laba rugi; manfaat dari laporan laba rugi antara lain: (1) Perusahaan mengetahui berbagai macam pendapatan yang diterima oleh

perusahaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan tersebut; (2) Perusahaan mengetahui laba rugi selama periode tertentu sehingga dapat mengetahui perkembangan perusahaan; (3) Perusahaan dapat menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar; dan (4) Perusahaan dapat memprediksi kinerja keuangan untuk periode yang akan datang.

2. Laporan Perubahan Ekuitas; manfaat yang didapatkan dari laporan perubahan ekuitas antara lain: (1) Pemilik mengetahui besarnya modal akhir yang dimiliki dalam perusahaan; (2) Pemilik dapat mengetahui besarnya setoran modal dalam periode berjalan; (3) Pemilik dapat mengetahui besarnya pengambilan barang/jasa untuk kepentingan pribadi pemilik; dan (4) Pemilik (pemegang saham) dapat mengetahui besarnya dividen yang dibagikan.

3. Neraca; manfaat yang didapatkan dari neraca antara lain: (1) Perusahaan mengetahui jumlah aset (harta) yang dimiliki, baik jenisnya maupun nilainya; (2) Perusahaan dapat mengetahui besarnya kewajiban (utang) dan ekuitas (modal dan laba ditahan); dan 3. Perusahaan dapat menghitung rasio keuangan sehingga perusahaan dan pihak yang terkait dapat memprediksi kemampuan perusahaan untuk membayar bagi hasil kepada investor maupun membayar utang kepada kreditor.

4. Laporan Aliran Kas; manfaat dari laporan aliran kas adalah perusahaan dapat mengetahui jenis aktivitas, yang meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta besarnya uang dikeluarkan atau diterima oleh perusahaan. Contoh aktivitas operasi adalah penerimaan pendapatan tunai, pelunasan piutang, atau membayar biaya. Contoh aktivitas investasi adalah pembelian atau penjualan aset. Contoh aktivitas pendanaan adalah setoran uang dari pemilik, pembayaran dividen, atau pengambilan uang untuk pribadi.

2.2. Elemen Laporan Keuangan

Berdasarkan empat laporan keuangan tersebut, elemen laporan keuangan dapat dibagi menjadi 6 (enam), yaitu: Aset, Utang, Ekuitas, Pendapatan, Biaya, dan Pengembalian Ekuitas (Jamain, 2019). Keenam elemen tersebut, dapat diartikan sebagai berikut : 1. Aset adalah jenis penggunaan dana yang merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Utang adalah salah satu sumber pemerolehan dana dari pinjaman pihak lain (kreditor),

transaksi pembelian kredit, atau penggunaan barang/jasa belum dibayar. 3. Ekuitas adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari setoran pemilik dan akumulasi laba/rugi yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak dibagikan (laba ditahan). Khusus bagi usaha kecil mikro menengah, terkadang dalam ekuitas juga ada sumber dana yang berasal dari pemerintah, seperti hibah atau sumbangan. 4. Pendapatan adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari aktivitas perusahaan, baik bersifat operasional maupun non-operasional. 5. Biaya adalah jenis penggunaan dana yang merupakan pembayaran (non utang) yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. 6. Pengembalian Ekuitas adalah jenis penggunaan dana untuk kepentingan pemilik, baik berupa pengambilan untuk kepentingan pribadi (prive) atau pengembalian ekuitas kepada pemegang saham (dividen).

2.3. Proses Akuntansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Akuntansi merupakan sebuah proses sistematis (Jamain, 2019). Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses akuntansi. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh bagian akuntansi adalah membuat atau menyusun persamaan akuntansi yang bersumber pada bukti transaksi. Berdasar persamaan ini sebenarnya laporan keuangan dapat disusun, namun terlalu sederhana dan tidak rinci sehingga tetap harus melalui tahap-tahap akuntansi yang wajar. Tahap yang pertama adalah pencatatan. Tahap pencatatan merupakan pencatatan transaksi yang bersumber pada bukti transaksi. Tahap ini meliputi penjurnalan dan pemindah bukuan. Penjurnalan merupakan tahap meringkas transaksi dan menentukan posisi debit kredit pada akun-akun yang bersangkutan. Pemindahbukuan merupakan kegiatan memindahkan saldo pada tiap-tiap transaksi ke akun-akun yang bersangkutan. Tahap yang kedua adalah menyusun daftar saldo dan melakukan pencatatan penyesuaian serta menyusun kembali daftar saldo setelah penyesuaian. Sumber daftar saldo berasal dari kegiatan pemindahbukuan. Daftar saldo disusun dari saldo masing-masing akun dalam buku besar. Saldo debit dan kredit dalam daftar saldo pasti selalu seimbang jika tidak ada kesalahan. Sedangkan penyesuaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan transaksi atau memperbaiki pencatatan jika terjadi kesalahan. Setelah dilakukan

penyesuaian dan koreksi, daftar saldo kembali disusun. Tahap ketiga atau terakhir adalah menyusun laporan keuangan yang bersumber pada daftar saldo setelah penyesuaian. Laporan yang dapat disusun dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Laporan arus kas dapat disusun langsung pada tahap pertama saat penjurnalan. Transaksi yang melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar langsung segera dipindahkan ke laporan arus kas.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM (Andriani et al., 2014)

2.4. Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi (Cost of goods manufactured) adalah total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama sebulan periode (Cecily A. Raiborn, 2011). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal serta dikurang dengan persediaan produk dalam proses akhir

2.5. Manfaat Harga Pokok Produksi

Menurut Mulyadi manfaat dari penentuan harga pokok produksi secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. Menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi dihitung dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penentuan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya lain dan data non biaya. 2. Memantau realisasi biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam

pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 3. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran per-usahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya nonproduksi dan menghasilkan laba atau rugi. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. (Mulyadi, 2005) Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dan pemasaran. Adapun metode pelaksanaan pemecahan masalah dalam pengabdian ini yaitu :

Tabel 1. Metode Pendekatan Pemecahan Masalah

Uraian			Metode Pelaksanaan Pemecahan Masalah
No.	Masalah	Solusi	
1.	Belum adanya pencatatan transaksi	Diberikan pendampingan dalam pencatatan transaksi yang terjadi	Dibuatkan modul dan format untuk pencatatan transaksi

2.	Belum ada pelaporan keuangan	Diberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan	Diberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan
3.	Belum ada pemasaran secara <i>online</i>	Diberikan pelatihan dan pendampingan memasarkan produk secara <i>online</i>	Dibuatkan format model pemasaran <i>online</i> dengan menggunakan go food dan grab food
4	Belum adanya pengemasan produk dan pelabelan	Diberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan kemasan dan pelabelan	Dibuatkan format bentuk pengemasan yang aman dan higienis serta praktis dan pelabelan yg menarik dan gampang dikenal konsumen

(Sumber: diolah penulis)

Pelaksanaan pengabdian merancang kegiatan sesuai dengan masalah yang muncul dan dampak negatif dari masalah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada usaha kecil pembuatan tempe UMKM Tempe Murni Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan Kabupaten Malang. Tim pengabdian terdiri atas ketua dan anggota serta dibantu 2 orang mahasiswa. Pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Rumah Bu Alif pemilik UMKM tempe murni Malang dilaksanakan Forum *Group Discussion* (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Permasalahan kemasan produk dan label produk yang kurang menarik.
2. Permasalahan dalam pemasaran produk terutama pada segi promosi.
3. Permasalahan dalam penentuan biaya produksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana.

Beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat bersama mitra usaha sebagai berikut :

1. Pembuatan label merek produk

Kegiatan ini dilakukan secara bersama antara tim pengabdian masyarakat dengan mitra usaha dalam hal ini pengusaha tempe. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui forum komunikasi dua arah sehingga akan terjadi hubungan timbal balik pada kedua belah pihak.



Gambar 1. Tempe sebelum diberi label dan setelah dibuatkan label
(Sumber : dokumentasi penulis)

2. Pelatihan pemasaran *online*

Pada kegiatan ini pemilik usaha diajari cara membuat akun dan email untuk memudahkan pemasaran secara *online*. Hasilnya adalah dibuatkan email alif354@yahoo.com sebagai sarana komunikasi dengan pembeli. Selain itu juga dilatih pembuatan website dan pemasaran media *online*. (gambar 1)

3. Pelatihan perhitungan harga pokok produksi dan laporan keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan perhitungan harga pokok produksi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah memberikan pengarahan dan masukkan kepada mitra tentang cara perhitungan biaya produksi. Pertama-tama mitra diminta untuk menyebutkan biaya-biaya apa saja yang mereka keluarkan dalam memproduksi tempe, ternyata ada biaya-biaya yang belum diperhitungkan, salah satunya adalah biaya tenaga kerja khususnya untuk tenaga mereka sendiri tidak diperhitungkan dan disarankan untuk memperhitungkan biaya tenaga kerja dalam menetapkan biaya produksi. Selama ini pihak mitra belum memiliki laporan keuangan, disini tim pengabdian masyarakat menyatakan betapa pentingnya memiliki laporan

keuangan supaya pengusaha dapat mengetahui posisi keuangannya. Selama ini tidak ada pemisahan antara uang hasil usaha dengan keperluan pribadi, dimana sewaktu-waktu dapat mengambil uang hasil usaha untuk keperluan pribadi/keluarga dan juga digunakan untuk usaha sehingga pada saat memerlukan dana untuk usaha akan kekurangan modal. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penyisihan anggaran untuk pembelian alat-alat pendukung biaya produksi dan lain-lain, misalnya pembelian ember, harus diperkirakan usia dari ember sehingga tahu kapan akan melakukan pembelian kembali maka pendapatan yang diperoleh harus disisihkan untuk keperluan pembelian ember supaya pada saat ingin membeli ember baru sudah tersedia dana sehingga tidak akan menghambat kegiatan proses pembuatan tempe.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil Pembuatan Tempe di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang” melalui program kegiatan pembuatan kemasan dan label kemasan melakukan promosi keberadaan UMKM melalui sosial media sehingga banyak yang mengetahui keberadaan UMKM tersebut. Selain itu, dilakukan juga pelatihan dalam penghitungan biaya produksi sehingga dapat diketahui biaya yang dikeluarkan dan akan berdampak dalam penentuan harga jual tempe. Dari hasil pengabdian pengusaha tempa dipandang perlu untuk membuat laporan keuangan sehingga kegiatan usaha akan lebih terencana dan berjalan sebagaimana mestinya.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pemilik UMKM Tempe yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta semua tim yang terlibat sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang direncanakan.

REFERENSI

- Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *E-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 56–65. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254>
- Cecily A. Raiborn, M. R. K. (2011). *Akuntansi biaya Buku 1 : Dasar dan perkembangan* (7th ed.). Jakarta: Salemba empat.
- Hakiki, A., Rahmawati, M., & Novriansa, A. (2020). Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 55–62. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.12>.
- Jamain, Tries Handriman. (2019). PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA KECIL KELOMPOK ANGGOTA PKK PERUM BPP DESA COGREG KECAMATAN PARUNG Tries. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(1), 66–75.
- Mulyadi. (2005). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: evidence from Indonesia. *Eurasian Business Review*, 7(1), 25–41. <https://doi.org/10.1007/s40821-016-0044-6>
- Warsono, Sony, MAFIS, Akuntan Endra Murti Sagoro, Msc M. Arsyadi Ridha, S. A. (2010). *Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan*.
- Wirjono, Raino, Endang dan Budi Raharjono, A. (2012). Survei Pemahaman Dan Pemanfaatan Informasi Akuntansi Dalam Usaha Kecil Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 205–216.

Biografi Penulis



Alberta Esti Handayani, SE, Ak.,MM, CA. Lulus S-1 di Program Studi Akuntansi FE Universitas Brawijaya Malang tahun 1997. Lulus Magister Manajemen di Universitas Dr. Soetomo Surabaya tahun 2005. Saat ini sedang menempuh pendidikan S-3 di Universitas Merdeka Malang. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi Akuntansi FEB Universitas Dr. Soetomo

Surabaya. Aktif sebagai dosen tetap di Universitas Dr. Soetomo serta anggota profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Surabaya. Konsen di bidang Akuntansi dan Keuangan

MEMBANGUN KEBERLANJUTAN BISNIS KULINER PASCA PANDEMI COVID-19: REFLEKSI KEGIATAN PPM DI DESTINASI WANA WISATA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

Andry Herawati¹, Liling Listyawati²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: andry.herawati@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: liling.listyawati@unitomo.ac.id

Email korespondensi: andry.herawati@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Istilah virus COVID-19 menjadi *trending topic* lebih kurang dalam satu tahun terakhir. Saat ini covid 19 sudah menjadi pandemi, artinya terjadinya penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan penyebaran sudah terjadi antar negara diseluruh dunia. Dampak serius bencana pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi berbagai sektor industri mengalami banyak gangguan, termasuk diantaranya industri pariwisata yang mempunyai keterkaitan dengan industri lain yaitu perhotelan, transportasi, usaha kecil makro dan menengah (UMKM) yang menghasilkan cendera mata, kuliner, restoran, biro perjalanan wisata dan pemandu wisata. Kerugian akibat pandemi COVID-19 sangat besar, namun hendaknya tidak hanya sebatas menghitung dan mengkaji dampaknya, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam menyelamatkan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung banyak pihak.

Tulisan ini merupakan refleksi dari kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat yang pernah dilakukan di Destinasi Wana Wisata Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan untuk memberikan solusi bagaimana untuk membangun kembali seluruh rantai nilai pariwisata pasca pandemi COVID-19, dalam hal ini lebih difokuskan pada bisnis kuliner yang ada di obyek destinasi wisata yang terkena dampak serius pandemi COVID-19. Banyak pebisnis kuliner yang terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu atau bahkan mengalami kebangkrutan.

Pandemi COVID-19 membuat bisnis kuliner di destinasi wisata mengalami masalah seperti menurunnya pengunjung wisata, penurunan konsumsi, dan daya beli masyarakat, serta perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih memilih makanan yang bisa *take away* dan *delivery order*, sehingga konsumen mulai beralih ke pembelian *low contact* (secara *online*), konsumen kini jauh lebih peduli kesehatan termasuk dalam hal memperhatikan cara pengolahan dan pengemasan makanan yang lebih higienis. Konsumen lebih memilih makanan sehat yang meningkatkan imunitas tubuh, memilih penjual yang bermasker, dan menerapkan protokol kesehatan, serta yang mampu menjalin hubungan baik dengan konsumennya.

Setelah diberlakukannya tatanan era baru (*New Normal*) pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka beberapa destinasi wisata mulai dibuka kembali untuk umum dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Situasi ini memberikan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga eksistensi bisnis kuliner di obyek destinasi wisata untuk bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi COVID-19. Pada praktiknya dalam bisnis kuliner tersebut ternyata banyak masalah yang harus diselesaikan yaitu lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan pelaku bisnis kuliner dalam membaca peluang yang ada, masalah permodalan usaha, serta belum adanya tata kelola keuangan atau pembukuan yang tepat, dan juga lemahnya strategi pemasaran (*marketing*). Sistem jaringan yang masih kurang juga menjadi permasalahan pokok, karena sebaik apapun kualitas produk kuliner yang dihasilkan, apabila kurang promosi dalam hal ini membuat pelaku bisnis kuliner tidak akan mampu bersaing.

Keberlanjutan usaha pasca pandemi COVID-19 menjadi hal yang penting bagi pebisnis kuliner, untuk itu perlu adanya peningkatan kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan kepemimpinan atau sering disebut dengan CIEL, serta menentukan strategi pemasaran dengan harapan dapat mempunyai jaringan usaha yang kuat guna memasarkan produk kulinernya, ditunjang dengan tata kelola keuangan yang unggul, agar pebisnis kuliner memiliki kemampuan untuk beradaptasi menghadapi krisis di masa pasca pandemi COVID-19.

2. KAJAN TEORI

2.1 Bisnis Kuliner

Istilah bisnis, menurut Griffin dan Ebert dalam (Sancoko, 2015) pengertian bisnis dapat diartikan semua aktivitas memproduksi barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Istilah kuliner berasal dari bahasa Inggris yaitu *culinary*, yang dapat dikaitkan dengan kegiatan memasak. Jadi bisnis kuliner dapat diartikan aktivitas memproduksi masakan, baik berupa lauk pauk, makanan maupun minuman yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, Jadi bisnis kuliner merupakan bisnis yang dijalankan di sektor kuliner atau makanan, artinya menjual makanan ringan, makanan berat, sarapan, jajanan, termasuk minuman, dan sebagainya.

2.2 Konsep *Creativity, Inovation, Entrepreneurship, Leadership* (CIEL)

Konsep CIEL yaitu *creativity, innovation, entrepreneurship dan leadership* menjadi salah satu gebrakan yang bisa membuat pelaku usaha bangkit dari masa sulit. Konsep ini di adopsi dari pemikiran Hermawan Kartajaya, pakar pemasaran sekaligus Founder dan Chairman MarkPlus, Inc. Dalam webinar Hermawan Kartajaya *Live*, yang bertajuk *Big Momentum: Prepare Now Actualize Next*. pakar pemasaran ini mengungkapkan bahwa kreativitas harus ada untuk mendukung produktivitas dalam bisnis, tanpa kreativitas, bisnis hanya rutinitas dan sulit adaptif. Pemasar dan pelaku bisnis tidak hanya harus kreatif (*creativity*) dan inovatif (*innovation*), tapi diperlukan kombinasi antara strategi pemasaran yang tepat dan progresif dengan jiwa entrepreneurship yang dipadukan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Ketiga elemen (*creativity, innovation, dan entrepreneurship*), yang akan disempurnakan dengan *leadership* (kepemimpinan). Konsep ini mengajak seluruh pelaku bisnis untuk optimis dan menerapkan CIEL dalam implementasi bisnisnya. Strategi pemasaran yang baik saja tidak cukup, tapi harus ada kombinasi antara jiwa entrepreneurship dan kepemimpinan untuk memperkuat bisnis. Disinilah kemampuan manajerial dibutuhkan untuk mengkombinasikan banyak elemen, karena yang dikelola bukan hanya soal memanfaatkan kesempatan bisnis, tapi harus memikirkan cashflow, sampai *profit and loss*.

2.3 Segmentasi Pasar dan Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*)

2.3.1 Segmentasi pasar

Menurut Goyat (2011) mendefinisikan segmentasi pasar sebagai *“a strategy of dividing the market in homogenous group”*. Artinya, segmentasi pasar adalah strategi membagi pasar menjadi grup grup yang homogen. Melalui segmentasi pasar yang tepat, perusahaan diharapkan dapat memilih kelompok konsumen yang tepat untuk dilayani sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien, karena sumber daya perusahaan terbatas, perlu adanya tindakan untuk mengkonsen-trasikan sumber daya hanya pada segmen yang dipilih saja. Hal ini yang menyebabkan segmentasi pasar sangat penting untuk dilakukan. Ada empat dasar dalam melakukan segmentasi pasar, yaitu : egmentasi berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku (Kotler & Keller, 2016) (Goyat, 2011)

2.3.2 Bauran pemasaran (*marketing mix*)

Menurut Kotler & Keller (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *“Marketing Mix is the set of controllable variables that the firm can use to influence the buyer’s response”*. *The controllable variables in this context refer to the 4 P’s [product, price, place and promotion]*. Variabel yang dapat dikontrol dalam konteks ini yang dimaksud adalah 4P yaitu *product, price, place, dan promotion*.

2.3.2.1. Product (produk)

Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Suatu produk yang telah dibuat dengan strategi yang baik harus diberi nama (*brand*) agar mudah dikenal, diingat, dibeli, dideferensiasikan, serta dipositioningkan. Desain produk yang terkait dengan bentuk, pola dan warna dari produk tersebut, berfungsi membuat produk menjadi lebih mudah digunakan. Kualitas produk bisa ditentukan dari material yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan, sehingga harga tinggi dapat dibebankan jika produk punya kualitas unggul. Fitur produk, banyak konsumen mencari produk berdasarkan fitur yang dimilikinya, seberapa banyak fitur produk akan mempengaruhi banyaknya kegunaan dari sebuah produk tersebut.

2.3.2.2. Price (harga)

Jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Kemudahan mengakses informasi melalui internet, dan perusahaan juga memajukan berbagi informasi terkait produk,

layanan dan harga, hal ini menyebabkan transparansi harga semakin meningkat, sehingga konsumen dimudahkan untuk membandingkan harga yang ditawarkan. Adanya transparansi harga ini menyebabkan tekanan terhadap perusahaan untuk menurunkan harga juga, sebab jika perusahaan tidak menurunkan harga tanpa memberikan keuntungan lebih, dengan mudah konsumen akan pindah membeli produk kompetitor dengan harga yang lebih murah.

2.3.2.3. Place (tempat/lokasi)

Salah satu faktor penentu kesuksesan bisnis, untuk pilihan lokasi yang tepat dalam arti lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai, dilalui oleh banyak orang, sehingga konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat bisnis. Dalam memilih lokasi bisnis yang tepat perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: lokasi bisnis yang mudah terlihat, biaya membangun atau sewa bangunan, akses yang mudah dijangkau, hubungan sosial dengan konsumen, perijinan bisnis, dan lingkungan tempat bisnis dan sekitarnya.

2.3.2.4. Promotion (promosi)

Aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk pelanggan agar membeli produk yang ditawarkan. Menurut Kotler & Keller (2016) bauran komunikasi pemasaran (*the marketing communication mix*) terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu *mass communication, personal communication, dan digital communication*..

Sesuai dengan perkembangan zaman, 4P ini kemudian berevolusi menjadi 4P (*People, Process, Program, & Performance*). Kotler & Keller (2016) menyebutnya sebagai *Modern Marketing Management*. Evolusi yang terjadi pada konsep 4P tersebut terjadi karena dalam proses pemasaran, peranan *people* sangat penting untuk tercapainya tujuan pemasaran. Dalam persaingan yang sangat ketat, peranan *People* yang memberikan pelayanan sangat penting. *People* dapat menjadi *competitive advantage* perusahaan yang relatif sulit ditiru, dan *people* yang melayani dalam hal ini adalah keberadaan dan kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan perusahaan. *Process* merupakan proses layanan, dimana proses layanan produk yang lama, berbelit-belit, dan tidak nyaman bagi konsumen akan membuat konsumen enggan membeli produk. *Programs*, adalah seluruh cakupan aktivitas yang diarahkan kepada pelanggan baik *online* maupun *offline*. *Performance*, disini dapat

dianalogikan seperti pemasaran holistik, berbagai hasil kegiatan pemasaran akan memiliki implikasi finansial dan nonfinansial (profitabilitas, merek, dan ekuitas pelanggan) serta implikasi diluar perusahaan (tanggung jawab sosial, hukum, etika, dan masyarakat terkait).

Beberapa ahli menggabungkan variabel *marketing mix* sehingga menjadi unsur 8P yaitu *Product, Price, Place People, Process, Program, Performance*, dan ditambah dengan *Physical Evidence (Bukti Fisik)*. Menurut Tjiptono (2016) *Physical Evidence* adalah semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung jalannya suatu bisnis. *Physical Evidence* dapat dianalogikan sebagai tempat diberikannya layanan.

2.4 Lingkungan Pemasaran

Lingkungan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pemasaran, karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, Lingkungan pemasaran secara keseluruhan untuk bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu lingkungan mikro dan makro. Evaluasi faktor eksternal yang ada di bisnis kuliner dapat difokuskan dengan mengevaluasi faktor lingkungan, baik *task environment* (lingkungan mikro atau tugas) maupun *broad environment* (lingkungan makro atau luas) dengan harapan dapat mempunyai jaringan usaha yang kuat guna memasarkan produk kulinernya.

2.5 Tata Kelola Keuangan

Kemampuan yang penting untuk dimiliki pelaku bisnis kuliner dalam membangun usaha yang berkelanjutan adalah kemampuan dalam tata kelola keuangan atau manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan (pengelolaan keuangan) menurut Horne dalam Kasmir (2010) adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Terkait dengan pengelolaan keuangan adalah pengetahuan akan akuntansi atau pembukuan. Hal ini, dikarenakan agar segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan dapat terdeteksi dan terkelola dengan baik. Selain itu, agar *cash flow management* arus kas sebagai indikator utama dari kesehatan keuangan dan sebagai ukuran

kemampuan pelaku bisnis kuliner untuk melakukan manajemen arus kas dapat di kendalikan dengan baik.

Pemahaman mengenai laporan pembukuan atau akuntansi secara sederhana melalui beberapa kegiatan, diantaranya: pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Dimasa krisis seperti adanya pandemi COVID-19 ini, laporan keuangan menjadi indikator penting dalam mendukung tumbuhnya usaha selain fokus pada pemasaran.

3. METODE PELAKSANAAN

Program Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan pada bulan Desember 2020, bermitra dengan Kantor Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang berada di Jalan KI Ageng Kromo Danurejo No 34 Padusan - Pacet – Mojokerto, yang tergolong mitra non produktif. Dari hasil kunjungan lapangan dan berdiskusi dengan Kepala Desa Padusan yang dijadikan mitra, serta hasil investigasi di Destinasi Wana Wisata Padusan Pacet banyak pengunjung yang menyampaikan keluhan tentang sikap dan perilaku dari pelaku bisnis kuliner yang kurang baik dalam memberikan pelayanan, maupun dalam berkomunikasi dengan pengunjung.

Dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut, maka dirancang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan mengadakan penyuluhan kepada pelaku bisnis kuliner dan juga para kader PKK Desa Padusan terkait dengan etika dan kemampuan berkomunikasi. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, dengan materi tentang etika dan komunikasi pemasaran serta trik pemasaran bisnis kuliner, sekaligus dilanjutkan dengan praktik. Selanjutnya dilakukan pedampingan para pelaku bisnis kuliner, dengan tujuan agar para pelaku bisnis kuliner benar-benar dapat mempraktikkan materi yang telah diberikan dalam penyuluhan oleh Tim Program Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 1. Penyuluhan Tentang Etika & Komunikasi Pemasaran Kantor Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 2. Pedampingan Pelaku Bisnis Kuliner Dalam Praktik Memberikan Pelayanan Kepada Pengunjung Wisata Pada Destinasi Wana Wisata Padusan Pacet Mojokerto

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan. Selanjutnya penulis meneliti/menjelajah bisnis kuliner yang ada di Destinasi Wana Wisata Padusan Pacet, dan bisnis kuliner di obyek destinasi wisata yang ada di beberapa kota di Jawa Timur, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis kuliner dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga banyak dari pelaku bisnis kuliner yang terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu atau bahkan mengalami kebangkrutan. Pada praktiknya bisnis kuliner di obyek destinasi wisata menghadapi banyak masalah yang harus segera diberikan solusi. Dalam pemberian solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis kuliner di obyek destinasi wisata, digunakan pendekatan penelitian tindakan (*action research*).

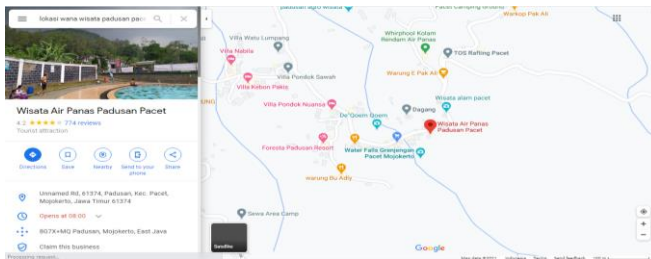
Menurut Zuriah (2003) mengemukakan bahwa penelitian tindakan menekankan pada kegiatan (tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang

diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan melakukan perbaikan sosial. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian tindakan yang dilakukan penulis adalah bentuk penyelidikan refleksi yang dilakukan dalam situasi sosial (mencakup bisnis kuliner di obyek destinasi wisata) untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku bisnis kuliner yang ada disekitar obyek destinasi wisata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis kuliner telah menjadi bagian penting saat seseorang mengunjungi sebuah destinasi wisata. Saat bepergian, orang tidak hanya sekedar makan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan fisiologisnya (Henderson, 2014). Bisnis kuliner dalam sebuah destinasi wisata berpotensi meningkatkan pengalaman pengunjung wisata, hal ini dapat berkontribusi dalam konsep pengembangan obyek wisata yang lebih besar.

Berdasarkan hasil Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengadakan penyelidikan/ menjelajah ke Destinasi Wana Wisata Desa Padusan Pacet Mojokerto seperti tampak pada gambar 4, dan untuk menambah *insight* penulis juga melakukan observasi ke obyek destinasi wisata lain yang ada di beberapa kota di Jawa Timur terkait dengan bisnis kuliner yang ada di obyek wisata tersebut.



Gambar 4. Peta Lokasi Destinasi Wana Wisata Desa Padusan Pacet Mojokerto (Sumber: Google Maps, 2021)

Hasil dari penyelidikan/menjelajah tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis kuliner di obyek destinasi wisata selama pandemi Covid -19 yaitu lemahnya kreativitas dan inovasi pelaku bisnis kuliner, lemahnya kemampuan pelaku bisnis kuliner dalam membaca peluang yang ada, masalah permodalan usaha

serta belum dilakukannya pembukuan dan tata kelola keuangan yang tepat, serta lemahnya strategi pemasaran, sistem jaringan yang masih kurang juga menjadi permasalahan pokok. Pentingnya untuk memberikan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis kuliner. Penentuan strategi terbaik dalam hal pemasaran dan tata kelola keuangan yang unggul, diharapkan dapat memberikan kemampuan pelaku bisnis kuliner diobyeck destinasi wisata untuk beradaptasi menghadapi krisis pasca pandemi COVID-19.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku bisnis kuliner di obyeck destinasi wisata untuk keberlanjutan bisnis kulinernya yaitu:

4.1 Mengevaluasi Faktor Internal

Faktor internal yang ada di bisnis kuliner dapat difokuskan dengan mengevaluasi segmentasi pasar dan komponen-komponen bauran pemasaran (*marketing mix*), serta mengevaluasi pembukuan dan tata kelola keuangan.

4.1.1 Segmentasi pasar

Segmentasi pasar dalam bisnis kuliner membutuhkan pemaparan mengenai beberapa segmen penting, yaitu segmentasi sosial ekonomi demografis, dan segmentasi psikografi. Segmentasi Sosial Ekonomi dan Demografis dapat digunakan sebagai penentu dalam budaya mengkonsumsi makanan (Mak, Athena et al., 2012). Segmentasi Psikografis membagi kelompok berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atau nilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang sangat berbeda (Kotler & Keller, 2016).

Segmentasi Sosial Ekonomi dan demografis yang terkait dengan bisnis kuliner umumnya digunakan untuk memprediksi pola konsumsi makanan, sehingga dapat diketahui pilihan makanan seseorang, penyajian makanan, cara makanan disajikan dan bagaimana makanan dikonsumsi. Segmentasi ini dapat berfungsi sebagai prediktor profil pengunjung wisata yang mengunjungi sebuah destinasi wisata.

Segmentasi Psikografi, yang terkait dengan bisnis kuliner umumnya setiap pengunjung wisata akan mencari destinasi yang pasti melibatkan kegiatan kuliner. Psikografi sering diartikan sebagai pengukuran AIO (*Activity, Interest, Opinion*), yakni pengukuran kegiatan, minat dan pendapat konsumen. Segmen Psikografis pengunjung

wisata kuliner dapat dijabarkan dalam tiga tipe yakni, *Experiencer*, yang menganggap makanan penting untuk pemilihan destinasi; *Enjoyers*, yang memiliki sikap positif terhadap makanan; dan *Survivors*, yang menganggap bahwa makanan lokal tujuan mereka mencakup kebutuhan fisiologis.

4.1.2 Komponen bauran pemasaran (*marketing mix*)

4.1.2.1 *Product*

Sebagai pelaku bisnis kuliner di obyek destinasi wisata harus bisa membuat produk kuliner yang dapat diterima oleh pengunjung wisata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan produk kuliner di obyek destinasi wisata yaitu:

1. Melakukan *branding* atau pemberian nama tempat bisnis kuliner
Pilih nama yang unik dan mudah diingat agar terkesan kepada setiap orang yang melihatnya.
2. Menciptakan menu kuliner yang unik, bervariasi, berkualitas. dan berbeda dengan pesaing lainnya, agar memberikan kepuasan yang tinggi kepada pengunjung wisata.

4.1.2.2 *Price*

Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis kuliner, umumnya pengunjung wisata akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan dengan yang lain, sehingga penting bagi pelaku bisnis kuliner menentukan harga yang baik, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut

1. Menetapkan harga miring atau diskon. Diskon merupakan satu diantara alasan konsumen kembali lagi.
2. Memikirkan pemberian potongan harga bagi pengunjung wisata yang melakukan pembelian diatas nominal tertentu, misalnya diskon 10% setiap pembelian makanan diatas 100 ribu dan berlaku kelipatannya atau bisa dilakulan dengan cara lain bisa dalam bentuk kupon atau menu gratis

4.1.2.3 *Place* (tempat/lokasi)

Place (tempat/lokasi) merupakan salah satu faktor penentu bisnis kuliner. Karenanya, pilihlah lokasi yang strategis dan benar, dalam arti lokasi yang ramai dan dilalui oleh banyak orang sehingga pengunjung wisata tertarik dan serta mudah untuk menemukan.

Tips yang dapat digunakan dalam memilih tempat di obyek destinasi wisata yaitu :

1. Pilih area yang mudah terlihat, sehingga sudah pasti akan banyak memperoleh perhatian. .
2. Menghitung biaya membangun atau sewa tempat bisnis kuliner secara cermat sebelum membuat keputusan kontrak sewa.
3. Memperhatikan lingkungan tempat bisnis kuliner dan sekitarnya, dari sisi keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesejukan, karena setiap pengunjung wisata menginginkan suasana tempat kuliner yang seperti itu.

4.1.2.4 *Promotion*

Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk kuliner kepada pengunjung wisata. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan pelaku bisnis kuliner dalam rangka mempromosikan produk kuliner yaitu:

1. Buat *Tagline* menarik agar selalu diingat
Pelaku bisnis dapat mencontoh *tagline* dari *brand* produk kuliner kekinian yang sangat laris dipasaran, seperti *tagline* Kopi Janji Jiwa, “Yang berasal dari hati akan sampai ke hati”. Memudahkan promosi di sosial media dan tentunya mudah diingat oleh pengunjung wisata sehingga bisa membuat produk kuliner menjadi terkenal.
2. Buat *packaging* produk yang menarik dan ramah lingkungan
Kondisi pasca pandemi COVID-19 membuat pelaku bisnis kuliner menghadapi banyak hal baru dari perilaku konsumennya, seperti konsumen lebih memilih kuliner yang bisa *take away* dan *delivery order* sehingga dibutuhkan *packaging* dari bahan yang mampu melindungi makanan untuk tetap berkualitas dari rasa dan higienisnya dan dipilih bahan yang ramah lingkungan.
3. Beri sampel gratis pada pengunjung wisata
Pelaku bisnis kuliner dapat menarik pengunjung wisata untuk berkunjung ke tempat bisnis kuliner, dengan memberikan sampel makanan dalam porsi kecil kepada para pengunjung wisata untuk mencoba produk kuliner yang ditawarkan, sambil membagikan brosur/ selebaran kesetiap pengunjung yang datang.
4. Meningkatkan kerja sama dalam mempromosikan produk kuliner
Pelaku bisnis kuliner perlu menjalin kerja sama untuk mem-

promosikan produknya, khususnya menjalin kerja sama dengan agen wisata, instansi pemerintah, dan pihak swasta.

4.1.2.5 *People*

Dalam persaingan yang sangat ketat, peranan *people* yang memberikan pelayanan sangat penting. Beberapa hal penting yang perlu dimiliki oleh pelaku bisnis kuliner yaitu :

1. Kreativitas

Kreativitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis kuliner dapat berupa menganekaragamkan menu kulinernya harus terus diasah guna menemukan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bisnis kulinernya.

2. Inovasi

Inovasi dapat berupa penemuan produk kuliner baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, inovasi dari sisi makanan sehingga tercipta beberapa jenis menu makanan dan minuman baru yang dimilikinya. Inovasi dapat juga berupa pengembangan dari suatu produk kuliner yang sudah ada.

3. Jiwa *entrepreneurship*

Sebelum menjadi *entrepreneur*, seseorang dituntut untuk memiliki jiwa *entrepreneurship*. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* pelaku bisnis kuliner yaitu :

a. Harus memiliki niat dan keyakinan untuk membangun sebuah bisnis, dan memiliki kecepatan memanfaatkan peluang.

b. Perlu belajar dari kesuksesan orang, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan menghindarkan diri dari ketakutan dan resiko yang akan dihadapi.

c. Perlu menyiapkan modal, dan bersikap fokus, penuh keyakinan dan optimis serta tidak mudah menyerah.

d. Harus punya kemampuan menjual, untuk menarik minat konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan.

4. Kepemimpinan

Menjadi pelaku bisnis perlu memiliki kemampuan memimpin sebagai modal utama untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga perlu berfokus pada beberapa nilai yaitu :

a. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya

- b. Mampu bekerjasama dengan karyawan yang terlibat dalam bisnis kulinernya.
- c. Mampu mengelola waktu secara efektif
- d. Mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bisnis kulinernya.
- e. Mampu membangun hubungan yang baik melalui jaringan yang bisa membantunya untuk mengembangkan bisnisnya.

4.1.2.6 Process

Proses dalam unsur *marketing* adalah proses pelayanan kepada pengunjung wisata yang datang. Hal yang harus diperhatikan saat memberikan pelayanan kepada pengunjung wisata yang datang yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang baik, dengan bersikap : sopan dan perhatian saat penyajian, menjaga ketepatan waktu penyajian, mengenali konsumen dengan baik untuk memberi kesan agar konsumen mau Kembali.
- b. Dalam bisnis kuliner, bila pelayanan dalam bentuk sajian, maka pelayan akan memberikan pelayanan lengkap, mulai dari memberikan tempat duduk hingga membantu pembayaran.

4.1.2.7 Physical evidence

Tampilan fisik tempat bisnis kuliner akan menjelaskan bagaimana penataan tempat dari suatu bisnis kuliner, Beberapa cara untuk mengelola bukti fisik atau *physical evidence* untuk bisnis kuliner :

1. *An attention-creating medium*
Melakukan diferensiasi dengan membuat sarana fisik semenarik mungkin untuk menjaring pengunjung wisata.
2. *As a message-creating medium.*
Menggunakan simbol atau isarat untuk mengkomunikasikan secara intensif mengenai kekhususan kualitas produk kuliner yang ditawarkan.
3. *An effect-creating medium.*
Memakai baju seragam yang berwarna, bercorak, menciptakan sesuatu dengan suara (musik) dan desain dari produk kuliner yang ditawarkan.

4.1.2.8 Post purchase behavior

Penting bagi pelaku bisnis kuliner untuk meminta masukan kepada pengunjung wisata yang datang ketempat bisnis kulinernya untuk menilai rasa makanan dan pelayanan yang sudah diberikan,

sehingga pelaku bisnis kuliner dapat melakukan perbaikan terhadap kekurangan dan mempertahankan keunggulan bisnis kuliner yang dikelolanya. Secara tidak langsung, pengunjung wisata turut andil dalam kemajuan bisnis kuliner yang di kelola.

4.1.2.9 Tata kelola keuangan

Tata kelola keuangan (manajemen keuangan) yang diterapkan oleh pelaku bisnis kuliner di obyek destinasi wisata masih sangat sederhana yakni hanya ada pencatatan uang masuk dan uang keluar dan masih belum menggunakan kaidah-kaidah pencatatan arus kas yang baik dan benar, bahkan keuangan seringkali dikelola dengan mencampur adukan dengan keuangan keluarga. Hal ini berakibat progres keuangan bisnis menjadi semakin tidak terkontrol dengan baik. Sebagai salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran tentang tata kelola keuangan atau pembukuan dari pelaku bisnis kuliner. Untuk itu yang perlu dilakukan terkait tata kelola keuangan adalah:

1. Perlu dibangun kesadaran pelaku bisnis kuliner akan pentingnya akuntansi atau pembukuan dalam menjalankan bisnis kuliner.
2. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola adalah dengan memberikan pemahaman akuntansi dasar atau pembukuan sederhana.
3. Pembuatan laporan keuangan sederhana yang melalui beberapa tahapan yaitu :
 - a. Pencatatan, setiap transaksi dan mendokumentasikan bukti bukti transaksi (Restiani Widjaja et al., 2018). Bukti-bukti transaksi seperti nota, kuitansi, faktur, dan lainnya menjadi dasar dalam pencatatan pembuatan laporan keuangan.
 - b. Pengelompokan, pengelompokan dapat dimulai dengan pemahaman mengenai hubungan antara wujud kekayaan berupa aktiva dan sumber kekayaan berupa modal dan utang. Pada prinsipnya jumlah aktiva dan pasiva haruslah sama.
 - c. Ihtisar dan Penjabaran proses menghitung hasil penjualan. Adapun perhitungan yang dilakukan antara lain; menghitung total penjualan dikurangi biaya langsung, hal itu akan mendapatkan angka laba kotor. Selanjutnya laba kotor

dikurangi biaya tidak langsung yang akan menghasilkan laba bersih yang diperoleh dari penjualan produk.

- d. Tahap terakhir membuat laporan keuangan secara detail dari semua tahapan yang telah dilakukan. Melalui pelaporan keuangan sederhana ini, diproyeksikan dapat menjaga keberlangsungan bisnis kuliner, khususnya dalam upaya tata kelola keuangan di tengah wabah pandemi seperti ini. Agar resiko kebangkrutan atau turunnya omset dapat terminimalisir dan dapat dipantau setiap harinya, yang pada akhirnya pelaku bisnis kuliner tetap bisa tumbuh berkesinambungan pasca pandemi COVID-19.

4.2 Mengevaluasi Faktor Eksternal

Dalam upaya meningkatkan pengunjung wisata, maka evaluasi pada faktor eksternal lebih menitik beratkan kepada tanggung jawab pemerintah dalam mengkoordinasi semua stakeholder internal sehingga semua stakeholder dapat berperan secara maksimal dalam menyediakan layanan. Selain itu juga menyangkut bagaimana pemerintah menyediakan sarana fisik seperti akses transportasi dan akomodasi serta aspek non fisik seperti kebijakan dan perundangan sebagai pendukung dalam pengembangan bisnis kuliner di obyek destinasi wisata.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa untuk keberlanjutan bisnis kuliner pasca COVID-19, pelaku bisnis kuliner perlu meningkatkan kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan kepemimpinan. Pelaku bisnis kuliner perlu menentukan strategi pemasaran dan tata kelola keuangan yang unggul, agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi menghadapi krisis pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya menerapkan penjualan secara *online*, menyediakan jasa layanan *take away* dan *delivery order* (khususnya untuk masyarakat yang tinggal disepertar daerah wisata), untuk meningkatkan omzet penjualan. Dalam memperkecil resiko penularan COVID-19 perlu sering dilakukan pembersihan area tempat bisnis kuliner dengan desinfektan, memanfaatkan transaksi non tunai dan mengemas produk secara higienis, menawarkan menu kuliner yang dapat

meningkatkan imunitas tubuh, dan berusaha mempertahankan konsumen loyal serta menjalin hubungan baik dengan konsumen baru untuk menangkan persaingan.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian telah selesai dan berhasil dengan baik, atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iryani Muarrifah sebagai Kepala Desa Padusan beserta perangkatnya yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Dr. Fadjar Kurnia Hartati, MP sebagai Ketua LPPM Universitas Dr. Soetomo yang telah memberi kesempatan untuk terlaksananya kegiatan program pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Goyat, S. 2011. *The basis of market segmentation: a critical review of literature*. 3(9), 45–55.
- Henderson, J. C. 2014. Food and culture: In search of a Singapore cuisine. *British Food Journal*, 116(6), 904–917. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2012-0291>
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Prenadamedia Group.
- Kotler, P., & Keller, L. K. 2016. Marketing Management. In *Journal of Marketing* (15th ed., Vol. 37, Issue 1). Prentice Hall International Inc. <https://doi.org/10.2307/1250781>
- Mak, Athena, H., Lumbers, M., & Eves, A. 2012. *Globalisation and food consumption in tourism*. 1–32. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Restiani Widjaja, Y., Martian fajar, C., Edwar Yokeu Bernardin Dwinta Mulyanti, D., & Nurdin, S. 2018. Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk UMKM Industri Konveksi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 163–179. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Sancoko, A. H. 2015. Strategi Pengembangan Bisnis Makanan Dan Minuman Pada Depot Time To Eat Surabaya. *Agora*, 3(1), 185–194.
- Tjiptono, F. 2016. *Service, Quality & satisfaction*. Andi Offset.

Biografi Penulis 1



Andry Herawati adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi-Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1990 sampai sekarang. Praktisi dan peneliti di bidang pemasaran sejak tahun 2011. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Administrasi Niaga Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 1989 dan S2 Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1992

Biografi Penulis 2



Liling Listyawati adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi-Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1996 sampai sekarang. Menjadi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga dari tahun 2017 sampai 2021. Praktisi dan peneliti di bidang pemasaran dan perbankan sejak tahun 2011. Menyelesaikan studi S1 Ilmu Administrasi Niaga Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 1995 dan S2 Magister Manajemen di Universitas Dr. Soetomo tahun 2010

PELATIHAN MANAJEMEN USAHA DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI SI APIK PADA KELOMPOK UMK MITRA SETIA KAWAN (MSK) MUTIARA CITRA GRAHA SIDOARJO

Firdaus

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: firdaus@unitomo.ac.id

Email korespondensi: firdaus@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perumahan Mutiara Citra Graha merupakan salah kompleks perumahan yang ada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Perumahan ini didirikan sekitar tahun 1999 atau keberadaannya sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Secara administratif perumahan ini berada di dua desa yaitu desa Larangan dan desa Bligo Kecamatan Candi. Telah banyak fasilitas umum yang ada di kompleks perumahan ini antara lain sekolah, pasar, masjid, taman bermain, dan lain sebagainya.

Jumlah rumah di perumahan ini kurang lebih ada sekitar 750 rumah dengan berbagai type, dengan jumlah KK sebanyak kurang lebih ada sekitar 750 KK. Penghuni perumahan ini terdiri dari berbagai strata sosial, menyesuaikan dengan tipe rumah yang didiami dan blok yang terbagi menjadi 3 RW di mana masing – masing RW terdiri kurang lebih 10 RT.

Berbagai aktivitas warga terdapat di perumahan ini antara lain ada yang berdagang/berwiraswasta, menjadi pegawai baik swasta maupun negeri, pendidik serta beragam profesi yang lain. Pada RT tertentu, terutama RT 43 terdapat pasar kaget dimana hampir sebagian besar, pedagang yang ada di pasar ini adalah pelaku UMK di sekitar perumahan dan ada beberapa pelaku UMK yang berasal dari desa Bligo dan desa Larangan. Jam buka pasar kaget ini mulai pukul 05.30 sampai dengan jam 10.00.

Berdasarkan data yang ada, di RT 43 ada sekitar 55 KK dimana terdapat kurang lebih ada 45 pelaku usaha UMK yang menjadi wiraswasta di pasar RT 43. Secara rinci data tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Data Profesi Warga Perumahan Mutiara Citra Graha Sidoarjo

No	Keterangan	Jumlah	Profesi			
			Pegawai	Pelajar	Wiraswasta	Ibu RT
1	Laki-Laki	162	55	65	42	0
2	Perempuan	234	23	97	56	58

(Sumber: Data lapangan)

Dokumentasi kegiatan wirausaha UMK di Perumahan Mutiara Citra Graha desa Larangan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana kegiatan wirausaha di MCG

Berpedoman pada analisis situasi sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat dua permasalahan utama yaitu pertama, aspek rendahnya kemampuan mengelola usaha berdasarkan prinsip usaha yang baik dan aspek pengelolaan keuangan usaha serta dalam hal pembuatan laporan keuangan usaha.

Aspek kedua menyangkut masih minimnya pengetahuan para pelaku UMK Perumahan Mutiara Citra Graha, akan pengetahuan manajemen wirrausaha baik terkait dengan perencanaan usaha, pengoranisasian sumber daya yang ada dalam mendukung kegiatan berusaha, maupun menajamen terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha di lapangan serta bagaimana cara mengevaluasi kegiatan usaha yang telah dilaksanakan, apakah kegiatan usahanya menghasilkan keuntungan atau tidak.

Dengan mempertimbangkan dua permasalahan di atas, maka diadakan kegiatan pengabdian yang nantinya akan menekankan pada peningkatan kemampuan manajemen wirausaha maupun peningkatan kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan yang sederhana dengan aplikasi si APIK.

2. KAJIAN TEORI

Laporan keuangan disiapkan oleh setiap entitas bisnis baik skala kecil menengah bahkan besar untuk dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis,

Menurut laporan keuangan pada perusahaan/unit usaha bisnis memiliki suatu fungsi yang sangat penting dalam pasar modal, dimana laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Selain itu laporan keuangan selalu melaporkan aktivitas perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Tujuan dan manfaat dari analisa laporan keuangan menurut Kasmir 2011) dalam Erica (2018) adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. (Kasmir, 2011)

Menurut Munawir (2010) dalam (Hamzah, 2016) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggam-

barkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan

3. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, serta hasil diskusi dengan mitra, maka prioritas permasalahan yang harus diselesaikan bersama mitra adalah memperbaiki manajemen usaha peserta serta memberikan tambahan ketrampilan pembuatan laporan keuangan usaha untuk mengetahui perkembangan usaha ybs.

Untuk itu, metode pelaksanaan yang digunakan *lesson together* atau belajar dan berpraktek bersama-sama, di mana masing-masing tahapannya sebagai berikut:

1) Langkah-langkah tahap perencanaan.

- a. Menyusun materi untuk pelatihan dan praktek. Materi pelatihan meliputi (i) wawasan terkait manajemenwirausaha dan aspek keekonomian usaha (ii) pembuatan laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil dengan aplikasi si APIK.
- b. Melakukan koordinasi tim, khususnya pembuat materi pelatihan untuk menentukan praktek yang akan diberikan kepada peserta.
- c. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk menetapkan kesepakatan jadwal kegiatan pelatihan serta model pelaksanaannya, termasuk bentuk kontribusi mitra pada kegiatan pelatihan.
- d. Penggandaan materi pelatihan dan bahan praktek oleh mitra.
- e. Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam dua seksi sesuai dengan materi pelatihan, dimana setiap sesi dalam seminar, ditutup dengan pemberian materi praktek yang harus dikerjakan oleh peserta.

2) Langkah-langkah tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan, pelatihan menggunakan metode belajar dan berpraktek bersama-sama (*lesson together*). Dengan langkah seperti berikut ini.

- a. Pemberian materi terkait dengan wawasan manajemen usaha dan perhitungan aspek keekonomian sebuah usaha.
- b. Pelaksanaan pemberian materi pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi si APIK pada pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK)
- c. Pada pelaksanaan pemberian materi ketrampilan pembuatan laporan keuangan, peserta diajak bersama-sama praktek untuk membuat laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil.
- d. Dalam praktek pembuatan laporan keuangan peserta didampingi pelatih dan mitra sampai peserta menguasai materi praktek laporan yang diberikan.

3) Langkah-langkah tahap evaluasi dan *monitoring*

- a. Melakukan evaluasi kegiatan pengabdian meliputi evaluasi penyerapan materi manajemen wirausaha dan aspek keekonomian dalam berusaha
- b. Melakukan evaluasi kegiatan pengabdian meliputi evaluasi penyerapan materi praktek pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi si APIK pada pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK).
- c. Melakukan monitoring setelah pelatihan selesai sampai seberapa jauh peserta dalam melakukan praktek pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi si APIK pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK)

Keberhasilan program pengabdian ini sangat dipengaruhi oleh peran aktif dari mitra dan pihak terkait. Pada program ini, mitra adalah kelompok pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK) yang mempunyai usaha kecil yang berdomisili di perumahan mutiara citra graha sidoarjo. Oleh karena itu, mitra dilibatkan sejak awal. Berdasarkan kesepakatan awal, maka partisipasi mitra pada program ini meliputi beberapa hal berikut ini.

- 1) Identifikasi masalah terkait dengan ketrampilan usaha.
- 2) Turut menetapkan prioritas masalah yang akan diselesaikan.
- 3) Turut menetapkan program yang akan dijalankan.

- 4) Bersedia menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan di tempat mitra.
- 5) Bersedia memberi motivasi pada peserta yang ditugaskan untuk mengikuti program pengabdian
- 6) Bersedia untuk dimonitor setelah program selesai demi keberlanjutan dan keberhasilan program pengabdian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan khalayak sasaran pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK) Mutiara Citra Graha Sidoarjo dilakukan dengan 2 tahap kegiatan.

1. Pemberian pelatihan manajemen usaha

Pemberian pelatihan manajemen usaha ini dimaksudkan agar khalayak sasaran pelaku UMK Mitra Setia Kawan (MSK) Perum Mutiara Citra Graha) dapat memahami aspek manajemen usaha dalam mengelola kegiatan usahanya yang sedang dijalani maupun pengembangan usaha di masa mendatang. Dalam kegiatan ini peserta sangat antusias menyimak serta ada yang bertanya terkait dengan pengelolaan usaha. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman serta wawasan terkait dengan manajemen usaha mulai dari tata kelola penjualan, pengelolaan asset yang dimiliki serta bagaimana upaya-upaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya di masa yang akan datang



Gambar 2. Suasana pendampingan manajemen usaha

2. Pemberian pelatihan aplikasi si APIK dan literasi laporan keuangan

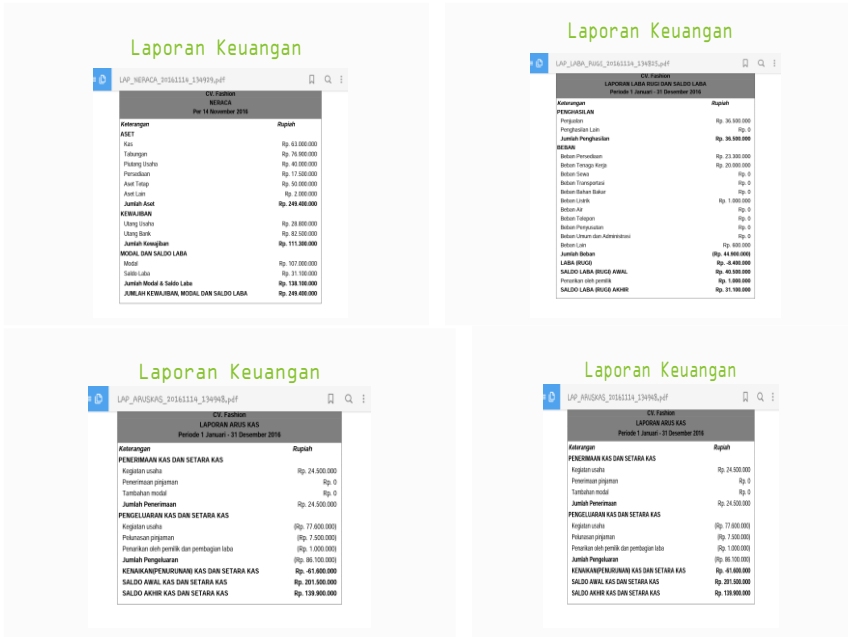
Setelah peserta pelatihan diberi wawasan tentang manajemen usaha dan dimana salah satu aspeknya adalah pengelolaan manajemen keuangan, selanjutnya peserta diberi pelatihan penyusunan pembuatan

laporan keuangan sederhana dengan program si APIK dari Bank Indonesia sebagai alat bantu dalam pembuatan laporan keuangan untuk usaha kecil dan mikro. Dalam kegiatan ini peserta diberikan materi menu menu yang ada ada dalam program si APIK. Kemudian dilanjutkan dengan cara menginput data tentang kas, pituang usaha, aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, modal, dan lain sebagainya. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan keuangan secara sederhana untuk usaha mikro dan kecil berupa Laporan Rugi Laba, Neraca serta Laporan Perubahan Modal yang dapat disusun oleh peserta serta pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan ketiga laporan keuangan tersebut. Hasil luaran kegiatan pada tahap ini, berupa menu-menu dalam program si APIK disajikan pada dokumentasi Gambar 3.



Gambar 3. Luaran *interface* dan menu dalam si APIK BI

Sementara itu, untu hasil luaran kegiatan pada tahap ini, berupa laporan keuangan sederhana dalam program si APIK disajikan pada dokumentasi berikut ini.



Gambar 4. Hasil luaran program si APIK berupa laporan keuangan sederhana

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pendampingan manajemen pengelolaan usaha serta penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SI APIK untuk pelaku UMK Mitra Setia Kawan Perum Mutiara Citra Graha, maka kegiatan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Peserta pengabdian cukup antusias dan motivasinya sangat besar dalam mengikuti kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan usaha untuk usaha kecil dan mikro dan penggunaan aplikasi si APIK untuk membantu pembuatan laporan keuangan.
- Setelah mengikuti pelatihan peserta sudah dapat memahami arti penting majemen pengelolaan usaha untuk usaha mikro dan kecil dan bagaimana pengelolaannya serta aplikasinya dengan menggunakan program si APIK dari Bank Indonesia untuk penyusunan laporan keuangan sederhana.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka kegiatan pengabdian pendampingan manajemen pengelolaan usaha serta penyusunan laporan keuangan dengan plikasi SI APIK untuk pelaku UMK Mitra

Setia Kawan (MSK) MCG Sidaorjo, dalam upaya untuk meningkatkan literasi laporan keuangan memberikan masukan sebagai berikut :

- Ada kegiatan pengabdian lanjutan pada khalayak sasaran yang sama seperti pelatihan pembukuan terpadu
- Ada peningkatan anggaran pengabdian, sehingga khalayak sasaran yang dituju akan semakin banyak dan luas.

REFERENSI

- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Ecodemica*, 2(1), 117–124. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/291>
- Hamzah, M. dan N. (2016). Analisa Perbandingan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi Sawit Gunung Sangkur Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 4(2), 87–95. <http://stie-yappas.ac.id/e-jurnalapresiasiekonomi/jurnal/422.pdf>

Biografi Penulis



Firdaus adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo sejak tahun 1995. Lahir di Ponorogo, 5 Januari 1970. Ia mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen (Ekonomi Perusahaan) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 1993. Kemudian gelar Magister Manajemen bidang Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2011. Berbagai pelatihan professional dan forum ilmiah yang pernah diikuti antara lain dalam bidang: metodologi penelitian, metode statistik manajemen keuangan, study kelayakan bisnis/proyek, manajemen sains/kuantitatif serta penulisan jurnal nasional dan internasional. Selain sebagai dosen, ia juga sebagai asesor kompetensi di LSP Universitas Dr Soetomo. Organisasi profesionalnya di Forum Manajemen Indonesia (FMI) serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Bidang minatnya adalah Manajemen Kuantitatif (*Operation Research*) dan *Project/Business Feasibility Study*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI JURUSAN SURABAYA–MALANG- BLITAR

Sutarmin¹ Wiwik Budiarti²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: soetarmin@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, email: wiwikbudiarti@unitomo.ac.id

Email korespondensi: sutarmin2415@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai berbagai jenis alat transportasi, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Transportasi yang ada mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan para pengguna jasa transportasi karena di samping murah sampai dengan saat ini transportasi darat masih merupakan primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, perusahaan-perusahaan menawarkan berbagai alternatif penggunaan sarana transportasi darat seperti bus dengan berbagai jurusan dan tujuan yang berbeda-beda. Diperkuat tuntutan dari masyarakat, sebagai pengguna transportasi publik dengan adanya perubahan teknologi komunikasi, berkembangnya pendidikan, dan penghasilan masyarakat menambah kesadaran pelanggan untuk mendapatkan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) yang baik menjadi semakin tinggi.

Bagi pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan harus sesuai dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan kepuasan. Dalam pandangan (Kotler and Keller 2011) mengartikan tingkat kepuasan sebagai fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu dibutuhkan atribut pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) yang mumpuni seperti atribut waktu yang meliputi waktu perjalanan total, keandalan, frekuensi perjalanan, jadwal waktu perjalanan, atribut ongkos pengguna jasa, serta keamanan dan keselamatan yang meliputi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Atribut

lain yang menentukan tingkat kepuasan pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) adalah kesenangan dan kenyamanan pengguna angkutan/jasa yang meliputi jarak perjalanan, kenyamanan fisik (suhu dan kebersihan), serta kenyamanan psikologis (status). Pemenuhan atribut pelayanan yang akan menentukan tingkat kepuasan pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sangat mendesak untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Mengacu dalam (UU No 25 2009 n.d.) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pasal 186 merumuskan “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”. Pengertian wajib mengangkut dalam Pasal 186 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu agar pihak pengangkut tidak melakukan perbedaaan terhadap pengguna jasa angkutan, sepanjang pengguna jasa angkutan telah memenuhi persyaratan sesuai perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur sebagai operator wajib melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan manajemen dan angkutan, dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan adanya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang aman dan nyaman, sejalan dengan (Peraturan – Menteri – Pendayagunaan – Aparatur – Negara & Reformasi - Birokrasi 2017) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORI

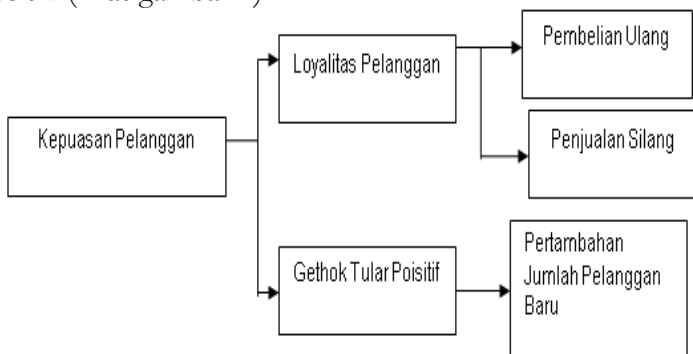
2.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Menurut Kottler yang dikutip kembali oleh (Tjiptono 2012) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapannya. Menurut (Kotler and Keller 2011) kepuasan (*satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal

memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.

2.2 Manfaat Kepuasan Pelanggan

Menurut (Tjiptono and Chandra 2012) secara garis besar, kepuasan pelanggan memberikan dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu berupa loyalitas pelanggan dan penyebaran (*advertising*) dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut dengan istilah gethok tular positif. (lihat gambar 1).



Gambar 1. Manfaat kepuasan pelanggan

Lebih rinci, manfaat-manfaat spesifik kepuasan pelanggan bagi perusahaan mencakup dampak positif pada loyalitas pelanggan; berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama melalui pembelian ulang, *cross-selling*, dan *up-selling*); menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya-biaya komunikasi, penjualan, dan layanan pelanggan); menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan; meningkatnya toleransi harga (terutama kesediaan untuk membayar harga premium dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok); rekomendasi gethok tular positif; pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap *product-line extension*, *brand extension*, dan *new add-on service* yang ditawarkan perusahaan; serta meningkatnya bargaining power relatif perusahaan terhadap jejaring pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. Singkat kata, tidak perlu diragukan lagi bahwa kepuasan pelanggan sangat krusial bagi kelangsungan hidup dan daya saing setiap organisasi, baik bisnis maupun nirlaba.

2.3 Metode Mengukur Kepuasan Pelanggan

Ada empat alat untuk melacak dan mengukur kepuasan konsumen menurut (Kotler and Keller 2011). Alat-alat tersebut sebagai berikut.

- Sistem keluhan dan saran: perusahaan dapat menyediakan formulir yang berisi keluhan dan saran yang dapat diisi di setiap pintu masuk, meja penerima tamu dan lain-lain. Formulir tersebut diisi konsumen dengan keluhan dan saran mereka sehingga perusahaan dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh konsumen terhadap pelayanan perusahaan dan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalahnya dan hal yang disarankan oleh konsumen sebagai pemecahan masalah yang dihadapi konsumen.
- Survei kepuasan konsumen: melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Pengukuran kepuasan melalui metode ini menurut (Kotler and Keller 2011) dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - a. *directly reported satisfaction*,
 - b. *derived dissatisfaction*,
 - c. *problem analysis*, dan
 - d. *importance-performance analysis*.
- Belanja siluman (*ghost shopping*): metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang (*ghost shopper*) untuk berperan dan bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing. Lalu *ghost shopper* tersebut menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk dari perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.
- Analisis kehilangan pelanggan: metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. dan kepuasan pelanggan. Dalam kata lain, jika kualitas pelayanan menurun

dengan cepat, kepuasan pelanggan juga akan menurun secara dramatis dan jika kualitas pelayanan tumbuh radikal, kepuasan pelanggan juga akan meningkat pesat. Beberapa peneliti telah menguji inspirasi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Sebuah model penilaian yang disarankan oleh (Woodside, Frey, and Timothy 1989) penekanan pada hubungan antara persepsi kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan minat beli. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen (variabel intervening) antara kualitas pelayanan dan minat pembelian kembali. Dengan kata lain, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan mempengaruhi minat pembelian kembali. Menurut beberapa penelitian dan kajian lain bahwa ada hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Banyak penelitian empiris yang telah melaporkan hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan menurut (Andaleeb and C 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan adalah komponen dari kepuasan. Suatu perusahaan yang memberikan kualitas layanan yang unggul pasti akan memiliki basis pelanggan yang puas terhadap kinerja perusahaan tersebut.

3. METODE PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat pengguna jasa angkutan bus AKDP Koridor Surabaya–Malang-Blitar tahun 2020 ini adalah:

- a. melaksanakan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder untuk mendukung kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) Koridor Surabaya–Malang-Blitar;
- b. melaksanakan survei kepuasan kepada masyarakat pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya–Malang-Blitar;
- c. melakukan komputasi dan analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya–Malang-Blitar;

- d. menyusun rekomendasi hasil kajian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya–Malang–Blitar;
- e. menyusun dokumen/buku hasil kajian tingkat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya–Malang–Blitar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya–Malang–Blitar melibatkan kurang lebih 105 responden/masyarakat pengguna angkutan bus AKDP sebagai sampel dalam kegiatan ini. Secara umum masyarakat selaku pengguna jasa angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang melayani koridor Surabaya–Malang–Blitar adalah sampel dalam survei ini.

Hasil indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP) jurusan Surabaya–Malang–Blitar, terutama pada tahun 2020 disajikan dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Hasil penilaian indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tertinggi pada pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) koridor Surabaya-Malang-Blitar Tahun 2020

No	Penilaian	Alasan Responden
1	Variabel kompetensi pelaksana pelayanan: pengetahuan pengemudi dan kru dalam mengenali rute	(1) Pengemudi mengetahui jam-jam di daerah atau wilayah tertentu di mana penumpang penuh sehingga kadang bus melakukan perjalanan cepat untuk mengejar jam tersebut di wilayah yang penumpang pas banyak sehingga bus tidak terlalu lama berhenti dan untuk jam-jam kerja atau sekolah busa datang tidak terlambat. (2) Pengemudi menunjukkan profesionalismenya dalam membawa kendaraan/armada bus.
2	Variabel kompetensi pelaksana pelayanan:	(1) Responden merasakan bahwa pengemudi dan kru bus cukup sopan dalam

	ketrampilan kru pendukung sopir dalam memberikan pelayanan dan menjaga keselamatan.	<p>memberikan pelayanan,</p> <p>(2) Kru dalam memberikan pelayanan kepada penumpang sangat ramah, dan selalu membantu ketika penumpang membawa barang,</p> <p>(3) Penumpang merasa tidak tergesa-gesa setiap turun dan selalu dibantu oleh kru dan bus baru berangkat ketika penumpang siap di dalam bus.</p>
3	Variabel, mekanisme, dan prosedur pelayanan	Penumpang merasa bahwa prosedur sudah cukup baik ketika di dalam bus dan ramah ketika dalam melayani
4	Variabel biaya dan tarif pelayanan	Penumpang sudah merasa cukup wajar ketika ditanyakan tarif yang diberikan. Karena masih dianggap masih murah bila dibandingkan tarif angkutan dalam kota, seperti ojeg

(Sumber: Data survei primer 2020, diolah)

Tabel 2. Hasil penilaian indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terendah pada pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) Koridor Surabaya-Malang-Blitar tahun 2020

No	Penilaian	Alasan Responden
1	Variabel Penanganan Pengaduan saran dan masukan: Ketersediaan sarana layanan pengaduan, saran, dan masukan di dalam angkutan/armada bus AKDP Koridor Surabaya-Malang-Blitar	Responden menilai bahwa nomor telepon untuk pengaduan tidak ada, karena kadang-kadang sopir melebihi batas kecepatan atau ugal-ugalan, kadang-kadang kru minta tarif melebihi seperti biasanya, kotak saran juga tidak ada karena penumpang sering tidak diberi karcis
2	Variabel Penanganan Pengaduan saran dan masukan: Ketersediaan tatacara /SOP dalam Penanganan, Saran dan Masukan Pengguna di dalam angkutan / armada Bus AKDP Koridor Surabaya-Malang-Blitar	Responden beralasan bahwa kepada siapa harus mengadu ketika sopir atau kru ugal-ugalan di jalan atau tarif tidak wajar.

3	Ketersediaan sarana pelayanan di dalam armada Bus AKDP Koridor Surabaya-Malang-Blitar	Penumpang merasa panas karena bus tidak nyaman; Kursi yang ada banyak yang sudah rusak; Bus terasa bau dan kotor; Suara bus busing.
4	Kejelasan informasi mengenai Jadwal Operasional Bus AKDP Koridor Surabaya-Malang-Blitar	Penumpang merasa jam perjalanan terlalu lama apabila naik bus dari Surabaya langsung ke Blitar; Bus ngetem terlalu lama di Malang sehingga perjalanan Surabaya-Blitar naik bus ekonomi waktu melebihi jam perjalanan normal, kadang lebih dengan selisih waktu 2-3 jam; Kadang penumpang sering di operkan ke bus yang lain padahal di papan ada tulisan tujuan Blitar (sehingga informasi jurusan antara yang di papan dalam bus tidak sesuai dengan kenyataan.)
5	Transparansi /kejelasan tarif yang berlaku Bus AKDP Koridor Surabaya-Malang-Blitar	Kalau Malang-Surabaya sudah memakai karcis; tapi ketika rata-rata bus yang kearah malang Blitar atau rute-rute pendek tidak diberikan karcis; di dalam bus tidak ada informasi tarif bus, sehingga tarif yang di berikan melebihi tarif batas maksimum yang ditetapkan pemerintah. Misalkan malang-blitar dikenakan tarif 20.000 padahal batas maksimal Rp 15.000

(Sumber: Data survei primer 2020, diolah)

5. KESIMPULAN

Hampir sebagian besar responden yang dilibatkan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna angkutan AKDP koridor Surabaya-Malang-Blitar memberikan penilaian bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh kru bus maupun pengelola sudah baik sebanyak 63 responden (60,00%) dari 105 responden. Sementara yang menyatakan kualitas pelayanannya sudah sangat baik mencapai 1,90% atau sekitar 2 responden. Dalam survei ini juga ditemukan responden yang memberikan penilaian kurang baik atau tidak baik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna angkutan AKDP koridor Surabaya-Malang-Blitar dengan jumlah 40 responden atau sebanyak 38,09% dari 105 responden.

Selama kurun waktu dua tahun terakhir perkembangan hasil penilaian indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pengguna angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada koridor Surabaya-Malang-Blitar nilai SKMnya mengalami penurunan. Tahun 2019 nilai indeks SKMnya mencapai 73,28 (B = Baik). Satu tahun kemudian, pada tahun 2020 nilai SKM naik menjadi 68,71 (B = Baik). Dalam kurun waktu selama setahun penurunan nilai SKM mencapai 4,57 point. Artinya, pengguna AKDP pada koridor Surabaya-Malang-Blitar berarti terjadi beberapa jenis layanan AKDP Surabaya-Malang-Blitar mengalami tingkat kepuasan yang menurun selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

REFERENSI

- Andaleeb, S. ..., and Conway C. 2006. "Customer Satisfaction in The Restaurant Industry: An Examanation of The Transaction-Spesific Model." *The Journal of Services Marketing* Vol. 20, N:Pp. 3-11.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Dan Busnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Keputusan-Menteri-Pendayagunaan-Aparatur-Negara. 2004. *Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*.
- Keputusan-Menteri-Perhubungan. 2003. *Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum*.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13 J. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan-Menteri-Pendayagunaan-Aparatur-Negara&Reformasi-Birokrasi. 2017. *Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Busnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)*. Ke-3. edited by S. Suryandari, Yustiyani. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Strategi Pemasaran*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjiptono, Fandy, and Gregorius Chandra. 2012. *Service, Quality Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.

UU No 25 2009. n.d. *Pelayanan Publik*.

Woodside, Arch G., Lisa L. Frey, and and Robert Timothy. 1989. "Linking Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intention." *Journal of Health Care Marketing* 9 (December:5–17)

Biografi Penulis 1



Sutarmin, lahir di wonogiri, 03 November 1966. Lulus SMA Negeri 2 Surakarta, S1 Universitas Sebelas Maret, dan S2 Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Sebagai dosen tetap di Fakultas ekonomi dan Busnis. Saat ini bersama istri tinggal di perumahan Magersari Permai Blok Z-21, Sidoarjo. Hingga saat ini banyak kegiatan yang digeluti antara lain sebagai tim peneliti penyusunan indeks kepuasan

masyarakat pengguna jasa transportasi AKDP wilayah Surabaya-Malang-Blitar, tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi AKDP wilayah Surabaya-Madiun-Magetan, tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa perpanjangan ijin trayek UPT LLAJ Jember, tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa perpanjangan ijin trayek UPT LLAJ Banyuwangi, dan tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa operasional terminal Minak Koncar Kabupaten.

Biografi Penulis 2



Wiwik Budiarti dilahirkan di Kediri Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Dr. Soetomo Surabaya lulus pada tahun 1989. Pada tahun 2003 baru melanjutkan studi Pasca Sarjana di bidang Ilmu Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya lulus tahun 2005. Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo mulai tahun 1993 sampai sekarang. Untuk menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi selain melakukan pendidikan juga melakukan penelitian dan pengabdian serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dosen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA *REAL ESTAT* DI SIDOARJO

Rika Puspita Sari

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: rika.puspita07@gmail.com

Email korespondensi: rika.puspita07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat menjadi faktor utama yang memengaruhi kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan terhadap tempat tinggal. Permasalahan ini justru menjadi kesempatan besar bagi perusahaan yang melakukan aktivitas pengembangan *real estat* untuk dapat mengembangkan proyeknya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang *real estate* ada yang membutuhkan proses pelaksanaan pembangunan suatu komplek perumahan dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Akibatnya, timbul suatu masalah mengenai pengakuan pendapatan dan biaya yang diakui pada setiap akhir periode akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur suatu cara yang tepat agar pengakuan pendapatan dan biaya dapat mencerminkan hasil yang sewajarnya. Perusahaan pengembang *real estat* berbeda dengan perusahaan lain sehingga ada perlakuan khusus bagi jenis perusahaan pengembang *real estat* khususnya dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang diatur dalam SAK.

2. KAJAN TEORI

2.1 *Real Estat*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 1987 tentang penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan (*real estat*), di mana kebijakan pemberian hak dan penyediaan atas tanah untuk keperluan *real estat* harus dapat menciptakan keadaan yang serasi dan seimbang dalam menunjang kegiatan pembangunan dengan tujuan di satu pihak kebutuhan pengusaha akan tanah dapat dicukupi dan di pihak lain dapat tercapai tata tertib penguasaan dan penggunaan tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tanah yang tersedia

benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Definisi perusahaan *real estat* dalam PMDN No. 3 Tahun 1987 Pasal 1 adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan (sekelompok rumat atau tempat kediaman yang layak dihuni) di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan pemukiman.

2.2 PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembang *Real Estat*

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017) PSAK No. 44 aktivitas pengembang *real estat* merupakan kegiatan dari perolehan tanah yang kemudian dibangun perumahan dan/atau bangunan komersial dan/atau bangunan industri. Bangunan yang dimaksud untuk dijual atau disewakan sebagai satu kesatuan atau biasanya secara eceran (*retail*). Aktivitas pengembang *real estate* juga meliputi perolehan tanah kaveling untuk dijual tanpa bangunan. Perusahaan pengembang merupakan perusahaan yang melaksanakan aktivitas pengembangan *real estat*. Menurut Astarini (2020) Unit bangunan merupakan unit properti dari perumahan dan/atau komersial dan/atau industri beserta kaveling tanahnya. Proyek merupakan semua unit bangunan yang pembangunannya di suatu area geografis, termasuk kaveling tanah kosong untuk dijual. Unit *real estat* mencakup (a) unit properti perumahan dan/atau komersial dan/atau industri beserta kaveling tanahnya dan (b) kaveling tanah tanpa bangunan.

2.3 Pengakuan Pendapatan pada *Real Estat*

SAK-ETAP mengidentifikasi transaksi pengakuan pendapatan sebagai berikut (Mardiana, 2016):

- a. penjualan barang,
- b. penyediaan jasa,
- c. kontrak konstruksi,
- d. bunga, royalti dan deviden.

Berikut metode pengakuan pendapatan yang digunakan dalam SAK-ETAP.

- a. Metode akrual. Pendapatan diakui pada saat terjadinya suatu transaksi yang berdampak bagi laporan keuangan.

- b. Metode presentase penyelesaian. Entitas harus menentukan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi atau kontrak dengan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal sebagian besar pekerjaan yang dilaksanakan

Apabila kedua metode di atas belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan, maka pengakuan pendapatan akan ditangguhkan dan transaksi akan diakui dengan metode deposit (*deposit method*) sampai seluruh kriteria terpenuhi.

Berikut penerapan pengakuan dengan metode deposit.

- a. Penjual tidak mengakui pendapatan, penerimaan dari pembeli dibukukan sebagai uang muka/liabilitias.
- b. Piutang penjualan unit *real estat* tidak boleh diakui.
- c. Unit *real estat* tetap diakui sebagai aset penjual beserta kewajiban terkaitnya.
- d. Penyusutan atas unit *real estat* tersebut tetap diakui oleh penjual.
- e. Jika terjadi pembatalan perjanjian jual beli, maka uang muka yang telah diterima akan diakui sebagai pendapatan.

2.4 Unsur-unsur Biaya Pengembangan Proyek *Real Estat*

Biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas pengembangan *real estat* maupun biaya proyek yang tidak langsung berhubungan dengan beberapa proyek *real estat* dialokasi dan dikapitalisasi ke proyek pengembangan *real estat*. Biaya yang tidak jelas hubungannya dengan suatu proyek *real estat* seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Berikut biaya aktivitas pengembangan *real estat* yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan *real estat* (Siregar, 2019):

- a. biaya praperolehan tanah (*preacquisition costs*),
- b. biaya perolehan tanah,
- c. biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek,
- d. biaya yang distribusikan pada aktivitas pengembangan *real estat*, dan
- e. biaya pinjaman.

Berikut metode perlakuan biaya yang digunakan dalam SAK-ETAP.

- a. Metode akrual. Pendapatan diakui saat terjadinya suatu transaksi yang berdampak bagi laporan keuangan.

- b. Metode presentase penyelesaian. Entitas harus menentukan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi atau kontrak dengan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal sebagian besar pekerjaan yang dilaksanakan.

2.5 Definisi dan Komponen Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2009) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Rini, 2015).

Menurut PSAK (Revisi 2017) menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. laporan posisi keuangan,
- b. laporan laba rugi,
- c. laporan arus kas,
- d. laporan perubahan ekuitas, dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

3. METODE PELAKSANAAN

Berikut metode pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan *real estat* yang ada di Sidoarjo.

- a. Mengamati dan mengumpulkan data tentang aktivitas transaksi di *real estat*
- b. Pendampingan terhadap SDM
- c. Pencatatan dan penyusun laporan keuangan *real estat* sesuai dengan SAK-ETAP

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini perusahaan *real estat* di Sidoarjo belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semua transaksi yang ada hanya dicatat secara manual di *excel*, baik berupa

transaksi pendapatan maupun pengeluaran tanpa mengetahui metode apa yang harus mereka gunakan dalam pencatatan tersebut. Dilihat dari transaksi yang ada, metode yang tepat untuk pencatatan *real estat* di Sidoarjo adalah menggunakan metode deposit. Metode deposit adalah metode akuntansi yang digunakan apabila suatu transaksi *real estat* tidak memenuhi pengakuan laba dengan metode akrual penuh dan pengakuan pendapatan ditangguhkan sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi.

Adapun pencatatan akuntansi atas transaksi penjualan unit *real estat* di Sidoarjo adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Uang Tanda Jadi (UTJ)

Penerimaan UTJ oleh pembeli akan dicatat sebagai berikut.

Tabel 1. Catatan penerimaan UTJ

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Bank	XXX	
Uang Muka Penjualan		XXX
PPN Keluaran		XXX

Penerimaan uang atas penjualan unit *real estat* baik tunai maupun angsuran tidak langsung diakui sebagai pendapatan melainkan diakui sebagai uang muka penjualan karena *real estat* menganut metode deposit.

b. Penerimaan Uang Tunai, Uang Angsuran atau KPR

Penerimaan uang tunai, uang angsuran setiap bulannya dari pembeli, atau KPR dari bank X akan dicatat sebagai berikut:

Tabel 2. Catatan penerimaan uang tunai, uang angsuran atau KPR

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Bank	XXX	
Uang Muka Penjualan		XXX
PPN Keluaran		XXX

c. Pencatatan pada saat proyek selesai serah terima

Pencatatan pada saat proyek serah terima kepada pembeli.

Tabel 3. Catatan saat proyek selesai serah terima

Keterangan	Debit	Kredit
Uang Muka Penjualan	XXX	
Pendapatan		XXX

Seluruh komponen biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas pengembang *real estat* harus dialokasi dan dikapitalisasi ke proyek pengembangan *real estat* tersebut. Sedangkan untuk biaya-biaya selain dari yang ada hubungannya dengan suatu proyek *real estat* harus diakui sebagai beban.

Berikut merupakan komponen laporan keuangan *real estat*.

a. Laporan posisi keuangan

Menurut PSAK No.1, laporan posisi keuangan memiliki tiga bagian yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

Real Estat		
Laporan Posisi Keuangan		
Untuk Tahun yang Berakhir		
31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
Aset Lancar		
Kas & setara kas	XXX	XXX
Piutang usaha	XXX	XXX
Piutang lain-lain	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Pajak dibayar dimuka	XXX	XXX
Biaya dibayar dimuka	XXX	XXX
Uang Muka	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Aset Tidak Lancar		
Piutang usaha	XXX	XXX
Tanah untuk dikembangkan	XXX	XXX
Investasi	XXX	XXX
Aset tetap	XXX	XXX
Aset tidak berwujud	XXX	XXX
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Jumlah Aset	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Liabilitas & Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha	XXX	XXX
Utang pajak	XXX	XXX
Utang lain-lain	XXX	XXX
Beban yang masih harus dibayar	XXX	XXX
Uang muka penjualan	XXX	XXX
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang lain-lain	XXX	XXX
Liabilitas jangka panjang	XXX	XXX
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Ekuitas		
Modal	XXX	XXX
Tambahan modal disetor	XXX	XXX
Saldo laba	XXX	XXX
Jumlah Ekuitas	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

Gambar 1. Laporan posisi keuangan

b. Laporan laba rugi

Menurut PSAK No.1, laporan laba rugi memiliki dua bagian yaitu pendapatan dan beban.

Real Estat		
Laporan Laba Rugi		
Untuk Tahun yang Berakhir		
31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
Pendapatan		
Penjualan	XXX	XXX
Pendapatan Kelebihan Tanah	XXX	XXX
Pendapatan Usaha	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Beban Pokok Penjualan	(XXX)	(XXX)
Laba Kotor	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Beban Usaha		
Biaya Admin Umum	(XXX)	(XXX)
Total Beban Usaha	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Pajak Penghasilan	(XXX)	(XXX)
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

Gambar 2. Laporan laba rugi

- c. Laporan arus kas
PSAK No. 2 menjelaskan bahwa laporan arus kas terdiri atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

Real Estat		
Laporan Arus Kas		
Untuk Tahun yang Berakhir		
31 Desember 20XX dan 20XX		
	20XX	20XX
Arus Kas dari Operasi :		
Penerimaan kas dari pelanggan	XXX	XXX
Pembayaran kas kepada :		
Pemasok	(XXX)	(XXX)
Direksi dan karyawan	(XXX)	(XXX)
Kas dihasilkan dari operasi	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Pembayaran beban keuangan	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pajak penghasilan	(XXX)	(XXX)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Penambahan tanah yang akan dikembangkan	(XXX)	(XXX)
Perolehan aset tetap	(XXX)	(XXX)
Penempatan investasi	XXX	XXX
Penerimaan bunga bank	XXX	XXX
Penempatan aset tak berwujud	(XXX)	(XXX)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penerimaan Obligasi	XXX	XXX
Pembayaran Obligasi	(XXX)	(XXX)
Pembayaran Dividen	(XXX)	(XXX)
Pembayaran Utang Bank	(XXX)	(XXX)
Penambahan Utang Bank Jangka Panjang	XXX	XXX
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan:	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Penurunan Bersih Kas Setara Kas	XXX	XXX
Kas Setara Kas Awal Tahun	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Kas Setara Kas Akhir Tahun	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

Gambar 3. Laporan arus kas

- d. Laporan Ekuitas
Berdasarkan PSAK No 1, tentang penyajian laporan keuangan, dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas berisikan beberapa informasi atau unsur-unsur yaitu total laba rugi, dampak pada

setiap pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik perusahaan dan ividen yang diakui serta jumlah dividen per lembar saham.

Real Estat
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 20XX dan 20XX

	Tambahkan		Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
	Modal Saham	Modal Disetor		Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo 1 Januari 20XX								
Laba neto tahun berjalan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dividen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saldo per 31 Desember 20XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saldo 1 Januari 20XX								
Laba neto tahun berjalan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dividen	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Saldo per 31 Desember 20XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Gambar 4. Laporan ekuitas

Menurut PSAK No. 1, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) harus tersusun atas (1) gambaran umum mengenai profil perusahaan, (2) pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, dan (3) penjelasan rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan secara sistematis.

5. KESIMPULAN

Tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi *real estat* adalah sebagai panduan tidak mengikat bagi *real estat* dalam penyusunan laporan keuangan. Acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan *real estat* ini adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

REFERENSI

- Astarini, O. (2020). Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Perusahaan Real Estate pada PT. Maura Lombok Sesuai dengan PSAK No. 44. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 55–65.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *PSAK No.2 Tentang Laporan Arus Kas—edisi revisi 2013*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.44 -Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate*. IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2017*. IAI Global.
- Mardiana. (2016). *Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Pada CV Puriyasa Contraco Sekayu* Mardiana Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu.
- Menteri Dalam Negeri. (1987). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan*.
- Rini, F. L. E. (2015). Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap (Studi pada UMKM Ekspedisi CV. Mandiri) Periode Tahun 2014 Farah Lydia Eka Rini. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KLAFFE)*, 4(4).
- Siregar, Y. (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 44 Terhadap Pengembangan Real Estat PT. Buana Cipta Propertindo. *Equilibiria*, 6(1).

Biografi Penulis



Rika Puspita Sari., SE., MA., CPA lahir di Surabaya, 08 Mei 1989. Berprofesi sebagai staf pengajar Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Penulis aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktisi dalam berbagai kegiatan profesi maupun ilmiah, baik sebagai pengajar, pembimbingan mahasiswa, peneliti, narasumber pada berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan juga sebagai auditor di KAP MNK. Selain itu, penulis juga anggota aktif Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Halaman ini sengaja dikosongkan

PELATIHAN PENGOLAHAN JAMUR TIRAM UNTUK MENJAMURKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PADA GENERASI MILENIAL

Jajuk Suprijati¹, Lumadya Adi², Shanty Ratna Damayanti³

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: :jajuksuprijati@gmail.com

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: adiosulin@gmail.com

³Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: Shanty262@ymail.com

Email korespondensi: :jajuksuprijati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kurikulum Nasional untuk SMA dan sederajat mewajibkan para siswa agar dapat mandiri dan berwirausaha. Oleh karena itu, perlu adanya mata pelajaran tentang kewirausahaan. Permendikbud No. 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 lebih menekankan pada kemandirian dan keterampilan (Kemendikbud, 2018). Pada mata pelajaran kewirausahaan, siswa diwajibkan untuk membuat produk yang dapat dijual dan mempunyai nilai jual. Tujuan dari mata pelajaran kewirausahaan adalah mempersiapkan siswa untuk mempunyai jiwa *entrepreneur* setelah lulus dari bangku sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dukungan dari semua pihak termasuk guru dan masyarakat sekitar. Masyarakat dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai keterampilan yang dapat ditularkan kepada para siswa atau bisa juga seorang tenaga fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh mitra (siswa) di perumahan Pondok Permata Suci Gresik adalah kebingungan produk apa yang akan diproduksi untuk kemudian dijual. Perlu pengenalan produk yang bisa diolah dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Dalam hal ini adalah jamur tiram. Permasalahan yang lain yaitu kurangnya pengetahuan siswa tentang cara mengelola hasil panen jamur tiram menjadi makanan yang mempunyai nilai jual tinggi (selain dimasak menjadi sayur).

Sesuai permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka solusi yang disepakati untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah

dengan memberikan pengenalan terkait jamur tiram dan memberikan program pelatihan keterampilan pembuatan pengolahan jamur tiram menjadi produk makanan yang mempunyai nilai jual. Pelatihan ini meliputi cara membuat bakso, *nugget*, dan abon dari jamur tiram. Proses pembuatan bakso dan *nugget* hampir sama yaitu dengan cara diblender dan diberi bumbu dapur selanjutnya dibuat *nugget* dan bakso. Sedangkan untuk abon, cara membuatnya berbeda dengan *nugget* dan bakso yaitu dengan cara jamur disuwir-suwir kemudian dibumbui dengan bumbu dapur dan santan lalu ditumis.

Beberapa alasan pemilihan jamur tiram antara lain (1) di daerah Gresik produk jamur tiram sangat melimpah dikarenakan keberhasilan dalam memberdayakan petani jamur, (2) sifat dari jamur tiram yang mudah rusak jika tidak segera dikonsumsi sehingga perlu diolah menjadi produk yang lebih awet, (3) berdasarkan penelitian (Mutiar Nugraheni, 2015), jamur tiram mengandung protein, air, kalori, karbohidrat, dan sisanya berupa serat zat besi, kalsium, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori, (4) jamur tiram juga memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai makanan, menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan antitumor, serta dapat menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu, jamur tiram juga berguna dalam membunuh nematoda. Manfaat lain dari jamur tiram antara lain dapat mengurangi kolesterol dan jantung lemah serta beberapa penyakit lainnya. Jamur tiram juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit seperti penyakit lever, diabetes, dan anemia. Selain itu, jamur tiram juga dapat bermanfaat sebagai antiviral dan antikanker serta menurunkan kadar kolesterol. Di samping itu, jamur tiram juga dipercaya mampu membantu penurunan berat badan karena berserat tinggi dan membantu pencernaan. Jamur tiram mengandung senyawa pleuran yang berkhasiat sebagai antitumor, menurunkan kolesterol, serta bertindak sebagai antioksidan. Adanya polisakarida, khususnya Beta-D-glucans pada jamur tiram mempunyai efek positif sebagai antitumor, antikanker, antivirus (termasuk AIDS), melawan kolesterol, antijamur, antibakteri, dan dapat meningkatkan sistem imun. Pada jamur tiram, produk ini disebut sebagai plovastin yang di pasaran

dikenal sebagai suplemen penurun kolesterol (komponen aktifnya statin yang baik untuk menghambat metabolisme kolesterol di dalam tubuh manusia)(Widyastuti, 2019), dan (5) ada prospek untuk mengembangkan produk olahan jamur tiram di Gresik.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Kewirausahaan

Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat ditandai dengan tingginya jumlah wirausahawan. Artinya, semakin banyak jumlah wirausahawan, maka semakin maju suatu negara karena pembangunan didukung oleh wirausahawan yang handal dan selalu berinovasi.

Kewirausahaan menjadi potensi pembangunan yang cukup besar karena di sini dituntut untuk selalu mengkaji tentang pengembangan, semangat berkeaktifitas, tidak berputus asa. dan berani menanggung resiko. Seorang wirausahawan akan menghargai suatu proses sehingga memiliki kesabaran dan ketekunan. Apabila seorang wirausahawan mengalami kegagalan, maka akan bangkit lagi dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk meraih sukses.

Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarbrough (Thomas W Zimmere, 2005), “Wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya”. Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari resiko, mereka mencari peluang (Alma, 2008).

2.2 Fungsi dan Peran Wirausaha

Fungsi dan peran wirausaha dapat dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan secara mikro dan makro. Pada pendekatan mikro, wirausaha memiliki dua peran yaitu sebagai penemu (*innovator*) dan perencana (*planner*). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara, ide, dan organisasi. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran

wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara (Suryana, 2008).

2.3 Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan

a. Tujuan kewirausahaan

1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas.
2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat.

b. Manfaat Berkewirausahaan

Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausahawan sebaiknya mempertimbangkan manfaat kepemilikan bisnis mikro, kecil, dan atau menengah (Basrowi, 2011).

Berikut manfaat adanya para wirausaha.

1. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya.
2. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
3. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama.
4. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani.
5. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan.
6. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menjalani pekerjaan.
7. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros.

2.4 Sasaran dan Asas Kewirausahaan

a. Sasaran kewirausahaan

1. Para generasi muda pada umumnya, anak-anak sekolah, anak-anak putus sekolah, dan para calon wirausaha.
2. Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi.
3. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha (BUMN), organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat.

(Basrowi, 2011)

b. Asas Kewirausahaan

1. Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.
2. Kemauan usaha secara tekun, teliti, dan produktif.
3. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil resiko bisnis.
4. Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian.
5. Kemampuan berfikir serta bertindak kreatif dan inovatif.

(Basrowi, 2011)

Para wirausahawan sukses di beberapa negara pada umumnya memiliki karakteristik yang relatif sama. William D. Bygrave, seperti yang dikutip oleh Suparyanto (2013) mengemukakan sepuluh Karakteristik kewirausahaan yang terangkum dalam *The Ten-D Character of Entrepreneurship* sebagai berikut:

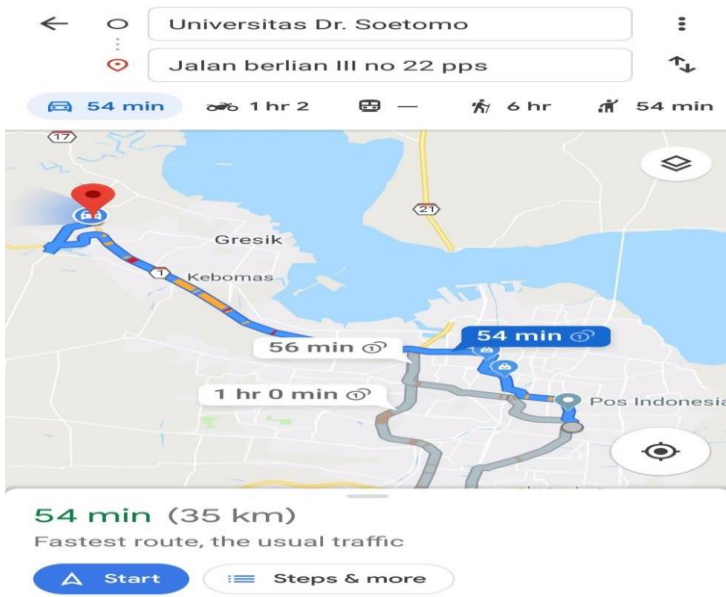
- a. *Dreams* (mimpi), visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut.
- b. *Decisiveness* (ketegasan), tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan dan kecepatan dianggap sebagai kunci kesuksesan.
- c. *Doers* (pelaku), menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat.
- d. *Determination* (ketetapan hati), mengimplementasikan usaha dengan komitmen total dan tidak menyerah saat mengalami kesulitan.
- e. *Dedication* (berdedikasi), memiliki dedikasi total terhadap usahanya.
- f. *Devotion* (kesetiaan), mencintai usaha mereka sehingga efektif

- dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya.
- g. *Details* (terperinci), bersifat kritis dan melakukan perincian dalam berbagai hal yang menyangkut usahanya.
 - h. *Destiny* (nasib), bertanggung jawab atas dirinya dan tidak tergantung kepada orang lain.
 - i. *Dollars* (uang), menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Jika sukses, maka akan mendapatkan uang yang banyak.
 - j. *Distribute* (distribusi), mendistribusikan atau mendelegasikan sebagian dari tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepada orang lain. (Suparyanto, 2013)

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat

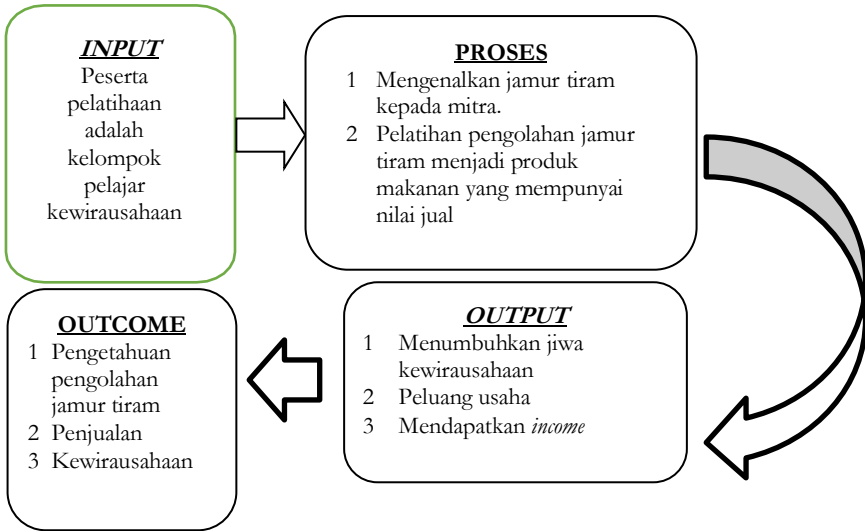
Lokasi pengabdian berada di perumahan Pondok Permata Suci Gresik.



Gambar 1. Jarak lokasi pengabdian ke Universitas Dr. Soetomo Surabaya

3.2 Metode Pelaksanaan

Iptek yang akan ditransfer kepada mitra adalah pengetahuan tentang pentingnya melakukan teknologi pengelolaan pangan jamur tiram dan pemasarannya sehingga mendapatkan penghasilan. Namun, yang paling utama adalah terciptanya jiwa kewirausahaan pada siswa.



Gambar 2. Alur gambaran iptek yang akan ditransfer kepada mitra

Tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan atas solusi yang ditawarkan dan sepakati disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Kegiatan dan indikator hasil.

No.	Kegiatan	Indikator Hasil
1	Koordinasi antara anggota tim pelaksana dengan ketua kelompok pelajar kewirausahaan.	Menghasilkan kesepakatan waktu pelaksanaan pelatihan antara tim pelaksana PPM dengan kelompok pelajar kewirausahaan.
2	Perencanaan teknis pelatihan yang akan dilaksanakan sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.	Susunan acara dan tanggal kegiatan serta jenis-jenis pengolahan jamur tiram yang akan di praktikkan.
3	Mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelatihan.	Tersedia tempat pelatihan, bahan, dan materi pengolahan jamur tiram.

4	Pelaksanaan pemberian materi pelatihan dalam ceramah tentang pembuatan pengolahan jamur tiram.	Materi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .
5	Pelatihan dan praktik pembuatan pengolahan jamur tiram.	Mitra mampu mempraktikkan materi yang sudah diberikan dan mampu menghasilkan beraneka ragam jenis olahan jamur tiram.
6	Monitoring dan evaluasi	Mengevaluasi dan memperbaiki hasil kerja dari mitra yang sudah dipraktikkan.
7	Pembuatan laporan	Laporan

Metode yang digunakan dalam usaha meningkatkan ketrampilan mitra sebagai berikut.

1. Menggunakan metode ceramah dan diskusi/tanya jawab, digunakan saat menyampaikan materi kegiatan yaitu materi tentang pengetahuan mitra tentang jamur tiram, baik tentang kandungan gizinya, manfaat maupun pengolahannya.
2. Metode demonstrasi serta latihan praktek, digunakan pada waktu pengolahan jamur tiram menjadi bakso, *nugget* dan abon.

Dalam kegiatan ini diharapkan partisipasi remaja/siswa kelompok pelajar kewirausahaan agar bisa turut berperan aktif dalam setiap pelatihan yang diprogramkan dan sanggup mengimplementasikan hasil pelatihan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang mandiri, ulet, dan suka bekerja keras dengan menjadi *entrepreneur* atau berwira usaha membuka lapangan kerja sendiri. Pemerintah dalam hal ini melalui menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri ristik dan pendidikan tinggi memasukkan pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan pelatihan pada kelompok remaja dilakukan untuk meningkatkan kewirausahaan melalui pengolahan jamur tiram sebagai bahan bakunya. Dalam pengabdian ini, pada tahap laporan kemajuan telah dilakukan pertemuan dengan mitra dan telah melakukan beberapa tahap kegiatan yaitu menjelaskan dan berdiskusi tentang jamur tiram dan telah mempraktikkan cara pembuatan bakso dan *nugget*. Berikut

bukti kegiatan pengabdian pada masyarakat di perumahan Pondok Permata Suci Gresik.



Gambar 3. Memberikan ceramah dan memperkenalkan jamur tiram

Berikut bahan-bahan dan bumbu untuk membuat bakso, *nugget*, dan abon.

 Tepung terigu	 Tepung beras	 Tepung tapioka	 Tepung roti/ tepung panir	
 Merica dan ketumbar	 Gula dan garam	 Kaldu jamur	 Bawang putih	 Santan

Gambar 4. Bahan-bahan dan bumbu dalam pengolahan jamur tiram

Berikut peralatan yang digunakan untuk membuat bakso, *nugget*, dan abon.

				
Blender/ <i>food processor</i>	Panci	Penggorengan	Kukusan	

Gambar 5. Peralatan yang diperlukan dalam mengolah jamur tiram

Adapun resep dan langkah-langkah dalam pembuatan *nugget*, bakso, dan abon sebagai berikut.

a. Resep *nugget* jamur tiram

Bahan *nugget*:

- 500 gr jamur tiram
- 7-8 siung bawang putih
- 2 siung bawang merah
- Garam dan gula secukupnya
- 5 senduk makan tepung beras
- 2 -3 tepung terigu
- 1 butir telur ayam Bahan Pencelup
- 1 butir telur dan air
- Tepung terigu
- Tepung panir

Langkah-langkah:

1. Bersihkan jamur lalu rendam dengan air hangat (menghilangkan bau langu) selama 5-10 menit, peras jamur hingga tiris kemudian cincang halus (boleh diblender atau menggunakan *food processor*),
2. Haluskan bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan gula kemudian campur dengan jamur yang sudah dicincang lalu masukkan tepung terigu dan telur aduk hingga rata,
3. Ambil loyang kemudian alasi dengan daun pisang lalu masukkan adonan dan kukus hingga matang, biarkan adonan hingga dingin lalu keluarkan dari cetakan, potong adonan sesuai dengan keinginan,
4. kocok telur dan air lalu ambil potongan *nugget* dan gulingkan ke tepung kemudian celupkan ke telur dan masukkan ke tepung panir,
5. simpan di kulkas dan goreng saat diperlukan.



Gambar 6. Proses pembuatan *nugget*



Gambar 7. *Nugget* jamur tiram

b. Resep bakso jamur tiram

Bahan bakso:

500 gram jamur tiram, 100 gram tepung tapioka, 1 butir putih telur, 1/2 sdt garam, 1/2 sdt kaldu jamur tole/ kaldu bubuk biasa, dan 1/4 sdt lada bubuk

Bahan kuah:

2 siung bawang putih ,4 siung bawang merah, 1 batang daun bawang, 250 ml air, secukupnya garam, secukupnya kaldu jamur tole/kaldu bubuk biasa, secukupnya gula pasir, secukupnya minyak goreng untuk menumis

Taburan:

bawang merah goreng dan daun bawang yang sudah dicincang

Langkah-langkah membuat bakso jamur tiram.

1. Cuci bersih jamur kemudian rebus ke dalam air mendidih hingga layu. Tiriskan dan dinginkan kemudian peras airnya. Cincang kecil jamur kemudian haluskan di blender/*food processor*.
2. Masukkan jamur cincang yang telah halus ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan putih telur, tepung tapioka, dan beri bumbu. Aduk hingga tercampur rata. Bila adonan bakso belum bisa dipulung, maka tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Kemudian bentuk bulat menyerupai bakso dan sisihkan.
3. Didihkan air dan rebus bakso hingga matang (mengapung di air) lalu tiriskan.
4. Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan daun bawang.lalu tumis dengan sedikit minyak. Tuangkan tumisan ke dalam panci yang telah berisi air 250 ml. Kemudian didihkan dan bumbui dengan garam, gula, dan kaldu jamur. Koreksi rasa dan sisihkan. Jika ingin kuahnya bening, saring tumisan tadi setelah kuah agak hangat. Bakso Siap dihidangkan



Gambar 8. Proses pembuatan bakso jamur tiram



Gambar 9. Bakso jamur tiram

c. Resep abon jamur tiram

Bahan:

- 3 kg jamur tiram
- 4 helai daun salam
- 1 buah santan kara segitiga
- 2 cm lengkuas

Bahan yang harus dihaluskan:

2 sdt ketumbar, 4 sdt gula, secukupnya garam, 15 siung bawang merah, dan 10 siung Bawang putih

Langkah-langkah:

1. Cuci jamur kemudian rebus 10-15 menit, suwir-suwir jika sudah dingin
2. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan lalu masukkan daun salam dengan minyak 2 senduk sampai wangi, masukkan jamur aduk hingga merata. Tuangkan santan dan masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk sampai santan menyusut, goreng adonan dengan minyak hingga matang,
3. blender jamur yang sudah digoreng lalu peras hingga minyak berkurang.



Gambar 10. Proses pembuatan abon jamur tiram

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mitra sangat antusias dan mudah memahami setiap langkah-langkah dalam pembuatan *nugget*, bakso, dan abon dari jamur tiram. Untuk pembuatan abon jamur tiram mitra masih kesulitan karena membutuhkan ketelatenan dan waktu agak lama dalam proses pembuatannya karena harus disuwir-suwir satu persatu. Oleh karena itu, abon dari jamur tiram akan lebih sesuai bila diberikan pelatihannya kepada ibu-ibu.

Program pelatihan ini juga bermitra dengan petani jamur tiram untuk menunjang keberhasilan dalam pelatihan. Mitra petani adalah wali murid dari SD Muhammadiyah di Perumahan Pondok Permata Suci (*Berlian School*) yang membudidayakan jamur tiram di lingkungan SD Muhammadiyah yang diberi nama Kumbang Jamur *Berlian School*. Kumbang Jamur ini berdiri bulan November 2018 dan pada bulan Januari sudah mulai dapat memanen. Hasil panen ini dijual secara umum. Jamur tiram yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik karena menghasilkan jamur yang lebar dan besar. Harga yang ditawarkan dari mitra petani ini juga sangat bersaing dengan harga jamur tiram yang dijual di pasar. Adapun kegiatan dari mitra Ikwon *Berlian School* dengan Kumbang Jamurnya ditunjukkan pada gambar berikut.

Dari hasil analisis dan evaluasi, produk ini mempunyai prospek untuk menjadi produk unggulan untuk kewirausahaan. Jamur tiram adalah tanaman yang sangat mudah dibudidayakan dan mempunyai kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Alasan lainnya adalah harganya yang relatif murah sehingga sangat terjangkau dan dapat dijadikan pengganti daging yang harganya relatif lebih mahal.



Gambar 11. Menyiapkan rak tempat bibit jamur tiram



Gambar 12. Menata bibit jamur di rak



Gambar 13. Bibit jamur tiram



Gambar 14. Panen jamur tiram

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan program pelatihan pada masyarakat pada kelompok siswa atau remaja di perumahan pondok permata suci Gresik, maka pelatihan ini dapat diambil kesimpulan :

1. Peserta sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti dan mengembangkan pelatihan membuat olahan dari jamur tiram. Terutama untuk pembuatan naget dan bakso,. Untuk pembuatan abon jamur tiram mitra masih kesulitan karena membutuhkan ketelatenan dan waktu agak lama dalam proses pembuatannya karena harus disuwir-suwir satu persatu.
2. Peserta atau mitra setelah mengikuti kegiatan pelatihan bisa memahami pentingnya kegiatan pelatihan mengolah jamur tiram sehingga ada ide lain untuk mengolah jamur tiram untuk dijadikan produk lain.
3. Setelah dilakukan *monitoring* dari hasil pelatihan adalah ada kemauan untuk membuat produk berbahan jamur tiram untuk dijual kembali.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu perlu dilakukan kegiatan pengabdian lanjutan tentang variasi produk, kemasan, dan pemasaran. Selain itu, adanya peningkatan anggaran pengabdian sehingga peserta pelatihan akan semakin bertambah.

REFERENSI

- Kemendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. *Permendikbud*, 1–12.
- Mutiara Nugraheni, T. H. W. A. U. (2015). Teknologi Pengolahan Produk Berbasis Jamur Di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Merapi. *Inotek*, 18(2), 177–192.
- Widyastuti, N. (2019). Pengolahan Jamur Tiram (*Pleurotus* *Ostreatus*) Sebagai Alternatif Pemenuhan Nutrisi. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 15(3). <https://doi.org/10.29122/jsti.v15i3.3391>
- Thomas W. zimmerer dan Norman. Scarbrough. (2005). *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil* (terjemahan). Erlangga: Jakarta.
- Alma, Buchari. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Alfabeta: Bandung.
- Suryana. (2008). *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basrowi. (2011). *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R.W Suparyanto. (2013). *Kewirausahaan: Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*. Alfabeta: Bandung.

Biografi Penulis 1



Jajuk Suprijati, SE., MM, lahir di Jombang. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Airlangga tahun 1990 dan S2 di Magister Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya tahun 2009. Bergabung dengan universitas Dr. Soetomo tahun 1998. Matakuliah yang diampu Matematika Ekonomi Lanjutan, Analisa optimasi, dan Ekonomi Moneter.

Biografi Penulis 2



Drs. Lumadya Adi M.Si, lahir di Trenggalek. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya tahun 1985 dan S2 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan UGM. Bergabung dengan universitas Dr. Soetomo tahun 1993. Matakuliah yang diampu Statistik, Ekonomitri, dan Ekonomi Regional.

Biografi Penulis 3



Shanty Ratna Damayanti.SE.,M.Si lahir di Jember. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Jember 1989 dan S2 di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga tahun 1999. Bergabung dengan Universitas Dr. Soetomo tahun 1994. Matakuliah yang diampu Ekonomi Makro, Agribisnis, Bank dan Lembaga Keuangan lain

Bagian
Kedua

ASPEK ADMINISTRASI

ASPEK ADMINISTRASI



PERSEMBAHAN **UNITOMO** UNTUK NEGERI

PELATIHAN TATA KELOLA KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR SURABAYA

Fedyanty Augustinah¹, Sri Astutik², Zulaikha³

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: fedyanti.augustinah@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: sri.astutik@unitomo.ac.id

³Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: zulaikha@unitomo.ac.id

Email korespondensi: sri.astutik@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Wilayah perkotaan, dengan heterogenitas masyarakatnya menjadikan ciri khas budaya menjadi kabur karena sudah tercampur dengan budaya-budaya lain yang dibawa pendatang. Urbanisasi menjadikan kota sebagai tujuan sebagian masyarakat mencari pekerjaan, dan menjadikan pembangunan wilayah perkotaan seringkali melencong dari rencana aslinya, karena banyaknya pemukiman penduduk yang mendadak bertumbuh dengan cepat. Hampir semua destinasi wisata yang ada di perkotaan tak lagi mengandalkan kondisi geografis maupun budaya, tetapi harus mengandalkan buatan manusia (*artifisial*) seperti museum, kebun binatang, taman-taman kota, gedung pertunjukan, mall, dan lain-lain.

Surabaya ialah satu di antara beberapa kota besar di Indonesia yang konsep pembangunan kota Surabaya merujuk pada konsep *Smart City*. Konsep *Smart City* ialah konsep pembangunan kota yang menekankan penggunaan teknologi komputasi cerdas guna melakukan integrasi atas bermacam-macam komponen penting dari infrastruktur serta pelayananan kota. *Smart City* mempunyai 6 komponen sebagai bahan identifikasi yakni, *smart government*, *smart economy*, *smart environment*, *smart living*, *smart people*, serta *smart mobility*. *Smart City* ialah satu di antara beberapa strategi pembangunan serta manajemen kota yang masih baru. Konsep berikut hadir serta mengalami perkembangan selaras bersama berkembangnya teknologi serta zaman. *Smart City* dimaknai selaku kota yang sanggup memanfaatkan sumber daya manusia, modal sosial, serta infrastruktur telekomunikasi modern guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelanjutan serta kualitas hidup yang tinggi, melalui manajemen sumber daya yang

bijaksana oleh pemerintahan dengan basis partisipasi masyarakat (Caragliu et., al., dalam Schaffers, 2010). Schaffers (2010) juga menyebutkan bahwa *Smart City* terjadi apabila pemerintahnya berinvestasi untuk SDM, modal sosial, infrastruktur sistem komunikasi tradisional serta modern, karena hal itu dapat memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelanjutan serta hidup yang memiliki kualitas yang baik melalui cara mengelola Sumber Daya Alam yang baik pula. *Smart City* itu sendiri menurut Cohen (2012) dapat dibagi dalam 6 dimensi, yakni: (1) *Smart economy*; (2) *Smart mobility*; (3) *Smart environment*; (4) *Smart people*; (5) *Smart living*; serta (6) *Smart governance*.

Dalam implementasinya, Surabaya menggandeng media-media seperti Jawa Pos (media cetak terbesar di Jawa Timur) sebagai media partner. Dengan menggunakan media massa, kampanye pembangunan kota cepat ditangkap oleh masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Surabaya tidak hanya pada sebuah bidang, akan tetapi pada banyak bidang. Salah satu dimensi yang ditekankan Surabaya dalam membangun *Smart City* adalah program *Smart Environment* (lingkungan cerdas).

Kelurahan Medokan Semampir, salah satu kelurahan di bagian timur kota Surabaya, merupakan pemukiman penduduk yang heterogen, banyak pendatang dan tidak punya modal geografis yang spesial. Kondisinya mirip dengan kelurahan-kelurahan lain di kota Surabaya. Istimewanya, pengurus kampung berhasil meyakinkan penduduk untuk memanfaatkan lahan hijau fasilitas umum di lingkungan masing-masing, untuk ditanami secara seragam sesuai dengan perencanaan pengurus. Tidak semua rencana berjalan mulus, tetapi secara garis besar mereka berhasil melaksanakan penghijauan dengan tanaman-tanaman tertentu. Karena sudah direncanakan itu pulalah, maka Kelurahan Medokan Semampir berhasil menjuarai lomba lingkungan se wilayah kota Surabaya. Beberapa penghargaan telah berhasil dimenangkan, dan itu menjadi modal awal bagi pengurus kampung beserta penduduk untuk mengembangkan apa yang telah dimulai itu, menjadi destinasi wisata.

Ternyata membangun destinasi wisata dan mendatangkan wisatawan ke kampung mereka tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas serta bekerja sama antar

masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait, terutama dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dari Perguruan Tinggi. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama untuk materi-materi bahasan seperti pemahaman lanscape dan tata ruang, pemasaran, branding, serta tata kelola kelembagaan terutama manajemen Sumber Daya Manusia.

Pelatihan kali ini dilakukan dalam rangka mendorong pemanfaatan media digital untuk memasarkan dan mengkomunikasikan brand destinasi wisata yang sedang dibangun. Pelatihan juga dilakukan untuk mengenalkan tata kelola kelembagaan usaha, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Pariwisata

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwasanya tujuan pembangunan kepariwisataan adalah (1) memberikan peningkatan akan pertumbuhan ekonomi, (2) memberikan peningkatan akan kesejahteraan rakyat, (3) melakukan penghapusan akan kemiskinan, (4) menjadi solusi akan pengangguran, (5) melakukan pelestarian alam, lingkungan, serta sumber daya, (6) menjadikan maju sebuah kebudayaan, (7) memberikan citra bangsa yang lebih baik, (8) meneguhkan rasa cinta tanah air, (9) memperkokoh jati diri serta persatuan bangsa, dan (10) memberikan hubungan persahabatan antar bangsa.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan industri pariwisata menjadi *leading sector* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata merupakan sekumpulan bidang usaha yang memberikan output bermacam-macam barang serta jasa yang diperlukan oleh mereka yang melaksanakan perjalanan wisata. Perkembangan industri pariwisata pada akhirnya melahirkan banyak dibukanya destinasi-destinasi baru. Destinasi wisata merupakan satu kesatuan wilayah geografis, yang di dalamnya ada bermacam-macam daya tarik wisata, fasilitas wisata dan juga kemudahan guna memperoleh akses menuju wilayah itu sendiri hingga bisa dicapai oleh turis. (Merta, 2019). Destinasi wisata ialah satu di antara beberapa elemen yang terpenting dalam industri pariwisata dikarenakan destinasi wisata merupakan alasan masyarakat melaksanakan per-

jalan wisata dan produk wisata terdapat padanya kemudian menjadi daya tarik kunjungan wisatawan (Cooper, et. al., 2008).

Destinasi wisata yang menarik tidak akan bertahan lama dan berkembang menjadi elemen industri pariwisata jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan, maka kawasan wisata yang ada harus dikelola dengan baik. Ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar sebuah destinasi bisa dimaksimalkan menjadi bagian dari industri pariwisata, yakni (1) Penguatan Stakeholder, (2) Penguatan Kelembagaan/Pengelolaan, (3) Penguatan Komunikasi dan Pemasaran, (4) Penguatan Dampak (Ekologis, Sosial-Budaya, Ekonomis), (5) Penguatan Bisnis, (6) Penguatan SDM, (7) Penguatan jejaring dan konektivitas, dan (8) Penguatan Pelayanan.

Kelembagaan yang kuat akan sangat membantu dalam mewujudkan pengelolaan industri kepariwisataan. Maka dari itu, diperlukan sebuah Badan Usaha yang baik yang siap mengelola.

Badan usaha merupakan kesatuan dari sekelompok individu ataupun modal yang mempunyai kegiatan yang berfokus di bidang perdagangan ataupun bidang usaha yang lain yang memiliki tujuan memperoleh untung/laba. Karakteristik badan usaha yang dapat menjadi subyek badan hukum ialah (1) Memiliki kekayaan yang melaksanakan kegiatan pada badan hukum, (2) Memiliki hak serta kewajiban yang terpisah dari individu yang melaksanakan badan hukum, (3) Terdaftar menjadi badan hukum, (4) Cakap ketika melaksanakan perbuatan hukum, dan (5) Memiliki akte notaris saat mendirikannya.

Untuk para pelaku usaha yang hendak menciptakan suatu usaha, termasuk juga usaha pariwisata, penting untuk membandingkan dua jenis badan usaha yaitu:

a. Badan usaha berbadan hukum

Badan usaha yang memiliki badan hukum ialah badan usaha yang memberikan pemisahan pada harta kekayaan usaha dengan harta kekayaan pribadi. Jika badan usaha melakukan pemisahan pada harta kekayaan usaha dengan harta kekayaan pribadi apabila suatu saat terdapat sebuah konflik hukum, badan usaha hanyalah dapat dilakukan penuntutannya ataupun dimintakan ganti rugi

hanya sampai sebatas harta kekayaan badan usaha tersebut serta tak mencakup harta pribadi/pendirinya.

Dengan memiliki Badan Usaha yang berbadan Hukum, kelebihanannya adalah: Badan usaha yang berbadan hukum mendapatkan kekayaan pribadi, misalnya modal serta asset Perseroan Terbatas (PT) memiliki sifat eksekutif dikarenakan dilakukan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang menjadikan nama PT juga diberikan perlindungan serta hanya terdapat satu nama seIndonesia. Badan usaha berbadan hukum dapat lebih mandiri melalui kemungkinan otomatisasi pada perihal pembiayaan, kekayaan intelektual, dan juga pelaksanaan waralaba/*franchise*.

Kelemahan badan usaha yang berbadan hukum, jika pengusaha mempunyai modal yang tidak banyak, karena tak mudah membentuk badan usaha, utamanya yang berbadan hukum, karena pada beberapa undang-undang mengatur dengan limitatif jumlah modal (dana) yang hendaknya dipersiapkan guna membentuk badan usaha. Berdasarkan hal tersebut, dibentuknya badan usaha yang berbadan hukum umumnya bagi pengusaha pada skala menengah ataupun atas. Beberapa badan usaha yang berbadan hukum, ialah: (1) Perseroan Terbatas (PT), (2) Yayasan, (3) Koperasi, (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan (5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Badan usaha tidak berbadan hukum

Badan usaha yang tak berbadan hukum ialah badan usaha yang tak mempunyai badan hukum dan tidak membedakan secara tegas pada harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Tidak adanya pembedakan harta kekayaan, maka ketika terdapat konflik, badan usaha dapat dituntut atau diminta mengganti rugi tidak terbatas harta kekayaan badan usaha tersebut, namun juga mencakup harta pribadi pendiri/pemilikinya.

Keuntungan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah tak ada peraturan mengenai jumlah modal yang wajib dipenuhi ketika akan menciptakan sebuah aktivitas usaha. Kemudian, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih sedikit dibandingkan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum pada

umumnya diciptakan guna oleh pengusaha-pengusaha yang melaksanakan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni: (1) CV (Persekutuan Komanditer). (2) Firma, dan (3) Persekutuan Perdata.

Selain bentuk badan usaha tersebut, juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwasanya BUMDes, ialah badan usaha yang secara keseluruhan ataupun sebagian besar modalnya menjadi milik Desa dengan penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang dilakukan pemisahannya untuk melakukan pengelolaan asset, jasa pelayanan, serta usaha yang lain guna secara maksimal menyejahterakan masyarakatnya.

BUMDes merupakan usaha desa yang dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah Desa, serta harus berbadan hukum. Pembentukan BUMDes disesuaikan pada potensi serta kebutuhan Desa. Pembentukan BUMDes dilakukan penetapannya melalui Peraturan Desa. Ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta sesuai pula dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pelaksana lainnya. Pasal 231 ayat (1) UU 32 tahun 2004 mengatur bahwasanya Desa dapat menciptakan BUMDes yang sesuai dengan keunggulan atau potensi desanya.

Senada dengan pemerintah desa, maka pemerintah Kelurahan yang terdapat pada wilayah perkotaan juga berupa lembaga yang identik dengan Desa. Karena itu Undang Undang Desa dapat dijadikan inspirasi bagi pemerintah kelurahan di kota untuk membentuk Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) dengan tetap menyesuaikan dan mengacu pada peraturan yang berlaku bagi wilayah kelurahan. Terbentuknya BUMKel, akan dapat membangun sistem perangkat EGRI atau Ekonomi Gotong Royong Indonesia atau EGRI skala kelurahan perkotaan yang fungsinya ikut memberdayakan pemerataan hasil pembangunan demi EKRI atau Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Indonesia di perkotaan. Hal ini sesuai dengan politik pengentasan kemiskinan warga kota prasejahtera (Panji, 2014).

Terkait dengan usaha pariwisata, pemerintah kelurahan dapat menggunakan BUMKel sebagai pengelolanya, tetapi bisa juga diserahkan kepada kelompok masyarakat di bawah koordinator pemerintahan

tingkat RW atau RT. Senyampang kelompok masyarakat itu memiliki tata aturan (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat AD/ART, maka kelompok masyarakat itu bisa mengelola usaha pariwisata di wilayahnya, dengan mempertimbangkan bentuk kelembagaan badan usahanya, apakah ingin berbadan hukum atau tidak.

2.2. Branding Kawasan Wisata

Satu di antara beberapa entitas yang penting guna melakukan pemasaran ialah wilayah yang mencakup Negara, kota, wilayah atau keseluruhan bangsa guna mendapatkan perhatian dari wisatawan, bisnis, serta bahkan penduduk baru (Kotler dan Keller, 2009). Satu di antara beberapa upaya yang biasa dilakukan dalam memasarkan tempat tersebut adalah dengan melakukan upaya membangun merk (*strategi branding*). Pada aspek pemasaran, strategi branding ialah langkah yang dilaksanakan guna memberi ciri khas (*value*) yang menyebabkan dapat dipakai untuk membedakan suatu tempat dengan tempat lain yang merupakan kompetitornya. Strategi branding sekarang tak hanya bisa dilakukannya di produk-produk tangible saja, tetapi juga bisa dipakai untuk membangun kawasan dan destinasi wisata.

Dalam hal branding destinasi wisata, pembangunan brandin harus disesuaikan dengan segmenting, targeting dan positioning (STP) destinasi itu sendiri. Pasar pariwisata merupakan sesuatu yang heterogen sehingga pelaku bisnis dalam industri pariwisata harus fokus dalam memasarkan produk pariwisata yang mampu memberikan nilai tertentu (spesifik) bagi wisatawan dan calon wisatawan. Memenuhi keinginan dan kebutuhan yang spesifik akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan memenuhi ekspektasi wisatawan yang luas beragam.

Menurut Widokarti et al (2019), terdapat 7 pendekatan yang bisa dipakai guna melaksanakan positioning dalam industri pariwisata. Ketujuh pendekatan ini menjadi dasar membangun branding destinasi wisata tersebut, yakni (1) derajat kepentingan, (2) keunikan, (3) superioritas, (4) komunikatif, (5) tidak mudah ditiru, (6) terjangkau, dan (7) kemampuan mendatangkan profit atau keuntungan. Proses STP akan menjadi pertimbangan utama dalam membranding sebuah destinasi wisata.

2.3. Pemasaran Digital

Destinasi yang menarik dan tata kelola destinasi yang baik tidak berarti apa-apa jika tidak dipasarkan. Pemasaran diperlukan agar masyarakat luas tahu bahwa ada sebuah destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Persaingan di industri pariwisata yang ketat memaksa pengelola destinasi untuk bisa menjual keunikan dan daya tarik khusus yang mampu menarik minat berkunjung sekaligus memenangkan persaingan. Karena itu, sebuah destinasi harus punya positioning dan unique selling point agar bisa menarik minat pengunjung.

Memasarkan produk pariwisata, baik itu destinasi, atraksi, dan layanan pariwisata lainnya tidak sama dengan memasarkan barang yang bisa dipindahkan secara fisik. Produk pariwisata menyangkut emosi, pengalaman dan kepuasan pengunjung, karena itu memasarkannya pun harus dengan berbagai cara agar menyentuh emosi calon pengunjung (Utama, 2017).

Teknologi informasi sangat membantu dalam memasarkan pariwisata, karena memungkinkan membawa produk ke calon pembeli dalam bentuk audio, visual dan audio visual. Media sosial menjadi sarana ampuh nomer satu untuk memasarkan destinasi wisata, dan itu telah terbukti dengan banyaknya pengunjung ke destinasi-destinasi wisata yang mendadak viral karena postingan di media sosial. Karena itu, memasarkan destinasi wisata saat ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pemasaran digital daripada konvensional.

Pemasaran digital atau *digital marketing* ialah aktivitas marketing yang tergolong pada branding yang memakai bermacam-macam platform media yang memiliki basis internet (Wardhana, 2015). Banyak platform yang bisa dipakai, diantaranya adalah website, blog, iklan-iklan pada portal berita *online* dan tentu saja media sosial. Media sosial yang bisa digunakan untuk pemasaran digital dan memberikan layanan bisnis pun bermacam-macam seperti *facebook*, *instagram*, *youtube*, dan yang terbaru adalah *tiktok*.

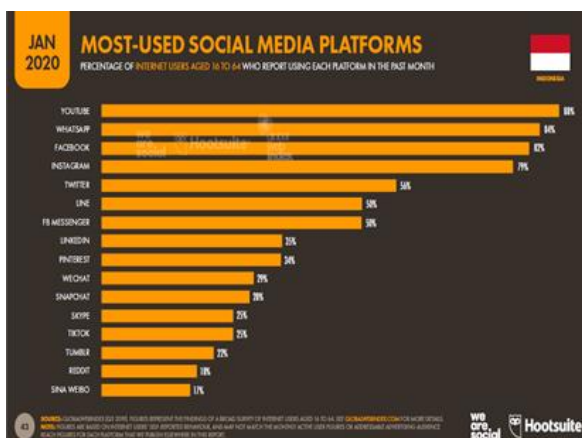
Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia kerap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu berarti meningkatkan jangkauan penetrasi pasar, bila kita memasarkan produk melalui platform digital. Dengan kelebihanannya (cepat dan tersebar luas), pemasaran digital diyakini membawa dampak positif pada pemasaran

pariwisata. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia sampai Januari 2020, nampak dalam gambar 1.



Gambar 1. Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia (Sumber: we are social, Indonesian Digital Report 2020)

Sampai dengan Januari 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa, dan pengguna telpon seluler sebanyak 338,3 juta. Itu berarti ada banyak penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari satu telpon seluler. Sementara pengguna media sosial aktif sebanyak 160 juta jiwa, dan platform media sosial yang banyak dipakai di Indonesia nampak sebagai berikut:



Gambar 2. Pengguna Media Sosial Aktif
Sumber: we are social, Indonesian Digital Report 2020

5 (lima) media sosial teratas yang terbanyak dipakai di Indonesia ialah *YouTube*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* serta *Twitter*. Di sisi lain, Tiktok juga mulai dipakai sebanyak 25% dari jumlah penduduk Indonesia, meskipun Tiktok ada di urutan 13 dari media sosial yang dipakai di Indonesia. Jadi jangkauan media sosial untuk memasarkan produk pariwisata sungguh luas.

Ada beberapa keuntungan penggunaan media sosial untuk pemasaran, yakni (1) metode yang mudah guna mencari tahu lebih banyak tentang pelanggan, (2) memberikan bantuan untuk mencari target pelanggan yang lebih efektif, (3) memberikan bantuan untuk mendapat pelanggan baru serta meluaskan target pasar, (4) memberikan kemudahan dan memberi feedback dengan langsung, (5) memberikan pengembangan target pasar serta selangkah lebih maju dari kompetitor, (6) memberikan bantuan guna memperoleh peningkatan pengunjung website serta ranking dalam search engine, (7) membagikan informasi dengan lebih cepat, (8) memberikan bantuan pada pelanggan untuk menemukan bisnis, (9) lebih dekat (*proximity*) pada calon konsumen, dan (10) memberikan peningkatan pada *brand awareness* serta promosi dengan biaya minim. (Hardy, 2010)

YouTube, media sosial nomer satu yang paling banyak digunakan, saat ini menjadi mesin pencari (*search engine machine*) paling besar nomor dua sesudah *Google*. Itu maknanya, masyarakat selalu mencari informasi memakai *YouTube* serta menemui video yang berhubungan pada topik yang dicari.

YouTube juga melakukan penggabungan akan fitur yang memberikan kemungkinan atas bisnis (apapun itu) guna dipromosikan lewat video yang dibuat pada penonton video tersebut yang mungkin memiliki ketertarikan akan bisnis itu sendiri, melalui algoritma *YouTube* dan memberikan target konsumen dengan demografi, topik ataupun minat. Pengiklan hanya akan melakukan pembayaran pada tiap video yang ditonton orang. *YouTube Ads* memungkinkan pengguna dapat memilih lokasi iklan akan muncul dan bagaimana formatnya.

Facebook juga menyediakan fitur untuk beriklan dan menawarkan jualan (*Facebook Ads*). Dengan biaya beriklan yang relatif murah, target audiens yang bisa dilakukan pengaturannya seiring dengan keperluan (Gangadharbatla, 2008), sifat audiens yang aktif menjadikan

Facebook alternatif media beriklan yang dipandang praktis serta efisien (Lasmadiarta, 2010). Keunggulan lain *Facebook Ads* adalah kemudahan dalam perancangan dan pengawasan. Pengiklan bisa secara mudah melakukan pengawasan serta penilaian apa iklan yang dibuat menghasilkan dengan baik ataupun tak sesuai harapannya. Pengiklan juga bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli melalui kolom komentar. *Facebook* merupakan situs jejaring sosial (media sosial) yang memberikan kemungkinan kepada para pengguna *facebook* guna bisa melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tidak memperdulikan waktu ataupun jarak dan dapat melakukan jangkauan masyarakat yang amat luas. Perihal ini menjadikan produk yang dilakukan pemasarannya bisa diketahui dengan masyarakat yang lebih luas juga.

Instagram juga memberi peluang membuat iklan yang lebih prospektif dengan fitur *Instagram Ads*. Konten berbayar ini dapat menjangkau target audiens dengan target yang spesifik secara lebih luas. Menurut dewaweb.com, 60% pengguna *instagram* menyatakan mereka menemukan banyak produk baru dari platform *instagram Ads* dan 75% terinspirasi untuk melakukan sesuatu (*action*) setelah melihat post di *instagram*. Beberapa fitur *instagram* yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan beriklan antara lain hastag insight, *ALT Text*, *Shoppable Posts*, *Instagram Story Interface (Gift, Quiz, Polls, Votes)*, *Q&A Instagram Live*, dan *Activity Status (reselindo.com)*.

Platform terbaru yang mengeluarkan media beriklan adalah *Tiktok For Bussiness*. Ini merupakan cara baru untuk membantu mengenalkan brand dan produk dengan kreatif dan menarik. Ada sejumlah tools di *Tiktok* yang bisa dipakai untuk berinteraksi dengan calon pembeli. Menurut Listiyani (2020) beberapa manfaat yang di dapat ketika menggunakan *tiktok* untuk mengiklankan produk adalah (1) bisa menceritakan kisah dan brand dengan kreatif dan menghibur, (2) ada banyak peluang berkreasi dengan musik, efek suraa, voice over, reaksi, dance, dan lain-lain, (3) komunitas inklusif dan partisipatif, (4) *Tiktok* adalah platform yang memungkinkan membentuk dan melahirkan budaya populer, (5) fiturnya memenuhi kebutuhan pemasaran, menyampaikan informasi dengan mudah, video tampil dalam format layar penuh dan muncul secara autentik dengan pengalaman pengguna.

3. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini dibagi menjadi 3 (tahapan). Tahap pertama adalah mengikutsertakan sebagian pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT), kelompok masyarakat yang memelopori pembukaan destinasi wisata ini, ke pelatihan pemasaran digital. Tahap ke dua adalah melaksanakan pelatihan *online* lewat aplikasi zoom meeting, dan tahap ke tiga adalah diskusi tatap muka.

Ada yang spesial pada pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun ini, karena pada tahun ini pula pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pandemi ini kemudian melahirkan kebijakan dari seluruh pemerintahan di dunia (bukan cuma di Indonesia) untuk melakukan pembatasan pergerakan manusia. Di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimulai sejak bulan Maret 2020 dan baru terjadi pelonggaran pada bulan Juli 2020. Karenanya, Maret-Juli tidak satupun kegiatan lapangan bisa dilaksanakan. Kalaupun ada kegiatan, semua harus menggunakan media berbasis internet alias *online*. Karena itu, diadakanlah edukasi mengenai branding, pemasaran digital dan tata kelola kelembagaan ini secara *online*.

Meski demikian, sesuai dengan komitmen awal dengan mitra, pada bulan September dilaksanakanlah pertemuan tatap muka sekaligus pelatihan membangun brand dan pelatihan tata kelola kelembagaan. Secara singkat, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini nampak dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Waktu	Materi	Tempat	Sifat Perte-Muan	Jml Peserta (org)	Keterangan
Feb 2020	Survei dan Koordinasi dengan pengurus kampung wisata	Kelurahan Medokan Semampir	<i>Offline</i>	7	Bertemu dengan para penggiat kampung wisata. Mencari data lapangan dan identifikasi permasalahan
Maret 2020	Peningkatan Kualitas Digital Marketing	Spazio Tower Surabaya	<i>Offline</i>	4	Pelatihan bersama dengan penggiat kampung wisata dari kelurahan

					lain
Juni 2020	Tata kelola kelembagaan destinasi wisata	<i>Zoom meeting</i>	<i>Online</i>	10	Dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi pelatihan dan edukasi ini tetap bisa terlaksana dengan menggunakan aplikasi zoom meeting
Sept 2020	Membangun branding	Taman hidroponik Semampir Kelurahan Surabaya	<i>Offline</i>	15	Tatap muka dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, phisical distancing, bermasker, dan handsanitizer

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya Medokan Semampir sebuah kelurahan yang memanfaatkan lahan-lahan fasilitas umum sebagai lahan pertanian hidroponik oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Di samping itu, mereka mulai menata pohon pelindung sehingga tanaman penghijauan di sepanjang daerah hunian pun diseragamkan di masing-masing gang. Ada gang buah-buahan, gang sayur-sayuran dan bahkan ada gang yang penghuninya punya produk olahan makanan rumahan. Karena kerapiannya, Medokan Semampir kemudian memenangkan ajang lomba kebersihan dan potensi kampung yang diselenggarakan pemerintah kota Surabaya. Karena prestasinya itu, daerah mereka sering didatangi orang untuk sekedar melihat kerapian kampung maupun tamu-tamu yang datang dari luar daerah untuk studi banding. Pengurus kampung kemudian berinisiatif untuk memanfaatkan tamu dan pengunjung itu agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya. Karena itu, mereka kemudian mulai membranding daerahnya menjadi sebuah destinasi wisata.

Di awal pengumpulan data, tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola kepengurusan jika pihak mitra ingin benar-benar membangun destinasi wisata secara profesional. Masalah yang kedua berkaitan dengan destinasi wisata yang bagaimanakah yang ingin mereka jual, dan bagaimana pemasarannya. Karena itu, ada tiga masalah utama pada mitra, yaitu (1) belum ada sistem tata kelola kelembagaan, (2) belum melakukan branding kawasan wisata, (3) belum pernah melakukan pemasaran dengan media digital.

Ketiga permasalahan itulah yang coba dipecahkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Dr Soetomo dengan memberikan pelatihan dan edukasi. Memang bukan program pendampingan yang ditawarkan, karena pihak mitra sendiri masih belum menemukan formula yang pas dalam membangun destinasi wisatanya. Itulah sebabnya pelatihan dan edukasi diperlukan guna menambah wawasan dan pengetahuan para pengurus pemerintahan kelurahan.

Selanjutnya, solusi yang sudah disepakati dilaksanakan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi mitra. Menariknya ada satu sesi pelatihan yang pesertanya bukan hanya mitra, tetapi juga UMKM-UMKM yang ikut belajar bersama karena dirasa materinya menarik minat mereka, yakni peningkatan kualitas digital marketing.

Rencana semula, pelaksanaan semua pelatihan dan edukasi ini dilakukan secara tatap muka. Tetapi di tengah perjalanan, mulai Maret 2020 pandemi melanda seluruh dunia dan karenanya muncul kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah. Karena itu, tim pengabdian masyarakat dan mitra sepakat untuk melaksanakan pelatihan dan edukasinya secara daring. Setelah ada kelonggaran kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, barulah melanjutkan pelaksanaan pelatihan dan edukasi ini secara tatap muka, dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jika digambarkan dalam tabel, maka kesepakatan yang disetujui oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo dengan mitra ini terlihat sebagai berikut:

Tabel 2. Permasalahan Yang Dihadapi Mitra Dan Solusi Yang Disepakati

No	Permasalahan	Solusi Yang Disepakati
Bidang Tata Kelola Kelembagaan		
1	Bagaimana kepengurusan sebuah usaha bersama tentang kampung wisata?	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi tentang lembaga/badan hukum yang bisa dipakai untuk menaungi kepengurusan usaha kampung wisata. • Edukasi tentang tata kelola kelembagaan pengurus kampung wisata
2	Bagaimana pengelolaan manajemen usaha kampung wisata?	Pelatihan manajemen usaha kampung wisata melalui: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan program • penyusunan program • pengupayaan program • pengawasan program
Bidang <i>Branding</i>		
3	Bagaimana membangun <i>brand</i> dan <i>branding</i> destinasi kampung wisata di perkotaan?	Edukasi tentang membangun branding destinasi wisata yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan nama <i>brand</i> • Penentuan branding yang tepat untuk mitra.
Bidang Pemasaran		
4	Bagaimana melakukan pemasaran digital untuk memasarkan sebuah kampung wisata?	Pelatihan digital <i>marketing</i> yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan akun bisnis di media sosial: <i>facebook</i>, <i>instagram</i>, <i>tik tok</i> • Pengenalan pemanfaatan <i>influencer</i>, serta fitur di aplikasi media sosial seperti di <i>Instagram (hashtag, top post, ALT Text, Shoppable Post, Instagram Story Interface - Gift, Quiz, Polls, Votes</i>, dan lain-lain), fitur di <i>Facebook Ads</i> dan <i>Tiktok for Bussiness</i>

Pelaksanaan pelatihan dan edukasi berjalan lebih panjang dari waktu yang ditentukan, karena diskusi-diskusi memakan waktu yang panjang pula. Antusiasme dan keingintahuan mitra menjadi alasan mengapa waktu yang diperlukan untuk diskusi selalu lebih panjang dari yang telah ditentukan. Dengan diskusi yang panjang, solusi permasalahan mitra pun tercapai. Capaian solusi permasalahan mitra itu nampak dalam tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Solusi Permasalahan Mitra

No	Capaian	Keterangan
Bidang Tata Kelola Kelembagaan		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya susunan pengurus / pengelola organisasi kampung wisata. • Merencanakan untuk mendaftarkan badan usaha kampung wisata menjadi legal dan berbadan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya belum memahami bahwa kepengurusan kampung wisata adalah sebuah badan usaha • Ada kemauan untuk menjadikan badan usaha kampung wisata itu berbadan hukum, dan memenuhi persyaratan legal formal.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan tentang manajemen usaha kampung wisata • Peningkatan pengetahuan manajemen SDM dalam pengelolaan kampung wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kemauan mitra untuk memperbaiki kinerja manajemen usaha dalam mengelola kampung wisata, menuju manajemen yang profesional. • Merencanakan untuk kepengurusan dengan jobdisription yang jelas
Bidang Branding		
3	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan tentang bagaimana membangun branding kawasan, khususnya untuk destinasi wisata • Penentuan nama brand dan target marketnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan brand destinasi, dan disepakati brand yang dipakai adalah KAMPUNG WISATA LINGKUNGAN 'MESEM'. • Mesem sebetulnya singkatan dari nama kelurahannya yakni MEDokan SEMampir, tetapi dalam bahasa Jawa, Mesem juga berarti tersenyum. • Disebut Kampung Wisata Ling-kungan karena wilayah ini menjual lingkungan lingkungan padat penduduk yang asli tanaman yang bertema di setiap gang dalam wilayah tersebut. Sebutan kampung wisata lingkungan juga menjadi pembeda dengan kampung-kampung wisata lain yang ada di kota Surabaya. • Target marketnya adalah murid-murid Paud, TK dan SD kelas 1, karena Kampung Wisata Lingkungan MESEM

		ini diharapkan menjadi bagian dari pembelajaran akan lingkungan bagi para siswa.
Bidang Pemasaran		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi pembuatan Akun Bisnis di Media Sosial • Edukasi pemanfaatan <i>influencer</i>, serta fitur di aplikasi media sosial seperti di Instagram (<i>hashtag, top post, ALT Text, Shoppable Post, Instagram Story Interface - Gift, Quiz, Polls, Votes</i>, dll), fitur di <i>Facebook Ads</i> dan <i>Tiktok for Business</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah membuat akun bisnis yaitu (1) facebook: kampungwisatamesem, (2) instagram : @kampungwisatamesem • Peningkatan pengetahuan tentang cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada masing-masing aplikasi media sosial, yakni facebook dan instagram.

Setelah program pelatihan dan edukasi ini, maka diharapkan mitra bisa menindaklanjuti dengan (1) menjalankan manajemen usaha secara profesional, (2) melakukan pemeliharaan destinasi Wisata, (3) memelihara lingkungan agar tetap bersih, rapi, indah, (4) menjalankan tata kelola kelembagaan kampung wisata sesuai tugas dan kewajibannya, (5) melakukan branding kampung wisata dan mulai menjalankan pemasaran digital, (6) Mengenalkan Kampung Wisata ke target pasar dengan cara bekerjasama dengan sekolah-sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SD (Sekolah Dasar) yang berdomisili di sekitar Medokan Semampir, dan (7) Menggalakkan UKM untuk mendukung varian produksi pariwisata di kampung wisata.

Meskipun begitu, mitra masih merasakan ada yang kurang dari pelaksanaan program ini. Diantaranya adalah perlunya pendampingan dalam hal lanscape dan teknik lingkungan. Hal itu diperlukan agar taman-taman dan pepohonan yang sudah ada menjadi nampak cantik dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Permatuan Jalan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya juga harus dilakukan.

5. KESIMPULAN

Meskipun termasuk kota besar, tetapi Surabaya tetap memelihara keberadaan kampung-kampung di dalamnya, sehingga hampir semua kelurahan di Surabaya memiliki kampung-kampung wisata dengan branding yang berbeda-beda. Persaingan antar kampung wisata di kota Surabaya sendiri maupun dengan kampung wisata dari daerah lain memaksa pengelola destinasi wisata untuk belajar cepat, baik dalam hal profesionalisme pengelolaan, pemeliharaan destinasi, pelayanan wisata dan pemasaran destinasi wisata.

Tetapi itu bukan masalah yang sulit dipecahkan. Perguruan Tinggi dengan Tridharmanya akan membantu masyarakat untuk mengatasi hal tersebut. Kerjasama antara masyarakat dengan Perguruan Tinggi menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis mutualisme ini diperlukan agar program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa cepat tercapai.

Pelatihan dan edukasi yang dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Soetomo ini bisa diteruskan ke beberapa sektor dan wilayah lainnya. Semoga bisa melahirkan kampung wisata-kampung wisata lain di wilayah yang lain pula.

REFERENSI

- Cooper, et. al., 2008, *Tourism Principles & Practice*, England: Longman Group Limited.
- Gangadharbatla, H. (2008). *Facebook me: collective self-esteem, need to belong, and internet self-efficacy*. Journal of Interacting
- Hardy. 2010, *Media Social, dalam AdWeek: The Real Value in Media Social For Bussiness*
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller 2009, *Manajemen Pemasaran Jilid I*, Jakarta, Erlangga.
- Lasmadiarta, M. (2010). *Facebook Marketing Revolution*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Listiyani, Dini., 2020, *Tiktok Hadirkan Platform Untuk Bisnis, inews.id, techno*

- Merta, I Wayan., 2019, *Konsep Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Desa Pemuteran, 21-23 Mei 2019.
- Schaffers, Hans, 2010, *Smart Cities and the Future Internet: Towards Collaboration Models for Open and User Driven Innovation Ecosystems*, FIA Ghent, “Smart Cities and Future Internet Experimentation”, December 16th 2010.
- Utama, I Gustu Bagus Rai., 2017, *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta, Andi
- Wardhana, Aditya., 2015, *Strategi Digital Marketing dan implikasinya Pada keunggulan Bersaing UMKM di Indonesia*, Bandung, Research Gate Conference Seminar Keuangan dan Bisnis IV UPI.
- Widokarti, Joko Rizkie dan Donni Juni Priansa, 2019, *Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Industri Pariwisata*, Bandung, Alfabeta
<https://resellerindo.com/fitur-instagram-terbaru/> diunduh pada 5 Desember 2020 jam 11.25

Biografi Penulis 1



Fedianty Augustinah, Lahir di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1968 adalah dosen di Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1994 sampai sekarang, dengan Jabatan Akademik adalah Lektor. Sejak tahun 2019 hingga sekarang penulis menjabat sebagai Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Dr. Soetomo.

Biografi Penulis 2



Sri Astutik, Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada Tahun 2018, yang dibiayai dari Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan dana penelitian dari Hibah Penelitian Disertasi, dengan konsentrasi pada Hukum Bisnis. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;

Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo; dan Pengelola Jurnal Lex Journal Fakultas Hukum.

Biografi Penulis 3



Zulaikha adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Merupakan alumni Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo dan saat ini sedang menempuh studi Doktorat di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sempat menjadi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur periode 2014-2018. Selama ini memilih minat di bidang keterbukaan informasi dan *marketing communication*. Tahun-tahun terakhir ini aktif menjadi peneliti di bidang pariwisata dan *branding*.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA WISATA SUMBER DHUWUR WONOSARI MOJOKERTO

Putut Handoko¹, Cicilia Tantri Suryawati²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: putut.handoko@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: cicilia.tantri@unitomo.ac.id

Email korespondensi: putut.handoko@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Desa Wonosari yang terletak di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mempunyai ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Desa Wonosari berbatasan dengan Desa Ngoro di sebelah barat, Desa Watesnegoro dan Desa Manduro Manggunggajah di sebelah timur, Desa Candiharjo di sebelah utara, dan di sebelah selatannya adalah Desa Wotanmas Jedong. Desa Wonosari berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 28 km dari ibu kota kabupaten, dan sekitar 40 km dari Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya.

Desa Wonosari mempunyai potensi sebagai destinasi wisata dengan potensi alam yaitu kolam tua dengan mata air yang tidak pernah kering yang diberi nama Sumber Dhuwur serta memiliki tradisi panen ikan setiap tahun di kolam tersebut yang sudah terkenal ke luar daerah. Selain itu, Desa Wonosari juga berada di lokasi yang dilalui para wisatawan baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara dari Yogyakarta menuju Jawa Timur sehingga Desa Wonosari harus mengembangkan potensi desa wisatanya yaitu desa wisata Sumber Dhuwur untuk menarik para wisatawan mengunjungi Wonosari.

Desa wisata Sumber Dhuwur yang menempati tanah Desa Wonosari dengan luas area 9.000 m² dikelilingi oleh tembok pembatas dari area persawahan milik masyarakat dan bersebelahan dengan objek wisata Candi Brangkal yang terletak di Desa Candiharjo. Wisata Sumber Dhuwur yang terdiri atas pepohonan dengan akar seribunya dan sebuah kolam bekas peninggalan kerajaan Mojopahit seluas 2000 M². Di dalam area desa wisata juga terdapat makam kuno yang keberadaannya dipercaya oleh masyarakat setempat sejak sebelum kerajaan Mojopahit berdiri, Makam Mbah Sumber ini dianggap leluhur masyarakat Wonosari. Desa wisata ini kemudian dikelola oleh

desa dengan menugaskan beberapa warga yang mengelolanya secara bergantian dari masa ke masa.

Desa wisata Sumber Dhuwur terkendala dengan kelembagaan sehingga desa wisata sumber Dhuwur ini belum membuka diri sebagai tempat wisata yang dikelola secara profesional. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan sangat urgen untuk segera dilakukan sebagaimana dikatakan Vitria Aryani dkk dalam *Buku Pedoman Desa Wisata* bahwa salah satu kelembagaan desa wisata adalah kelompok sadar wisata (pokdarwis) (2019, p. 1)

Pengembangan kelembagaan desawisata dilakukan dengan pembentukan pengurus organisasi desa wisata/kelompok sadar wisata di desa wisata Sumber Dhuwur, Desa Wonsari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

2. KAJAN TEORI

2.1 Desa Wisata

Pariwisata pedesaan yang sedang menjadi prioritas pemerintah dalam penyetaraan ekonomi hingga ke pelosok pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan yang memiliki potensi alam dan topografi yang indah serta budaya yang lebih otentik dibanding wilayah perkotaan. Masyarakat pedesaan cenderung masih menjalankan ritual-ritual budaya yang menjadi salah daya tarik. Kedua, wilayah pedesaan secara fisik belum tercemar dengan berbagai polusi dibanding wilayah perkotaan. Ketiga daerah pedesaan secara ekonomi memiliki kemajuan yang lebih lambat dibanding wilayah perkotaan, sehingga pemanfaatan potensi lokal merupakan alasan yang cukup rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Muljadi (2012, p. 12) menyatakan bahwa desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang tidak mengubah bentuk asli, menawarkan keaslian dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut yang berfungsi sebagai atribut wisata.

Menurut Nuryanti dalam (Antara & Arida, 2015, p. 7) desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Menurut Hadiwijoyo dalam (Ayuningsih, 2019, p. 8) desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana

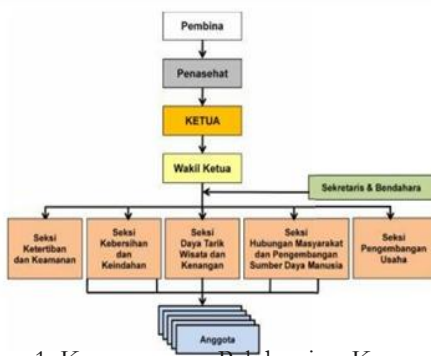
yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Vitria Aryani dkk (2019, p. 1) dalam *Buku Pedoman Desa Wisata* mengartikan desa wisata adalah wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijabarkan bahwa desa wisata merupakan wilayah administrasi atau kawasan pedesaan yang menawarkan keaslian pedesaan atau menawarkan potensi dan keunikan daya tarik wisata.

2.2 Struktur Organisasi Desa Wisata

Menurut pedoman Pokdarwis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pedoman Pokdarwis tahun 2012 dituliskan bahwa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok masyarakat yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di desa wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah dan memiliki kemanfaatan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat (Kemenparekraf, 2012). Selanjutnya dalam pedoman Pokdarwis dituliskan kepengurusan Pokdarwis seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kepengurusan Pokdarwis – Kemenparekraf

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengembangan struktur organisasi lembaga kepengurusan desa wisata di Desa Wonosari dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Analisis kebutuhan

Tahapan awal ini berupa upaya memahami situasi secara umum yang berkaitan dengan pembentukan pengurus pengelola wisata Desa Wonosari Mojokerto.

2. Pelatihan

Tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya pembentukan pengurus pengelola wisata Desa Wonosari dan susunan kepengurusan yang diperlukan sesuai dengan pedoman dari Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

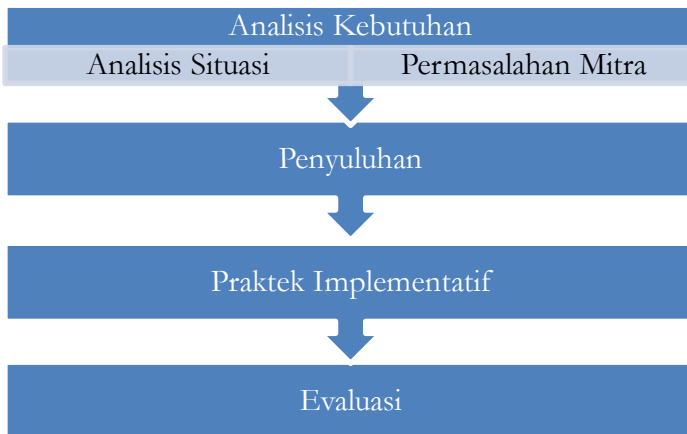
3. Praktek implementatif

Tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo bersama pengurus desa dan tokoh masyarakat menyusun kepengurusan struktur organisasi wisata Desa Wonosari.

4. Evaluasi

Tim pengabdian Universitas Dr. Soetomo menyerahkan hasil struktur organisasi yang telah disepakati dengan pengurus desa dan tokoh masyarakat dalam kepada kepala desa.

Seluruh kegiatan pelaksanaan tertuang dalam bentuk bagan alir seperti pada Gambar 2.

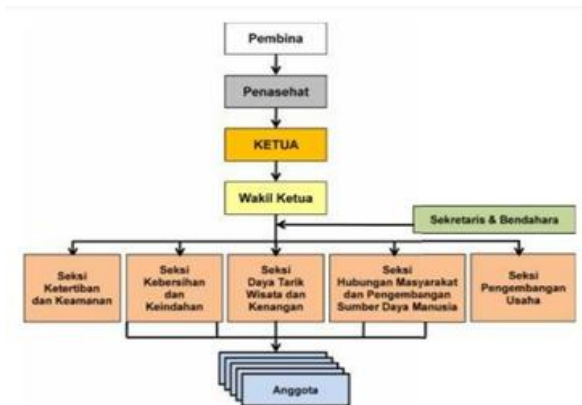


Gambar 2. Bagan alir tahapan kegiatan di lapangan

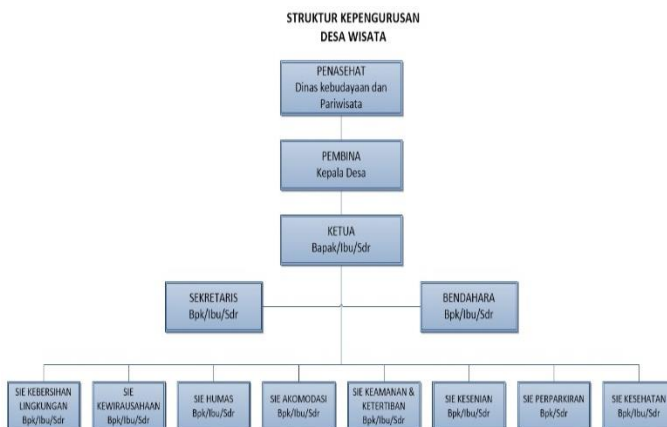
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyuluhan

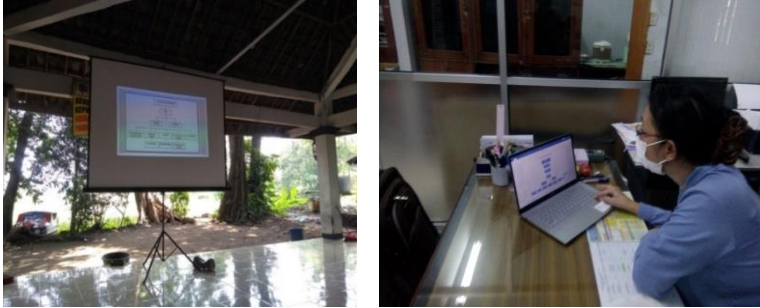
Pada penyuluhan ini tim pengabdian memberikan dua buah model struktur organisasi Desa Wisata, Pengabdi meminta warga untuk mencermati 2 model struktur organisasi dan memilih salah satu model struktur organisasi. Apabila dari kedua model tersebut masih ada yang diperlukan maka masyarakat dapat juga memodifikasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan Desa wisata Sumber Dhuwur serta tersedianya pengurus yang akan mengisi struktur organisasi:



Gambar 3. Usulan struktur organisasi model 1



Gambar 4. Usulan struktur organisasi model 2



Gambar 5. Foto kegiatan penyuluhan di lapangan

4.2 Praktek Implementatif

Tim pengabdian Universitas Dr. Soetomo melanjutkan praktek implementatif struktur organisasi. Bersama dengan masyarakat berhasil membuat susunan pengurus organisasi. Struktur Pengelola Wisata Sumber Dhuwur kemudian disahkan oleh Bapak Kades. Tim Pengabdian sebagai fasilitator, mencoba cek ulang data nama nama dinas di Kabupaten Mojokerto. Data nama nama dinas yang ada di kabupaten Mojokerto adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto.



Gambar 6. Hasil susunan organisasi desa wisata Sumber Dhuwur yang dibuat oleh masyarakat

4.3 Evaluasi

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian menyerahkan hasil pengabdian tim UNITOMO yaitu Struktur Organisasi Pengelola Wisata Sumber Dhuwur dan desain wisata desa.



Gambar 7. Penyerahan hasil pengabdian ke desa

5. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat fokus pada Pengembangan kelembagaan Desa Wisata. Tim pengabdian Unitomo mengadakan penyuluhan pembentukan pengurus desa wisata Sumber Dhuwur. Hasil Pengabdian berupa Struktur Organisasi Desa Wisata Sumber Dhuwur dan desain wisata desa.

Acknowledgement

Ucapan terima kami sampaikan kepada beberapa pihak yang mendukung terselesainya pengabdian kepada masyarakat di desa wisata Wonosari Mojokerto:

1. Ketua LPPM Uversitas Dr. Soetomo, Dr. Fajar Hartanti, MP yang memberi fasilitas dan dukungan pelaksanaan PPM di Desa Wonosari Mojokerto
2. Bapak kepala desa, Ibu Sekretaris Desa, Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Manager Desa Wisata Sumber Dhuwur dan perangkat desa dan karang taruna Desa Wonosari Mojokerto yang bekerja sama dan mendukung PPM di desa wisata Sumber Dhuwur.

REFERENSI

- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi*. Konsosium Riset Pariwisata Universitas Udayana Bali.
- Aryani, V. (2019). *Buku Pedoman Desa Wisata*. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan kelembagaan Kemetrian Pariwisata.
- Ayuningsih, F. (2019). *Pengembangan Wisata Pedesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulon Progo, Purworejo), Belitung Timur, Malang Raya*. Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Kememparekraf. (2012). *Pedoman Pokdarwis*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Muljadi. (2012). *Keparivisataan dan Perjalanan*. Raja Grafindo Persada.

Biografi Penulis 1



Putut Handoko lahir di Lumajang, 16 Maret 1966. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Lumajang, S1 di Universitas Jember dan S2 di Universitas Negeri Surabaya. Dosen di Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo sejak 1992 hingga sekarang, Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya (STIESIA), dan Institute Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) hingga sekarang. Pemakalah dalam seminar nasional dan seminar international di UNITOMO Surabaya, di UNIRA Malang, di UNIKAMA Malang, di ADRI Nganjuk. Menghasilkan karya penelitian yang diterbitkan di Jurnal Nasional, Jurnal international dan Prosiding baik nasional dan international. Beberapa karya pengabdian diterbitkan di jurnal, *prosiding*, dan *book chapter*. Karya pengabdiannya antara lain (1) Pengajaran Kompetensi Bahasa Inggris untuk Sekolah Menengah Kejuruan (2019), (2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Rancang Bangun Mbah Sumber di Desa Wonosari Kabupaten Mojokerto (2019), (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa Tambak kecamatan Omben Kabupaten Sampang (2020), dan (4) Pengembangan Kelembagaan Desa Wisata Sumber Dhuwur Wonosari Mojokerto (2021).

Biografi Penulis 2



Cicilia Tantri Suryawati, dosen di prodi Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo sejak 1992 hingga sekarang. Lahir di Surabaya 12 November 1966. Menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Negeri Surabaya-UNESA (Universitas Negeri Surabaya) tahun 1992, di jurusan Pendidikan Bahasa Jepang dan S2 juga di UNESA dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Berhasil mendapatkan *Grant* dari *The Japan Foundation* untuk belajar di Jepang tahun 1994, 2004, dan 2017. Selain itu, tahun 1999-2002 mengikuti *teacher training* di *Tokyo University of Foreign Studies* (TUFS) dengan beasiswa dari Monbukausho. Publikasi di *Jurnal Peneliti Indonesia* seluruh Jepang dan jurnal nasional. Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan antara lain menjadi *volunteer* mengajar Bahasa dan Budaya Jepang di Rumah Bahaas dan Budaya Jepang di Rumah Bahasa Pemkot Surabaya secara periodik sejak tahun 2015. Selain itu, melakukan pengabdian pemberdayaan masyarakat di Desa Wonosari Mojokerto dalam pengembangan desa wisata Sumber Dhuwur.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERAN PEREMPUAN DESA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP KELUARGA DALAM SIAGA BENCANA

Fedianty Augustinah¹·Agustiawan Djoko Baruno²

¹Universitas Dr Soetomo Surabaya,
email: fedianty.augustinah@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
email: agustiawanb@unitomo.ac.id

Email korespondensi: fedianty.augustinah@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana harus dilakukan oleh semua pihak karena bencana bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas masyarakat juga. Tidak luput juga peran perempuan sangat diharapkan dalam mensukseskan desa menjadi tangguh bencana. Terdapat sejumlah alasan strategis mengapa upaya peningkatan penanggulangan bencana melibatkan perempuan. Pertama, karena keberadaan perempuan yang sudah menyebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan modal sosial yang sangat strategis. Kedua, karena masih rendahnya partisipasi wanita dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan. Selain itu, sudah banyak terbukti bahwa perempuan menjadi kekuatan dalam penanggulangan bencana serta perempuan membentuk organisasi dan jaringan sosial yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Sosiologi: Suatu Pengantar (2003; 242) bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dan perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan perempuan terbukti bermanfaat dalam menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Merujuk pada sejumlah alasan di atas terkait dengan upaya penyelesaian masalah dalam rangka pelibatan perempuan dalam penanggulangan bencana melalui desa tangguh, maka untuk lebih memberikan efek resonansi komunikasi kepada

kelompok sasaran khususnya yang berhubungan dengan isu-isu kebencanaan, maka dalam kegiatan ini disesuaikan agar desa menjadi “Desa Siaga Bencana”.

Selain masalah di atas, ada bagian yang terpenting juga yang harus diselamatkan ketika terjadi bencana yaitu arsip-arsip pribadi keluarga atau arsip perdata. Dampak bencana juga akan berpengaruh terhadap arsip-arsip keluarga. Arsip ini merupakan alat bukti keperdataan yang jika rusak atau musnah dikarenakan bencana dapat merugikan semua pihak. Permasalahan yang ada pada para perempuan di Desa Padusan adalah desanya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Terlebih jika terjadi bencana yang dapat menghilangkan arsip keluarga.

Arsip keluarga merupakan alat bukti keperdataan yang jika rusak atau musnah dikarenakan bencana dapat merugikan semua pihak. Alat bukti keperdataan tersebut bisa berupa surat nikah, ijasah, sertifikat tanah, sertifikat rumah, kartu keluarga, dan arsip-arsip yang berharga lainnya. Lebih jelas lagi arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh anggota keluarga dalam mendukung aktivitas keluarga sehingga solusi yang ditawarkan adalah pengolahan dan penyimpanan arsip keperdataan keluarga dengan tas siaga bencana.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Peran Perempuan

Wanita disebut juga perempuan, puteri, istri, ataupun ibu adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki. Tuhan menjadikan Wanita agak berlainan bentuk susunan badannya dan agak berlainan pula kekuatan, dan akal pikirannya dibandingkan dengan lelaki. Perbedaan itu mengandung kepentingan dan hikmah yang tidak dapat disangkal oleh pria maupun wanita.

Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model *gender and development*. Pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah kegiatan pemberdayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. Pemberdayaan ini dilakukan oleh *Self Employed Women's Association* (SEWA). Sebelum adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad berkerja sebagai pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari memulung hanya 10% dari nilai kertas yang dikumpulkan. Melalui asosiasi SEWA, perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta mendirikan bank sendiri untuk komunitas mereka. Namun, dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, perempuan masih dihadapkan pada banyaknya korupsi dan kendala.

Secara terminology menurut Sarwono Sarlito W dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum (2012;123) wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki. Definisi Wanita menurut ahli psikologi ialah perempuan dewasa; kaum putrid (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang *notabene* dalam penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda.

Realisasi pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan.
2. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Meningkatkan kualitas perandan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

2.2 Pengertian Desa

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Siaga Bencana

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: (1) Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia. (2) Faktor non alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan (3) Faktor sosial/ manusia (*man made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme.

Dalam menghadapi bencana, sikap siap siaga dibutuhkan untuk menjadi kunci penyelamatan diri saat bencana terjadi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana (TSB) merupakan tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan Tas Siaga

Bencana adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.

Berikut isi tas siaga bencana yang sebaiknya dipersiapkan sebagai langkah antisipasi ketika terdampak bencana: (1) alat komunikasi dan *charger/powerbank* untuk memberi informasi dan mencari bantuan, (2) obat-obatan pribadi dan perlengkapan P3K, (3) dokumen penting dan surat berharga, (4) masker dan *hand sanitizer*, (5) pakaian ganti, makanan, dan air mineral yang cukup untuk persediaan 3 hari, (6) uang tunai secukupnya untuk perbekalan, (7) senter untuk alat bantu penerangan, (8) selimut untuk kondisi dingin, (9) foto keluarga untuk mencari informasi jika terpisah dari keluarga saat terjadi bencana, (10) peluit untuk meminta pertolongan di saat darurat. Jangan lupa untuk menyimpan tas siaga bencana di tempat yang aman dan mudah dijangkau agar bisa segera diambil saat dibutuhkan.

2.4 Kearsipan

Arsip dalam bahasa Latin disebut *Archivum* atau *Archium*, dan akhirnya dari kata-kata ini dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Arsip. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan pada Bab I Pasal 1: (1) naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. (2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan perseorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam bentuk keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sehingga, arsip dapat disimpulkan sebagai naskah yang diciptakan atau diterima oleh suatu instansi, organisasi, atau perseorangan yang memiliki beragam corak.

Pengertian arsip vital berdasarkan Surat Edaran Nomor: Se/06/M.Pan/3/2005 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tahun 2005 Tentang Program Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana, adalah dokumen/arsip yang diperlukan untuk kelangsungan operasional organisasi pemerintah dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, seperti sertifikat tanah, bukti-bukti

kepemilikan, bukti-bukti sah di pengadilan dan naskah-naskah berharga lainnya. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala ANRI No. 6 tahun 2005, pengertian arsip vital adalah dokumen/arsip vital negara untuk selanjutnya disebut arsip vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta asset instansi.

3. METODE PELAKSANAAN

Permasalahan yang ada pada mitra perempuan yang terdiri dari ibu-ibu dasa wisma di Desa Padusan, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yaitu pada bidang masih belum pahamnya pentingnya mempersiapkan tempat atau tas khusus untuk menyimpan arsip-arsip penting keluarga Selanjutnya permasalahan yang dihadapi mitra dan solusi yang disepakati secara bersama dalam tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Yang Dihadapi Mitra Dan Solusi Yang Disepakati

Bidang	Permasalahan	Solusi
Simulasi	Untuk mengetahui sampai dimana pemahaman ibu-ibu tentang administrasi kearsipan	Mengenalkan tindakan persiapan tas siaga bencana untuk arsip-arsip keluarga
Administrasi Kearsipan / Hukum	Memahami pentingnya administrasi kearsipan dan pentingnya surat-surat berharga dari sisi hukum	Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengarsipan surat penting keluarga di rumah dan manfaatnya
Simbolisasi penyerahan Tas Siaga Bencana dan Baksos	Mengenalkan contoh (prorotype) tas ransel agar dapat di gunakan sebagai tempat menyimpan arsip keluarga	Penyerahan simbolis tas siaga bencana bantuan dari BPBD Prov Jatim kepada Kepala desa Padusan Pacet Mojokerto serta Pembagian sembako

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun target luaran yang direncanakan yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. seluruh ibu-ibu yang ada dalam perwakilan dasa wisma di Desa Padusan Pacet Mojokerto dengan metode awal yaitu sosialisasi/ penyuluhan pemahaman akan pentingnya menyediakan tas untuk arsip keluarga,
2. mengadakan pelatihan pengkaderan melalui simulasi simulasi yang menyenangkan sehingga para ibu-ibu yang tergabung dalam dasa wisma Desa Padusan tidak bosan dalam pelaksanaan simulasi tersebut,
3. pada tahap pelaksanaan tim melaksanakannya pada tanggal 12 Desember 2020 dan dilaksanakan pada satu hari tepatnya pada pukul 13:00 sampai selesai.

Jumlah keseluruhan peserta dalam mengikuti pelatihan ini berjumlah 25 orang terdiri atas ibu-ibu yang ada dalam perwakilan dasa wisma Desa Padusan Pacet Mojokerto. Selama pelatihan, peserta pelatihan sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang menyenangkan serta mempraktekan simulasi tas yang berisi arsip keperdataan.

Berikut dokumentasi kegiatan pelatihan tas siaga bencana.



Gambar 1. Penyampaian materi simulasi



Gambar2. Penyerahan tas siaga bencana

Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dalam siaga bencana di Desa Padusan, Pacet Mojokerto telah disampaikan materi tentang hal tersebut yang di urai pada Gambar 3.

Tas Siaga Bencana berisi barang-barang pokok dan penting ketika bencana atau kondisi darurat terjadi.

- ▶ 1. Surat-surat penting seperti Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Kendaraan, Kartu Keluarga, dll.
- ▶ 2. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan
- ▶ 3. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dll
- ▶ 4. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari
- ▶ 5. Obat-obatan pribadi atau umum
- ▶ 6. Alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dsb
- ▶ 7. Siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari
- ▶ 8. Peluit sebagai alat bantu pertolongan
- ▶ 9. Masker sebagai alat lindung pernafasan
- ▶ 10. Perlengkapan mandi
- ▶ 11. Radio atau ponsel untuk memantau informasi lebih lanjut mengenai bencana alam. Jangan lupa siapkan pengisi daya atau power bank.

Gambar 3. Isi tas siaga bencana

Adapun luaran yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini berupa pemberitaan ke media *online* sebagai berikut.

1. <https://www.lensanasional.co.id/news/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/>
2. <https://www.rmoljatim.id/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip>
3. <https://petisi.co/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasi-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/>
4. <https://www.unitomo.ac.id/news/295>

5. KESIMPULAN

Menyadari bahwa letak geografis Indonesia yang rawan bencana, maka perlindungan arsip dari bencana alam merupakan hal yang sangat perlu dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum yang menyimpan arsip penting dan arsip vital. Kita semua diharapkan selalu siaga menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, yang dapat memporak-porandakan dan menusnahkan arsip-arsip. Arsip-arsip yang rusak akibat bencana dapat diidentifikasi, yaitu arsip yang rusak akibat bencana tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan kebakaran. Bencana banjir, gunung meletus, tanah longsor, yang peristiwanya dapat diprediksi atau diamati, sebenarnya memberikan kesempatan kepada pengelola arsip di lembaga-lembaga arsip di pusat maupun di daerah untuk melakukan tindakan preventif semaksimal mungkin agar arsip-arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan tersebut dapat diselamatkan. Hal ini berbeda dengan bencana kebakaran yang sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga arsip-arsip secara fisik hancur dan informasinya sulit dilacak.

Target pengabdian yang dilakukan oleh Tim pengabdian belum tercapai secara maksimal karena membutuhkan proses interaktif dalam merubah pola perilaku keseharian para masyarakat desa terutama kaum perempuan untuk menyadari akan pentingnya dalam menjaga dan menyelamatkan arsip dengan tas siaga bencana karena kondisi geografis di Desa Padusan. Namun, kami yakin jika masyarakat desa khususnya perempuan sudah mengenalakan

pentingnya menyiapkan tas siaga bencana dan mengetahui langkah-langkahnya maka tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan itu akan terjadi perlahan-perlahan dalam tekad kesadaran masing-masing warga desa.

REFERENSI

- Muthahari, Murthada. 1995. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Sarlito, Sarwono W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.

Biografi Penulis 1



Fedianty Augustinah merupakan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi pada Prodi Administrasi Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak 1994 sampai saat ini. Pada tahun 1992 pernah menjadi seorang sekretaris perusahaan Exim negara Taiwan di Surabaya. Jabatan Akademik yang dimiliki saat ini yaitu Lektor. Pernah menjabat menjadi struktural Sekprodi Administrasi Bisnis (Tahun 2002-2006), menjadi Ketua Prodi (Tahun 2006-2010), Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Cendekia (Tahun 2008 – sampai sekarang), Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ. DR. Soetomo Sby (Tahun 2012 sampai 2016), Ketua Pusat Study Wanita Univ. Dr. Soetomo Surabaya (Tahun 2018 sampai sekarang).

Biografi Penulis 2



Agustiawan Djoko Baruno merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak 2007 sampai saat ini. Pada tahun 2007- 2009 pernah menjabat menjadi Sekretaris Rektor. Jabatan Akademik yang dimiliki saat ini yaitu Lektor. Disamping kesibukan mengajar pada mata kuliah Aplikasi Komputer dan Internet, E Commerce, Sosiologi dan Politik, Statistik Bisnis dan Manajemen Pemasaran juga aktif melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Jabatan selain menjadi dosen adalah sejak tahun 2010 sampai sekarang bertugas sebagai Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Dr. Soetomo.

Halaman ini sengaja dikosongkan

EVALUASI TEKNIS SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Aldea Noor Alina

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: aldea.noor.alina@unitomo.ac.id
Email korespondensi: aldea.noor.alina@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). RUTR sebagaimana dimaksud secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, maka dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) harus sesuai dengan prosedur yang telah dimuat dalam peraturan tersebut.

Prosedur tersebut antara lain untuk rencana tata ruang yang disusun oleh daerah kabupaten/kota perlu dilakukan evaluasi substansi rekomendasi Gubernur untuk memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, baik RTRW maupun RRTR kabupaten/kota.

Untuk mempercepat proses rekomendasi Gubernur baik RTRW maupun RRTR kabupaten/kota perlu dilakukan evaluasi oleh tim teknis sesuai mekanisme evaluasi substansi rekomendasi Gubernur dalam rangka persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota. Tim teknis ini bisa terdiri atas Aparatur Sipil Negara maupun tenaga ahli dengan latar belakang keilmuan yang ditunjuk oleh dinas yang berwenangan.

Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya Provinsi Jawa Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

yang mengemban amanat evaluasi rencana tata ruang harus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam melakukan evaluasi rancangan rencana tata ruang kabupaten/kota. Bersama dengan tenaga ahli individual evaluasi teknis rencana tata ruang melalui keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli Individual dalam rangka Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang.

Tulisan ini berisi mengenai kajian, metodologi, dan pengalaman yang didapatkan penulis selama menjadi tenaga ahli individual evaluasi teknis rencana tata ruang untuk substansi spasial atau peta sesuai dengan bidang keahlian penulis sebagai dosen Teknik Geomatika di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020.

2. KAJIAN TEORI

Dalam kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang terdapat beberapa kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan dan standar teknis pengerjaan. Beberapa kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan umum yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

- a. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- b. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

- c. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- d. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah dua puluh tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

Saat dilaksanakan kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih berlaku. Namun, saat ini Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten menurut Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 1 Tahun 2018 ini adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Muatan RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu dua puluh tahun.
 - b. Rencana struktur ruang, meliputi:
 - sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan
 - sistem jaringan prasarana wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota.
 - c. Rencana pola ruang, meliputi:
 - kawasan lindung; dan
 - kawasan budidaya.
 - d. Penetapan kawasan strategis
Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan bagian wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota yang penataan ruangnya diprioritaskan.
 - e. Arahan pemanfaatan ruang
Arahan pemanfaatan ruang merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang.
 - f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - indikasi arahan peraturan zonasi untuk wilayah daerah provinsi dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah daerah kabupaten atau kota;
 - arahan sanksi untuk wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kota.
- Selain rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, OPD provinsi juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan terhadap substansi rencana detail tata ruang yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota. Rencana detail tata ruang

kabupaten/kota memiliki skala kedetilan data spasial hingga 1:5000 dan terbatas pada suatu Batas Wilayah Perencanaan (BWP) tertentu. Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan pemanfaatan ruang.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Merupakan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman atau standar teknis penyusunan data spasial atau basis data peta yang turut menjadi keluaran proses rencana tata ruang selain dokumen materi teknis dan peraturan daerah. Dalam peraturan ini diberikan standar ketelitian peta yang memuat ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, serta kelengkapan muatan peta.

3. METODE PELAKSANAAN

kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang memiliki sub kegiatan konsultasi teknis. Dalam tahapan konsultasi teknis, evaluasi dilakukan terhadap substansi Ranperda, materi teknis, dan peta. Kegiatan evaluasi teknis dilakukan oleh tenaga ahli yang berbeda sesuai dengan substansi yang perlu dievaluasi. Untuk muatan materi perencanaan wilayah dokumen tata ruang dilakukan oleh tenaga ahli perencanaan wilayah kota. Sedangkan penulis sebagai tenaga ahli pemetaan melakukan evaluasi terhadap substansi spasial atau peta dari RTR agar saling berkesesuaian antara substansi pada Ranperda dan materi teknis serta komplementer dengan hierarki RTR di atasnya.

- Evaluasi substansi peta meliputi beberapa poin sebagai berikut.
1. Kelengkapan berita acara peta dasar oleh Badan Informasi Geospasial;
Berita acara Badan Informasi Geospasial perlu terlampir sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengajuan konsultasi teknis dan permohonan rekomendasi Gubernur.
 2. Kelengkapan peta batas wilayah administrasi berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
Peta batas administrasi yang digunakan pada rencana tata ruang akan ditampilkan dengan batas administrasi yang sesuai dengan Permendagri yang dikeluarkan untuk menetapkan batas masing–masing wilayah kabupaten atau kota.
 3. Kesesuaian peta rencana tata ruang dengan hierarki di atasnya dalam materi teknis dan Ranperda;
Peta rencana struktur ruang maupun pola ruang dari rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang harus memperhatikan arahan peta rencana tata ruang lain yang berada pada hierarki atasnya sehingga antardata rencana tata ruang bersifat saling berkesesuaian. Kesesuaian peta rencana tata ruang dengan hierarki di atasnya dilakukan dengan melakukan *superimpose* atau pertampalan dengan masing–masing data rencana struktur maupun rencana pola ruang.
 4. Kelengkapan album peta rencana tata ruang BWP;
Layout dan sistematika penyajian peta harus menyesuaikan dengan tata cara penyusunan yang mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat ini atau peraturan lain yang berlaku. Penyajian peta harus disesuaikan dengan pedoman tersebut sehingga apabila ada yang tidak sesuai dengan standar penyajian album peta dari pedoman, maka akan menjadi catatan dari evaluator.
 5. Kesesuaian peta rencana detail tata ruang dengan peraturan perundang–undangan dan/atau SK Kementerian/Instansi terkait (SK Kehutanan, SK Baku Sawah, dan peta lain yang terkait);
Rencana struktur ruang maupun pola ruang dari rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang harus mengakomodasi peraturan perundang–undangan maupun SK Kementerian/Instansi terkait.

Aturan peraturan perundang-undangan atau SK Kementerian/Instansi yang tidak diakomodir oleh kabupaten/kota dalam perencanaan akan menjadi catatan evaluasi dari tim evaluator.

Untuk substansi rencana struktur ruang maupun pola ruang yang tidak memiliki peraturan maupun surat keputusan yang menjadi dasar pedoman maka akan dievaluasi berdasarkan substansi yang ada di Rencana Tata Ruang dengan hierarki yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan dan/atau SK Kementerian/Instansi terkait secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa peraturan perundang-undangan dan/atau SK Kementerian/Instansi yang digunakan dalam evaluasi peta revisi rencana detail tata ruang kabupaten/kota

URAIAN SUBSTANSI / MUATAN		PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / ATAU SK KEMENTERIAN / INSTANSI TERKAIT
RENCANA STRUKTUR RUANG		
1.	Sistem Pusat Pelayanan	
	a.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
		Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
	b.	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
		Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
	c.	Pusat Lingkungan
		Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
2.	Sistem Jaringan Transportasi	
	a.	Sistem Jaringan Jalan
		1) Jaringan Jalan Nasional
		▪ Jalan Bebas Hambatan / Tol
		PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN (Lampiran III)
		▪ Jalan Arteri Primer
		Kepmen PUPR No. 248 Tahun 2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1
		▪ Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
		Kepmen PUPR No. 248 Tahun 2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1

URAIAN SUBSTANSI / MUATAN			PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / ATAU SK KEMENTERIAN / INSTANSI TERKAIT
		▪ Jalan Strategis Nasional	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
		2) Jaringan Jalan Provinsi	
		▪ Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/128/KPTS/013/2016 Tentang Ruas Jaringan Jalan Primer Sebagai JKP-2 dan JKP-3
		▪ Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/128/KPTS/013/2016 Tentang Ruas Jaringan Jalan Primer Sebagai JKP-2 dan JKP-3
		▪ Jalan Strategis Provinsi	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
		3) Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		▪ Jalan Arteri Sekunder**	Perda atau Ketetapan Walikota terkait yang mengatur jaringan jalan arteri sekunder dalam wilayah Kota
		▪ Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	Perda atau Ketetapan Bupati/Walikota terkait yang mengatur jaringan jalan kolektor 4 (JKP-4) dalam wilayah Kabupaten/Kota
		▪ Jalan Kolektor Sekunder**	Perda atau Ketetapan Walikota terkait yang mengatur jaringan jalan kolektor sekunder dalam wilayah Kota
		▪ Jalan Lokal Primer	Perda atau Ketetapan Bupati terkait yang mengatur jaringan jalan lokal primer dalam wilayah Kabupaten
		4) Terminal Penumpang	Permen Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
		▪ Terminal Penumpang Tipe A	Kepmen Perhubungan No. 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A
		▪ Terminal Penumpang Tipe B	Draft SK Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Terminal Tipe B

URAIAN SUBSTANSI / MUATAN			PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / ATAU SK KEMENTERIAN / INSTANSI TERKAIT
		B	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Penumpang Tipe C 	Perda atau Ketetapan Bupati/Walikota yang mengatur Terminal Penumpang Tipe C dalam wilayah Kabupaten/Kota
	b.	Sistem Jaringan Kereta Api	Kepmen Perhubungan No. KP 2128 Tahun 2018 Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
	c.	Sistem Jaringan Transportasi Laut	
		1) Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
		2) Pelabuhan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permen Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
		3) Pelabuhan Angkutan	Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
	d.	Sistem Jaringan Transportasi Udara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
3.	Sistem Jaringan Prasarana		
	a.	Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan	
		1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
		2) Jaringan Penyalur Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmen ESDM No. 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan RUPTL PT. PLN 2018 – 2027 ▪ Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
	b.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
	c.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepmen PUPR Nomor 550/KPTS/M/2015 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya

URAIAN SUBSTANSI / MUATAN			PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / ATAU SK KEMENTERIAN / INSTANSI TERKAIT
			Air Wilayah Sungai Bengawan Solo
RENCANA POLA RUANG			
1.	Zona Lindung		
	a.	Zona Hutan Lindung	▪ SK Menteri LHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Kawasan Hutan
	b.	Zona Perlindungan Setempat	
		1) Zona Sempadan Pantai	Permen Kelautan Perikanan No. 21/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai
		2) Zona Sempadan Sungai	Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau
	c.	Zona RTH Kota	Permen PU No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
	d.	Zona Konservasi	▪ SK Menteri LHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Kawasan Hutan
	e.	Zona Lindung Lainnya	
		1) Zona Ekosistem Mangrove	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
		2) Zona Lindung Geologi	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
2.	Zona Budidaya		
	a.	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang berlaku.
	b.	Zona Peruntukan Lainnya	
		1) Zona Hutan Produksi	SK Menteri LHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Kawasan Hutan

URAIAN SUBSTANSI / MUATAN		PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / ATAU SK KEMENTERIAN / INSTANSI TERKAIT
	2) Zona Hutan Rakyat	▪ SK Menteri LHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Kawasan Hutan
	3) Zona Pertanian	SK Menteri ATR/KaBPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019
	4) Zona Perikanan	Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG		
1.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang di BWP	▪ PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN (Lampiran XI) ▪ Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Tahun 2011 – 2031
2.	Perwujudan Rencana Pola Ruang di BWP	
3.	Perwujudan Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya	
4.	Perwujudan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	
PERENCANAAN KAWASAN		
	Perundangan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi untuk perencanaan di wilayah yang spesifik	▪ Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ▪ Perpres No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusilo, BTS, Selongkar Wilis, dan Lintas Selatan

Keterangan : *) Berlaku untuk wilayah Kabupaten saja

***) Berlaku untuk wilayah Kota saja

6. Kesesuaian peta dengan materi teknis dan ranperda rencana tata ruang.

Kesesuaian peta dengan materi teknis dan ranperda dilakukan dengan melakukan pengecekan konsistensi hitungan metrik (panjang maupun luasan) dan nomenklatur rencana struktur ruang dan kawasan, zona, maupun subzona pada rencana pola ruang antara data peta dengan hitungan metrik maupun nomenklatur yang tertulis pada materi teknis dan ranperda.

Perhitungan luasan rencana pola ruang disajikan dalam bentuk neraca yang membandingkan luasan masing – masing kawasan, zona, maupun subzona rencana pola ruang yang tercantum pada materi teknis, ranperda, dan hasil perhitungan luasan rencana pola ruang data peta berupa file *.shp (*shapefile*) maupun *.gdb (*geodatabase*). Luasan yang berbeda akan ditandai dan perlu dilakukan penyesuaian antara data yang berbeda sehingga luasan menjadi konsisten.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan evaluasi teknis subtansi tata ruang untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur menghasilkan beberapa masukan secara umum sebagai berikut:

1. Luasan wilayah perencanaan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota dalam narasi Materi Teknis, Ranperda, dan Peta tidak sama. Angka luasan perlu disamakan sehingga selaras ketika membaca naskah rencana dan peta. Hasil Evaluas perbedaan luasan wilayah ditunjukkan pada Tabel 2.
2. Terdapat subtansi peraturan atau kebijakan tata ruang di atasnya yang belum diakomodir. Sebagai contoh:
 - Ruas jalan JKP-1 beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan dengan Jalan Kolektor Primer-1 ruas 087 dan 088 berdasarkan Kepmen PUPR 248 Tahun 2015;
 - Ruas jalan JKP-2 beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016 mengenai Jalan yang masuk sebagai kewenangan Provinsi;

3. Luasan Substansi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak memenuhi 20% luasan kabupaten/kota, serta tidak adanya upaya pemenuhan RTH dalam substansi dokumen Rencana Tata Ruang.
4. Peralihan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan budidaya lain seperti perumahan maupun perdagangan jasa, serta lokasi kawasan pertanian yang tidak sesuai ketetapan arahan Baku Sawah pada SK Menteri ATR/KaBPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019.
5. Luasan kawasan hutan pada Kabupaten/Kota yang berbeda dengan data kawasan hutan SK Menteri LHK No. 8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang Kawasan Hutan yang dipakai dalam arahan rencana kawasan hutan RTRW Provinsi Jawa Timur.

5. KESIMPULAN

Kegiatan evaluasi teknis substansi tata ruang untuk muatan peta pada tahun 2020 masih mengikuti standar peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja serta peraturan – peraturan turunannya. Dengan dikeluarkan undang – undang penataan ruang yang baru maka akan ada perubahan pada teknis evaluasi tata ruang Kabupaten/ Kota di tingkat Provinsi, dan perlu ada sosialisasi terkait perubahan standar dan teknis evaluasi nantinya ke Kabupaten/Kota.

Acknowledgement

Ucapan Terimakasih yang sangat besar disampaikan kepada Seksi Pemanfaatan, Bidang Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang telah memberi kepercayaan pada penulis dengan menunjuk sebagai tenaga ahli evaluasi teknis tata ruang.

REFERENSI

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031, (2012).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, (2018).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, (2018).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2007).

Tabel 2. Contoh Hasil Evaluasi Perbedaan Luasan Rencana Tata Ruang antara Materi Teknis, Ranperda, dan Peta

LUASAN RENCANA POLA RUANG di RANPERDA				LUASAN RENCANA POLA RUANG di MATERI TEKNIS				LUASAN RENCANA POLA RUANG di SHP			
ORDE 01	ORDE 02	Luas (Ha)	Persen (%)	ZONA	SUB ZONA	Luas (Ha)	Persen (%)	ZONA	SUB ZONA	Luas (Ha)	Persen (%)
Badan Air	Badan Air	tidak ada		Badan Air	Badan Air	117,61	1,76	Badan Air	Badan Air	117,61	1,76
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	74,14		Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	74,14	1,11	Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	74,14	1,11
Sekitar Mata Air	Sekitar Mata Air	4,27		Sekitar Mata Air	Sekitar Mata Air	4,27	0,06	Sekitar Mata Air	Sekitar Mata Air	4,27	0,06
Penyangga	Penyangga	13,21		Penyangga	Penyangga	13,21	0,20	Penyangga	Penyangga	13,21	0,20
Hutan Lindung	Hutan Lindung	42,62		Hutan Lindung	Hutan Lindung	42,62	0,64	Hutan Lindung	Hutan Lindung	42,62	0,64
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	257,06		Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	257,06	3,85	Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	257,06	3,86
Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman	64,95		Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman	64,95	0,97	Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman	64,95	0,97
	Taman Kecamatan	55,98			Taman Kecamatan	55,98	0,84		Taman Kecamatan	55,98	0,84
	Taman Kelurahan	102,96			Taman Kelurahan	102,96	1,54		Taman Kelurahan	102,96	1,54
	Taman Kota	4,72			Taman Kota	4,72	0,07		Taman Kota	4,72	0,07

LUASAN RENCANA POLA RUANG di RANPERDA			
ORDE 01	ORDE 02	Luas (Ha)	Persen (%)
	Hutan Kota	38,30	
Perumahan	Rumah Kepadatan Rendah	849,24	

LUASAN RENCANA POLA RUANG di MATERI TEKNIS			
ZONA	SUB ZONA	Luas (Ha)	Persen (%)
	Hutan Kota	38,30	0,57
Perumahan	Rumah Kepadatan Rendah	849,24	12,74

LUASAN RENCANA POLA RUANG di SHP			
ZONA	SUB ZONA	Luas (Ha)	Persen (%)
	Hutan Kota	38,30	0,57
Perumahan	Rumah Kepadatan Rendah	849,24	12,74

Biografi Penulis



Aldea Noor Alina, ST., MT. adalah pengajar di Teknik Geomatika Fakultas Teknik Universitas Dr. Seotomo Surabaya bidang keahlian analisis spasial kewilayahan, perencanaan wilayah dan kota, kebijakan wilayah serta kadaster. Di samping sebagai akademisi, juga terlibat sebagai praktisi dan tenaga ahli pekerjaan perencanaan pengembangan wilayah. Pekerjaan tersebut antara lain penyusunan rencana tata ruang wilayah, kajian pertanahan, kajian rawan bencana, dan pembuatan peta dasar, peta tematik, hingga peta rencana kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENYULUHAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA MELALUI MANAJEMEN KEARSIPAN DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Nihayatus Sholichah¹, Ika Devy Pramudiana², Fedianty Augustinah³

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: ninis.fadillah@gmail.com

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: ik.pramudiana@gmail.com

³Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: fediaugust@gmail.com

Email korespondensi: ninis.fadillah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Arsip mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan, oleh sebab itu untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang pengelolaan arsip. Peranan arsip yang begitu penting bagi kehidupan berorganisasi, maka keberadaan arsip perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga keberadaan arsip di kantor benar-benar menunjukkan peran yang sesuai dan dapat mendukung penyelesaian pekerjaan yang dilakukan semua personil dalam organisasi/instansi. Perhatian yang perlu diberikan kepada arsip yang dimiliki organisasi berupa sistem pengelolaan yang benar dan efektif sehingga dengan sistem pengelolaan tersebut akan dapat membantu mendukung efisiensi kerja dalam hal penyediaan informasi.

Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. Semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. Permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat. Permasalahan pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi milik organisasi besar saja, melainkan juga organisasi kecil, misalnya organisasi di tingkat pemerintah desa yang

memiliki tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat yang permintaannya tidak mengenal waktu / jam kerja.

Arsip adalah rekaman informasi yang dibuat oleh organisasi dan disimpan dengan menggunakan berbagai media. Arsip berperan penting sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan media pengawasan. Mengingat pentingnya peran arsip sebagai bukti akuntabilitas dan dasar dalam pengambilan keputusan, maka arsip organisasi haruslah dikelola dengan baik. Tujuan pengelolaan arsip adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, menjamin keselamatan dan keamanan arsip, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Rosalin, 2017)

Pengelolaan arsip meliputi: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Dalam kegiatan pengelolaan arsip, diperlukan klasifikasi dan indeks agar arsip dapat diatur dan disimpan dengan benar serta ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip yaitu: sistem abjad, sistem subyek, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem wilayah. Dalam penyimpanannya, arsip dapat disimpan secara horisontal (bertumpuk), vertikal (berderet ke belakang), atau lateral (berderet menyamping). Pengelolaan arsip membutuhkan beberapa peralatan dan perlengkapan seperti: *filling cabinet*, *rotary filling*, lemari arsip, rak arsip, map arsip, *guide*, *odner*, *stapler*, perforator, numerator, *box* arsip, dan label. Pemilihan kualitas peralatan arsip berpengaruh terhadap jangka waktu penyimpanan (Rosalin, 2017)

Untuk menghindari penumpukan arsip, perlu ditetapkan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 14 Tahun 2015, ditentukan masa simpan 2 tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna administrasi, 5 tahun untuk yang memiliki nilai guna hukum, dan 10 tahun untuk arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan.

Meski kearsipan memiliki peran penting di dalam administrasi, tetapi saat ini masih banyak kantor yang tidak melakukan penataan arsip secara baik. Masih banyak dijumpai arsip yang hanya ditumpuk di gudang sehingga mudah dan cepat rusak, serta sulit untuk ditemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab buruknya penataan arsip adalah

rendahnya kesadaran para pegawai khususnya pimpinan akan arti penting arsip dalam administrasi. Kemungkinan lain adalah tidak tersedianya tenaga khusus atau ahli dalam bidang kearsipan (Wursanto, 1991)

Di tingkat Desa, para perangkat desa dituntut untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, termasuk kebutuhan akan informasi. Salah satu faktor yang dapat diperbaiki adalah tata kelola pengarsipan. Dengan tata kelola arsip yang baik, kecepatan pelayanan dapat ditingkatkan dan pengambilan keputusan sesuai dengan sasaran. Buruknya pengelolaan arsip di Desa pasti akan menjadi kendala keterlambatan proses layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa juga perlu memperhatikan pengelolaan arsip jika ingin sukses dalam melayani publik. Layanan dapat diberikan dengan cepat apabila arsip tertata dengan baik.

Setiap Pemerintah Desa pasti mempunyai kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat melalui administrasi desa, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte kepemilikan tanah, dan lain lain. Dengan jumlah penduduk yang relatif banyak pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan cepat dan rapi. Pekerjaan kearsipan sangat berpengaruh terhadap proses administrasi yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat / publik.

Adapun fungsi arsip itu sendiri dalam administrasi pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus, memberikan perlindungan serta kepastian atas pelayanan kepada masyarakat desa. Aparatur desa itu sendiri merupakan ujung tombak dalam proses pelayanan publik. Sehingga diharapkan aparatur desa mampu berkontribusi dalam mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dan mampu memberdayakan pengelolaan arsip desa sehingga arsip desa dapat berfungsi dan bermanfaat dalam melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat sehari-hari. Pelayanan masyarakat menjadi tugas utama dari pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, karena pada dasarnya keberadaan pemerintahan desa adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hasil akhirnya adalah terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat desa.

Permasalahan klasik masih sering terjadi seperti hilangnya arsip – arsip penting, kecepatan menemukan arsip membutuhkan waktu relatif lama, serta seringnya arsip aktif dan inaktif tercampur sehingga ketika dibutuhkan sulit ditemukan. Permasalahan lainnya, yaitu masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola arsip dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka disepakati diberikan Penyuluhan Manajemen Kearsipan Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pelayanan Administrasi

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pelayanan merupakan bagian dari administrasi dan salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya yang bersangkutan dengan pemerintah, untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

2.2 Manajemen Kearsipan

2.2.1 Pengertian manajemen kearsipan

Agar kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan sistem kearsipan agar tujuan organisasi itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sistem kearsipan dikenal dengan istilah manajemen kearsipan yaitu rangkaian kegiatan mengelola seluruh unsur yang digunakan atau terlibat di

dalam proses pengurusan fungsi-fungsi, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan terhadap arsip dan sumber daya yang ada untuk pengurusan kearsipan seperti pegawai kearsipan (arsiparis, *archivist*), fasilitas kearsipan dan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kearsipan (Zulkifli, 2003).

2.2.2 Pengertian kearsipan

Menurut Wursanto arsip adalah kumpulan yang disimpan secara teratur karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan agar cepat di temukan kembali.

Menurut Amsyah manajemen kearsipan adalah pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian penyimpanan dan pemusnahan. Kearsipan mempunyai peranan penting sebagai pusat ingatan, sebagai pusat informasi, sebagai alat pengawasan, yang sangat di perlukan dalam setiap organisasi, perencanaan, penganalisaan, pengembangan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban.

1. Jenis-jenis arsip

Menurut Wursanto membagi jenis arsip di lihat dari beberapa segi di antaranya:

- a. Arsip keuangan. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan seperti laporan keuangan, surat penagihan.
- b. Arsip kepegawaian. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian, seperti daftar riwayat pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai.
- c. Arsip pemasaran. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah pemasaran seperti surat penawaran, surat pesanan, daftar harga barang, surat kebutuhan permintaan barang.
- d. Arsip menurut bentuk dan wujudnya
 1. Surat. Setiap lembaran kertas yang berisi informasi atau keterangan yang berguna bagi penyelenggara kehidupan organisasi seperti naskah perjanjian, notulen rapat, kwitansi, naskah berita acara dan kartu pegawai.
 2. Pita rekaman. Yaitu media yang dapat diputar berulang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- e. Arsip menurut sifat kepentingannya
 1. Arsip Nonesensial yaitu arsip yang tidak memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama, contohnya: antara lain, kartu undangan, pengumuman hari libur dan lain-lain.
 2. Arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan, tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang masih dipergunakan atau dibutuhkan.
 3. Arsip penting yaitu arsip yang masih mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan dan dokumentasi.

f. Berdasarkan nilai guna

Di tinjau dari segi kepentingan arsip dapat dibedakan atas:

1. Nilai guna primer
Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk lembaga yang menghasilkan arsip, nilai guna primer meliputi:
 - (a) Nilai guna administrasi yaitu nilai guna arsip yaitu didasarkan pada kegunaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga arsip.
 - (b) Nilai guna hukum yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah.
 - (c) Nilai guna kegunaan yaitu arsip yang berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan.
 - (d) Nilai guna ilmiah dan teknologi yaitu arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat hasil penelitian atau penelitian terapan.
 - (e) Nilai guna sekunder adalah arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau kepentingan umum serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggung jawaban secara nasional.
 - (f) Nilai guna pembuktian yaitu arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga tersebut diciptakan dan dikembangkan.

(g) Nilai guna informasi adalah arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan.

2. Peranan arsip

Arsip berperan penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat, dan benar harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan (Barthos, 2005). Kearsipan mempunyai jangkauan yang amat luas yaitu baik sebagai alat untuk membantu daya ingatan manusia maupun dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Selain itu, kegunaan arsip antara lain:

- (a) endapan informasi kegiatan wujud dari instansi,
- (b) pendukung kearsipan bagi pembuat keputusan memenuhi ketentuan yang berlaku,
- (c) sarana peningkatan efisiensi operasional instansi, dan
- (d) bukti eksistensi instansi.

3. Fungsi manajemen kearsipan

Manajemen kearsipan dilakukan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang bentuknya yaitu aktivitas-aktivitas perencanaan kearsipan, pengorganisasian bidang kearsipan, penyusunan personalia (staf) bagian kearsipan, pengarahan kerja pegawai kearsipan dan pengawasan terhadap kegiatan pokok (operasional) kearsipan.

Menurut teori di atas, fungsi-fungsi manajemen kearsipan antara lain:

- (a) Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan merumuskan dan menentukan berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan, kita harus benar-benar memikirkan hal-hal buruk atau kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang di rencanakan, serta memikirkan alternatif yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi. Fungsi perencanaan dalam bidang kearsipan dilakukan dengan menyusun pola klasifikasi arsip, kode, dan indeks, menyusun pedoman pemrosesan surat masuk dan keluar,

menyusun jadwal retensi arsip, dan perencanaan fasilitas atau pembekalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas kearsipan.

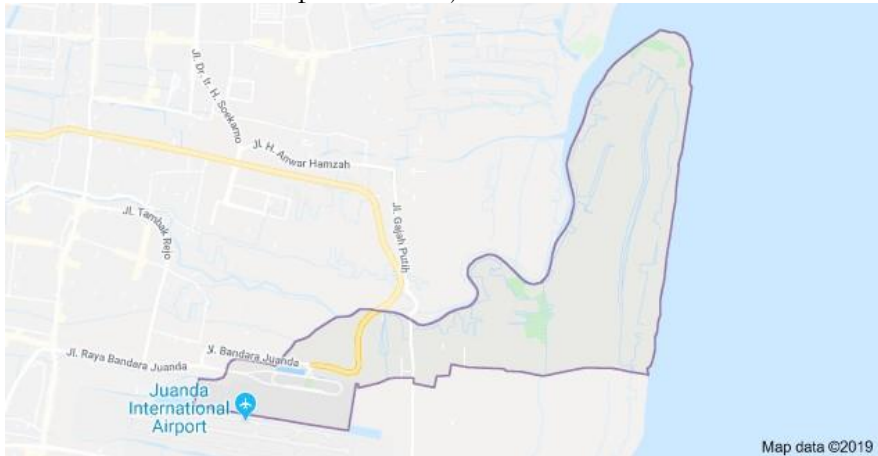
- (b) Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian yang merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun fungsi pengorganisasian kearsipan dilakukan dengan melaksanakan pembagian kerja, menentukan hubungan kerja intern unit kearsipan, dan antara unit kearsipan dengan unit pengelola di dalam organisasi.
- (c) Fungsi penyusunan staf. Fungsi manajemen dalam pengisian jabatan didefinisikan sebagai pengisian jabatan dalam struktur organisasi dengan cara mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mendaftar tenaga kerja yang ada, merekrut, memilih, menepatkan, promosi, menilai, memberi imbalan, dan melatih orang yang diperlukan. Proses *staffing* dapat dipandang sebagai sebuah prosedur langkah demi langkah yang berkesinambungan untuk menjaga agar organisasi selalu memperoleh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat pada waktu yang tepat.
- (d) Fungsi pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian menentukan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur signifikansi tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan. Sedangkan fungsi pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kearsipan berguna untuk menunjang terciptanya sistem kearsipan yang baik. Oleh karena itu orang yang mengelola sebuah sistem harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kearsipan dengan optimal demi tercapainya tujuan organisasi.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian masyarakat dilaksanakan selama satu bulan. Tempat pelaksanaan kegiatan di Kantor Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1 Peta lokasi mitra (Sumber: *Sidoarjo.Bps.Go.Id*, n.d.)

3.2 Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan perangkat desa di Kecamatan Sedati Sidoarjo. Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

Tahap 1 Perencanaan.

Pada tahap perencanaan ini, merupakan tahapan persiapan sebelum program pengabdian masyarakat dilaksanakan, yaitu:

1. Persiapan kegiatan berupa survey dan kunjungan pendahuluan ke Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Sidoarjo
2. Melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola arsip di ke dua desa tersebut, melalui observasi dan wawancara. Observasi diperlukan untuk melihat proses pengarsipan dan sikap perilaku pelaksanaannya. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi serta solusi yang sudah dilakukan
3. Mempersiapkan materi penyuluhan

Tahap 2 Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan ini, merupakan tahap pelaksanaan program pengabdian masyarakat setelah dilakukan persiapan yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan
 - a. Mempersiapkan materi dan penggandaan materi
 - b. Pelaksanaan Penyuluhan, dilakukan penyuluhan tentang tata kelola arsip yang efektif dan efisien melalui *focus group discussion* (FGD) dan demonstrasi penggunaan peralatan arsip untuk memberikan pemahaman tentang fungsi peralatan dan manfaatnya bagi kegiatan pengarsipan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang pengelolaan arsip dan cara-cara implementasinya di lapangan.

Tahap 3 Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini, merupakan tahap penilaian atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan, yaitu:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana PPM (Program Pengabdian Masyarakat) kepada perangkat Desa yang ada di Kantor Desa Segorotambak Kecamatan Sedati dengan kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan ini adalah:
 - a. Apakah perangkat desa yang mengikuti penyuluhan, dapat memahami dengan jelas materi yang diberikan.
 - b. Apakah perangkat desa yang ada di Kantor Desa Segorotambak Kecamatan Sedati telah mampu membuat dan mempraktekkan kegiatan proses kearsipan dengan baik dan benar sesuai dengan materi penyuluhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi diuraikan sebagai berikut.

1. Melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola arsip di ke dua desa tersebut, melalui observasi dan wawancara. Observasi diperlukan untuk melihat proses pengarsipan dan sikap perilaku pelaksananya. Sedangkan wawancara dilakukan

untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi serta solusi yang sudah dilakukan

2. Dilakukan penyuluhan tentang tata kelola arsip yang efektif dan efisien melalui *focus group discussion* (FGD) dan demonstrasi penggunaan peralatan arsip untuk memberikan pemahaman tentang fungsi peralatan dan manfaatnya bagi kegiatan pengarsipan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang pengelolaan arsip dan cara-cara implementasinya di lapangan.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana PPM kepada perangkat Desa yang ada di Kantor Desa Segorotambak Kecamatan Sedati dengan kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan ini



Gambar1. Wawancara dengan salah satu perangkat desa.



Gambar 2. Proses memasukkan data



Gambar 3. Memeriksa lemari tempat penyimpanan arsip.



Gambar 4. FGD (*Focus Group Discussion*) dengan perangkat desa.



Gambar 5. Demonstrasi/praktek dan Evaluasi.

5. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat penyuluhan peningkatan pelayanan administrasi desa melalui manajemen kearsipan di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah dapat dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari mitra dalam kegiatan pengabdian kepada Perangkat Desa berjalan sesuai yang diharapkan dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di waktu yang akan datang.

Acknowledgement

Penyusunan laporan pengabdian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, baik instansi maupun perorangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Fadjar Kurnia Hartati, MP, selaku Ketua LPM yang telah mensupport dana untuk tim pengabdian sehingga kegiatan penyuluhan dapat terlaksana dengan lancar.
2. Bapak Dr. Amirul Mustofa, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, yang memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan pengabdian dalam bentuk penyuluhan.
3. Semua Perangkat Desa yang ada di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dengan sabar mengikuti acara penyuluhan dari awal sampai akhir.

REFERENSI

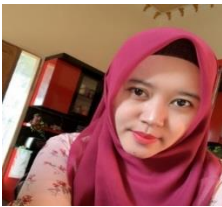
- Barthos, B. (2005). *Manajemen Kearsipan*. Bumi Aksara.
- Rosalin. (2017). *Manajemen Arsip Dinamis*. UB Press.
- Sidoarjo.bps.go.id. (n.d.).
- Wursanto. (1991). *Kearsipan 1*. Kanisius.
- Zulkifli, A. (2003). *Manajemen Sistem Informasi*. Renike Cipta.

Biografi Penulis 1



Nihayatus Sholichah, dosen di Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1995 – Sekarang. Pernah mengelola Program D3 Sekretaris di Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 1995-2000, dan saat ini menjadi Pengelola Jurnal Fakultas, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial (JIMPKS) UNITOMO.

Biografi Penulis 2



Ika Devy Pramudiana, dosen di Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, di Universitas Dr. Soetomo sejak tahun 2015-Sekarang. Saat ini sebagai editor Jurnal Ilmiah Manajaemen dan Kebijakan Sosial. Selain itu, juga pada Jurnal Agama dan Perubahan Sosial serta menjabat sebagai sekertaris di Unitomo Press.

Biografi Penulis 3



Fedianty Augustinah, dosen di Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak 1994 - sekarang. Tahun 1992, pernah menjadi sekretaris perusahaan Exim negara Taiwan di Surabaya. Jabatan Akademik yang dimiliki saat ini yaitu Lektor. Pernah menjabat menjadi struktural Sekprodi Admnistrasi Bisnis (2002-2006), menjadi Ketua Prodi (2006-2010), Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Cendekia (2008 – sekarang), Wakil Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UNITOMO (2012-2016), Ketua Pusat Study Wanita Univ. Dr. Soetomo Surabaya (2018 - sekarang).

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI METODE 3R (*REUSE, REDUCE, RECYCLE*) DI LINGKUNGAN PERUMAHAN LARANGAN MEGA DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Sutarmin¹, Sugiyanto²

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: soetarmin@unitomo.ac.id

²Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: sugiyanto@unitomo.ac.id

Email korespondensi: soetarmin@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pelaksanaan pembangunan baik skala lokal, regional maupun nasional akan lebih mudah dan berhasil jika kelompok-kelompok kecil masyarakat terlibat secara aktif dan mampu merumuskan sendiri tingkat kebutuhan dasarnya. Selain itu, masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunannya. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan mendorong kelompok-kelompok kecil masyarakat ini untuk dapat merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumahan Larangan Mega Asri, Kelurahan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur adalah salah satu Rukun Warga yakni RW 08 dari 9 RW yang ada di Desa Larangan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Masyarakat Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan sebagian masyarakat Desa Larangan yang memiliki kesadaran penuh untuk melakukan perubahan menuju kesejahteraan dengan konsep program yang disebut sebagai “Kampoeng Bermutu”. Konsep tersebut akan dilakukan secara konsisten dalam skala sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan warga RW 08 (Perumahan Larangan Mega Asri) sendiri. Konsep “Kampoeng Bermutu” merupakan suatu gerakan untuk memotivasi masyarakat di lingkungan Perumahan Mega Asri agar terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui kesadaran sendiri, bukan tarikan/ paksaan dari atas/penguasa.

“Kampoeng Bermutu” terdiri atas dua kata yaitu “Kampoeng” dan “Bermutu”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran tentang baik buruk dari suatu benda atau bicara tentang kadar, taraf atau derajat (misalnya kepandaian atau kecerdasan). Bermutu berarti baik mutunya, berbobot tulisannya, berkualitas barangnya, bertaraf. *Kampoeng* menunjuk pada kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni oleh orang yang berpenghasilan rendah). “Kampoeng Bermutu” bisa diartikan pula kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu tertelak di bawah kecamatan.

Berdasarkan kedua istilah tersebut, “Kampoeng Bermutu” merupakan suatu wilayah yang merupakan kesatuan administrasi terkecil di bawah kecamatan yang warganya memiliki kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup atau derajat sosialnya. Mengacu kepada pendekatan tersebut, yang dimaksud dengan “Kampoeng Bermutu” sebuah program untuk (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bertumpu pada gerakan kesadaran masyarakat untuk hidup dan berfikir secara sehat, (2) kesadaran terhadap kemandirian ekonomi dan pola konsumsi pangan yang berorientasi pada Keragaman, Keamanan dan Kandungan Gizi (K3G), (3) kesadaran untuk menghargai dan menjaga keberagaman warga, baik budaya, etnis, sosial, dan lain-lain, (4) kesadaran untuk mempertahankan dan melaksanakan nilai kebe-naran universal, (5) kesadaran terhadap kebutuhan akan kelestarian dan pelestarian lingkungan, (6) kesadaran terhadap kebutuhan akan keamanan kolektif lingkungan, serta (7) kesadaran untuk memperoleh pengetahuan yang memadai.

“Kampoeng Bermutu” merupakan Kristalisasi ide dan kebutuhan dasar yang diuraikan dalam rencana program. Sebagai kristalisasi ide, “Kampoeng Bermutu” harus senantiasa menjadi pegangan warga dalam melaksanakan nilai-nilai bersama.

1.2. Permasalahan dan Analisis

Permasalahan yang terjadi di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur selain disebabkan faktor internal juga disebabkan oleh faktor eksternal (faktor makro) yang berasal tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar

mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi serta tidak dicari sumber penyebab masalah.

Permasalahan utama yang terkait dengan program pembangunan di Wilayah RW 08 Desa Larangan, Kecamatan Candi Sidoarjo adalah bahwa pelaksanaan program pembangunan tidak direncanakan secara matang terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak ada dokumen perencanaan pembangunan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan kondisi sesaat dan hanya merupakan pemikiran beberapa pengurus RW saja dan belum melibatkan elemen masyarakat yang lain.

Adapun permasalahan teknis yang dihadapi oleh masyarakat Rukun Warga (RW) 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai berikut.

- a. Di wilayah sekitar perumahan dan daerah-daerah atasnya telah beralih fungsi dari sawah menjadi perumahan sehingga daerah resapan berkurang akibatnya sering terjadi banjir saat musim penghujan.
- b. Lokasi perumahan berdekatan dengan pasar larangan, pasar burung, pasar loak, dan terminal Sidoarjo serta rel kereta api sehingga sangat rawan terhadap keamanan/pencurian.
- c. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian warga karena pola makan yang kurang sehat serta sanitasi lingkungan yang kurang bagus.
- d. Sebagian warga mempunyai jiwa bisnis, namun potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal serta belum ada lembaga yang representatif yang mewadahi kreativitas warga tersebut.
- e. Warga perumahan Larangan Mega Asri Candi, Sidoarjo, Jawa Timur berasal dari berbagai macam suku, etnis, agama, dan golongan sehingga rentan terjadi konflik sosial.

Adapun model analisis yang digunakan adalah analisis *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* yaitu dengan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal Perumahan Larangan Mega Asri. Dengan analisis *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* ini dapat dirumuskan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), serta tantangan/ancaman (*threaths*) yang akan dihadapi oleh warga Perumahan

Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo.

Berdasarkan hasil analisis *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* tersebut, selanjutnya akan dapat dirumuskan program dan kegiatan yang tepat. Dengan program dan kegiatan yang sesuai akan mempercepat tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3. Target

Secara umum, target penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai *gaiden* (acuan) bagi Pengurus Rukun Warga dan serta unit-unit organisasi terkait di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Secara lebih khusus, penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo ini bertujuan agar Pengurus RW/RT, unit-unit organisasi di lingkungan Perumahan, warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur serta *stakeholder* terkait memiliki kesamaan pandangan dan pijakan dalam melakukan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Jadi, dengan tersusunnya visi, misi, dan program Kerja “Kampoeng Bermutu” dapat dipakai acuan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Perumahan Larangan Mega Asri dalam kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur.
- b. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi diri Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di lingkungannya.
- c. Mempercepat proses tercapainya tujuan “Kampoeng Bermutu”.
Adapun manfaat penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Candi Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai berikut.
 - a. Memberi arah kegiatan pembangunan di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo.
 - b. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

1.4. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) dari kegiatan penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur ini berupa dokumen Perencanaan Pembangunan baik berupa program fisik maupun non fisik yang berasal dari usulan pengurus RW, Pengurus RT, Unit-unit organisasi di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur serta *stakeholder* lainnya yang dijarinng dengan pendekatan partisipatif.

2. Landasan Teori

2.1. Arti Penting Pemberdayaan

Menurut Rosmedi (Rosmedi and Risyanti 2006) arti pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan. Berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.

Menurut (Sugarto 2005) secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar langkah pemberdayaan dapat dilakukan secara optimal? Menurut (Moeljarto 1993) mengemukakan setidaknya terdapat 6 langkah yang perlu diupayakan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat.

- a. Mengingat pemberdayaan bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat, maka langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial politik.
- b. Perlu ditumbuhkan kesadaran dan langkah reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup.
- c. Perlu ditanamkan rasa kesamaan atau egalitarisasi dan pemahaman bahwa kemiskinan atau ketidakberdayaan terjadi bukan karena takdir melainkan penjiwaan dari konstruksi sosial.
- d. Merealiskan pembangunan dengan melibatkan masyarakat kecil secara penuh.
- e. Perlu adanya pembangunan sosial budaya pada masyarakat miskin, artinya pada masyarakat kecil perlu ditanamkan nilai-nilai positif seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas serta kualitas kerja dan sebagainya.
- f. Perlunya redistribusi infrastruktur pembangunan secara merata.

Menurut (Sudarmanto dkk 2020), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat karya (Zubaedi 2013), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Dengan demikian jenis kegiatan pemberdayaan atau model pengembangan kegiatan yang sesuai haruslah mengacu kepada kemampuan masyarakat, aspirasi dan kesesuaian dengan kondisi lahan serta prospek pengembangan di masa yang akan datang.

2.2. Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan

Menurut (Mardikanto 2012) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan di antaranya:

- a. keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada kejelasan tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
- b. masalah efektivitas pemberdayaan kedisiplinan, keseriusan serta sikap profesional di kalangan para fasilitator;

- c. adanya kemauan dan partisipasi untuk ikut terlibat dalam konteks pengabdian pemberdayaan tergantung pada sejauh mana masyarakat diberi kesempatan dalam proses perumusan tujuan program dan pemilihan mereka yang terlibat di lapangan;
- d. adanya pemanfaatan kombinasi antara pengetahuan dan informasi baik itu dari dalam maupun di luar masyarakat yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan;
- e. perlu lebih dipertimbangkan masalah faktor budaya masyarakat dengan harapan karena bisa mengefektifkan kegiatan pemberdayaan;
- f. kalau sistem administrasi pemerintahan bersifat desentralisasi, maka tentu hal ini dapat berpengaruh pada lebih meningkatnya partisipasi masyarakat;
- g. untuk lebih mengefektifkan klien (penerima manfaat) dengan para fasilitator maka perlu lebih diperhatikan penggunaan pendekatan gender dalam kegiatan pemberdayaan;
- h. kelihatan pemberdayaan akan lebih efektif jika berlangsung dalam masyarakat yang lebih tertutup dalam arti sering terjadi kontak serta komunikasi antara para fasilitator dengan para penerima manfaat;
- i. untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemberdayaan tentu harus pula ditopang oleh suatu kepemimpinan yang efektif;
- j. kegiatan pemberdayaan juga akan lebih efektif apabila terjadi komunikasi yang berlangsung secara timbal balik antara peneliti, penjual produk, penyedia *input* serta masyarakat.

2.3. Dimensi Utama Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan terdiri atas (1) akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan, (2) partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut, (3) kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut, (4) manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

2.4. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah terpadu yang dapat dilakukan masyarakat yaitu *Integrated Rubbish Managing Sistem*. Pengelolaan sampah terpadu merupakan sistem yang mengkombinasikan berbagai cara pengelolaan sampah seperti daur ulang, *recycling center*, pengomposan, perubahan *image* pemulung, pembuatan kerajinan sampah, sampai dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga sampah (Sejati 2009).

Sistem node, sub point, dan centre point sistem merupakan inovasi dari sistem pengolahan sampah secara terpadu dan profesional. Caranya dengan melakukan pembagian area berdasarkan *centre, sub point, dan node*. Pengolahan yang dimaksud di sini adalah mengubah sampah-sampah organik yang telah dikumpulkan menjadi bahan daur ulang yang siap dipakai (Sejati 2009).

Pengelolaan sampah terpadu dengan bank sampah. Bank sampah yaitu suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh *teller* bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam tiga ruang atau *locker* tempat menyimpan sampah yang ditabung sebelum diambil oleh pengepul atau pihak ketiga (Suwerda 2012). Pada prinsipnya pelayanan di bank sampah sama seperti di bank pada umumnya, bedanya adalah yang ditabung ini adalah sampah. Jadi, dari rumah tangga sudah dipilah sesuai jenisnya lalu dibawa ke bank sampah untuk ditabung. Bank sampah juga melakukan pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat. Masyarakat diajarkan mendaur ulang sampah, membuat kompos sampai sampah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

2.5. Daur Ulang

Proses daur ulang merupakan satu rantai dengan proses 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*). Proses *reduce* adalah proses pengurangan sampah itu sendiri, di mana material bekas bisa digunakan berulang-ulang sehingga tidak langsung dibuang. Sedangkan proses *reuse* adalah menggunakan barang yang sama untuk tujuan yang berbeda. Proses *recycle* dan *recovery* adalah proses pemanfaatan kembali sampah dengan mengubahnya menjadi barang yang bernilai.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Pendekatan

Penyusunan visi, misi dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan pendekatan sebagai berikut.

- a. *Community Based Development*, yaitu model perencanaan program yang dirancang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi mentalitas maupun peningkatan ketrampilannya untuk mendukung kemandirian aktivitas kegiatan ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraannya.
- b. *Local Resources Linkage*, yaitu bahwa dalam penyusunan program dirancang dan dilakukan dengan mengacu pada potensi diri masyarakat sehingga tingkat adaptasinya dan implementasinya akan lebih mudah diterima secara sukarela oleh masyarakat dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar serta dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
- c. *Participatory Principle*, penyusunan program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi stimulus yang dapat mendorong terjadinya gerakan yang dapat melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat mulai dari unsur pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat serta *stakeholder* yang lain untuk bersama-sama terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program disusun.
- d. *Sustainable Development Planning*, yaitu program yang akan dilakukan dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan akan terjadi keberlanjutan dari waktu ke waktu, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara mandiri dari masyarakat.
- e. *Comprehenship Development Planning*, yaitu model perencanaan program yang mengutamakan keterlibatan dan fungsi dari berbagai elemen masyarakat sehingga dapat terintegrasi tidak overlapping, serta terpadu satu dengan lainnya.

3.2. Jenis Kebutuhan Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Data yang berhubungan dengan kondisi riil masyarakat baik yang menyangkut kondisi sosial dan ekonomi maupun kondisi lingkungan fisik Perumahan Larangan Mega Asri. Pengumpulan data primer menggunakan beberapa metode antara lain diskusi kelompok (*focus group discussion*), wawancara secara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat (*indept interview*) dan unit-unit organisasi yang ada di Lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dan digali dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari instansi terkait. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik dokumenter yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai instansi terkait.

3.3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan keadaan dan temuan-temuan di lapangan. Selain itu, beberapa item yang dapat memperkuat analisis kualitatif akan dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yang sesuai.

3.4. Desain Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu pencarian data yang diarahkan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan, keinginan dan harapan masyarakat dengan mengumpulkan data primer dari masyarakat secara langsung serta data sekunder (dokumen) dari instansi terkait. Adapun pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut.

- a. Sosialisasi awal rencana penyusunan visi, misi, dan program “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo.

- b. Pengumpulan data primer, yang meliputi:
 1. penyebaran kuesioner/daftar isian program kepada Pengurus RW 08, Pengurus RT di lingkungan RW 08 dan beberapa elemen masyarakat yang lain,
 2. *Focus Group Discussion* (FGD)
- c. Pengolahan dan analisis data.
- d. Penyusunan visi dan misi “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo Jawa Timur.
- e. Penyusunan program “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo Jawa Timur.

4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil

Berdasarkan hasil survei di Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur melalui pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dan diskusi dengan berbagai *stakeholder* terkait dihasilkan temuan-temuan sebagai berikut.

4.1.1. Gambaran umum RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo

Perumahan Larangan Mega Asri (Rukun Warga 08 Desa Larangan) merupakan salah satu RW di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Rukun Warga 08 merupakan kawasan perumahan, yaitu Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Secara geografis posisi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri berada di Desa Larangan sebelah barat, persisnya di belakang (sebelah barat) Pasar Larangan Sidoarjo. Adapun batas-batas wilayah RW 08 Desa Larangan adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Pasar Larangan Sidoarjo
Sebelah Selatan	: Pasar Burung/Pasar Loak Sidoarjo dan Desa Tenggulunan
Sebelah Utara	: Perumahan Sidokare Indah Kelurahan Sidokare
Sebelah Barat	: Desa Tenggulunan

Secara administratif RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT), yakni mulai dari RT 31 s/d RT 39. Jumlah Keluarga di seluruh RW 08 kurang sebih sekitar 500 keluarga (KK) dengan dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 jiwa. Penduduk/warga RW 08 dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu warga tetap dan warga tidak tetap (pengontrak). Namun dari dua kategori tersebut, yang lebih banyak adalah warga berdomosili tetap.

4.1.2. Visi dan misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur

Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus dapat mengantarkan tercapainya visi dan misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur.

Visi RW 08 adalah menjadikan RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai pelopor “Kampoeng Bermutu” di Indonesia.

Misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo melalui usaha mandiri.
- b. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo melalui pembinaan rohani dan kegiatan sosial.
- c. Meningkatkan peran serta warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo dalam pembangunan Rukun Warga.
- d. Meningkatkan kesadaran warga untuk hidup sehat melalui diversifikasi pangan dan perbaikan lingkungan.
- e. Meningkatkan kesadaran warga untuk menghargai dan menjaga keberagaman.
- f. Meningkatkan pengetahuan warga melalui gerakan edukasi bersama.

4.1.3. Rumusan prioritas masalah RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri

Sebagaimana telah diketahui, RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo memiliki cukup banyak akses masuk maupun keluar perumahan sehingga sangat rawan dari segi keamanan. Di samping itu, pengelolaan keamanan masih dilakukan oleh masing-masing Rukun Tetangga yang memerlukan koordinasi yang kuat. Kelemahan dalam koordinasi keamanan menyebabkan rawan terjadi kejahatan. Selain itu, pengelolaan keamanan oleh masing-masing Rukun Tetangga menyebabkan inefisiensi ketidakseimbangan dalam pola pengamanan.

Demikian pula penanganan pembuangan sampah dilakukan oleh masing-masing Rukun Tetangga sehingga menimbulkan biaya tinggi. RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur memiliki unit-unit kegiatan yang tidak/belum jelas tata kelolanya dan belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak atau belum memiliki Standart Operating Prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya sehingga kadang-kadang problematik di lapangan.

Secara lebih spesifik permasalahan Rukun Warga (RW) 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting sebagai berikut.

- a. Bidang kesehatan
 1. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian warga karena pola makan yang kurang sehat, seperti diabet, hipertensi, jantung, dan ginjal.
 2. Secara insidental masih timbul penyakit yang disebabkan faktor sanitasi yang kurang baik, seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah dan sebagainya.
- b. Bidang lingkungan dan permukiman
 1. Elevasi tanah yang tidak merata, ada yang tinggi ada yang rendah, sehingga pada saat hujan beberapa tempat tergenang air sampai masuk rumah. Selain elevasi tanah tidak merata, drainase juga kurang bagus, aliran air pada saluran perumahan (selokan) ke pematasan kurang lancar dan pada tempat tempat tertentu tertentu terdapat banyak sedimentasi sampah. Meskipun sudah dibangun sudetan ke pematasan

- belum mampu mengatasi banjir, hanya lebih mempercepat mengalirnya genangan.
2. Meskipun sudah dibentuk bank sampah pada masing-masing Rukun Tetangga, namun volume sampah yang dihasilkan masih cukup banyak. Karena yang diterima bank sampah hanya sampah anorganik yang laku dijual seperti plastik, kertas, besi, aluminium, dan sebagainya. Sementara sampah organik berupa limbah rumah tangga yang kompisinya cukup banyak belum diolah/dikelola, dan dibuang ke bak sampah untuk dilanjutkan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir.
 3. Meskipun banyak tanaman di depan rumah warga, secara umum penghijauan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran warga akan pentingnya tanaman penghijauan.
- c. Bidang keamanan
1. Lokasi perumahan berdekatan dengan Pasar Larangan, Pasar Burung dan Pasar Loak, Terminal Sidoarjo serta Rel Kereta Api sehingga sangat rawan terhadap keamanan/pencurian.
 2. Banyak akses untuk masuk dan keluar wilayah perumahan Larangan Mega Asri, sehingga sulit mendeteksi orang keluar masuk perumahan.
- d. Bidang ekonomi
1. Para pelaku usaha mikro di lingkungan perumahan cukup potensial, namun perlu peningkatan skill.
 2. Beberapa warga memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan kurang memiliki akses ekonomi dalam skala yang lebih luas.
 3. Belum memiliki badan usaha ekonomi secara representative yang dapat menampung dan menaungi kegiatan ekonomi warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur.
 4. Terdapat sumber daya ekonomi potensial yang berupa antara lain: lahan kosong serta aset-aset yang dimiliki/dibawah pengelolaan RW/RT belum dimanfaatkan secara optimal.

- e. Bidang sosial budaya, mental dan spiritual
1. Kecenderungan masyarakat meninggalkan budaya lokal/tradisional, khususnya pangan, dan menerima begitu saja budaya asing tanpa *reserve*, telah menimbulkan kegagapan budaya. Pada nilai-nilai budaya lokal yang ditinggalkan tersebut sebenarnya merupakan nilai budaya lokal yang baik. Oleh karena itu perlu menggali lagi budaya lokal agar eksistensinya tetap bertahan, sekaligus memberikan pemahaman/persepsi yang sama akan pentingnya menggali kembali, mempertahankan dan memanfaatkan budaya lokal tersebut.
 2. Warga Perumahan Larangan Mega Asri cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan golongan sehingga rawan konflik sosial.
 3. Ada beberapa warga yang kurang memiliki akses ekonomi dan pendapatan rendah, sehingga memerlukan bantuan warga lainnya.
 4. Masih terdapat sebagian warga Perumahan Larangan Mega Asri belum terjamin pendidikannya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.
 5. Pemahaman masyarakat tentang agamanya masih perlu ditingkatkan, untuk menjamin terpelihahanya kerukunan dan keragaman.

4.2. Luaran

Luaran dari hasil kegiatan ini berupa prioritas program pembangunan RW 08. Program pembangunan Rukun Warga (RW) yang disusun sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Rukun Warga (RW) secara langsung dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan Rukun Warga (RW). Rumusan prioritas kebijakan dan program pembangunan Rukun Warga (RW) 08 adalah sebagai berikut:

4.2.1. Peningkatan kualitas kesehatan melalui penganekaragaman pangan

Pola Konsumsi pangan masyarakat sampai saat ini masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis makanan dan keseimbangan gizinya. Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sementara sumber karbohidratnya yang dahulu biasa dikonsumsi semakin tergeser sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Disamping itu, konsumsi sayur dan buah, umbi umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dan terus menerus untuk mampu mengubah pola konsumsi masyarakat yang berorientasi kepada Keragaman, Keamanan dan Kandungan Gizi (K3G). Usaha ini membutuhkan usaha keras karena harus melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan tersebut.

Untuk mendukung program ini, di Perumahan Larangan Mega Asri telah dicanangkan gerakan peningkatan konsumsi makanan non beras dan non terigu. Saat ini telah terbentuk organisasi Team Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP), yang salah satu kegiatannya adalah membuat berbagai jenis makanan olahan yang berbahan baku non beras dan non terigu, diantaranya adalah bronis singkong, soto mbote, roti ganyong, dan berbagai jenis makanan kecil lainnya yang berbahan dasar non beras dan non terigu. Untuk mendukung ketersediaan bahan bakunya, warga memanfaatkan lahan kosong yang ada di lingkungan perumahan untuk ditanami berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan TPEP. Selain mengoptimalkan pemanfaatan lahan dilingkungannya, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan non beras dan non terigu ini dilakukan dengan membentuk jejaring (*networking*) dengan desa/wilayah lainnya. Jejaring ini sangat diperlukan untuk membangun dan mendukung ketersediaan SDA (bahan baku tersebut). Jejaring ini memberikan dampak terhadap edukasi dan sosialisasi penyediaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk menjamin Keragaman, Keamanan dan Kandungan Gizi Pangan (K3GP) pada pola konsumsi pangan masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh dan memiliki kemampuan mengolah Sumber Daya Alam yang ada.



Gambar 1. Kunjungan *stakeholder* acara lomba 3R

4.2.2. Pelestarian lingkungan

Program pelestarian lingkungan dilakukan dengan membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat (warga perumahan) tentang pentingnya kelestarian dan pelestarian lingkungan. Dengan membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat (warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur) terhadap pentingnya kelestarian dan pelestarian lingkungan, maka masyarakat/warga perumahan akan memiliki perhatian yang tinggi terhadap lingkungannya seperti penghijauan, sirkulasi udara yang baik, terawatnya daya dukung lingkungan serta keindahan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan untuk mendukung kelestarian dan pelestarian lingkungan ini antara lain adalah; membantu bank sampah di setiap Rukun Tetangga, pemilahan sampah rumah tangga, pengolahan sampah (sisa bank sampah) secara mandiri, pembangunan biopori, gerakan tanam toga setiap rumah, serta penghijauan pada lahan kosong.

4.2.3. Keamanan lingkungan

Keamanan lingkungan merupakan faktor penting untuk menjaga ketenangan warga dalam kesehariannya. Program peningkatan keamanan lingkungan dilakukan dengan menanamkan kesadaran kepada warga perumahan tentang pentingnya keamanan kolektif lingkungan. Kesadaran masyarakat warga perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur akan pentingnya keamanan kolektif lingkungan ini ditandai dengan adanya kesepakatan untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama, membiayai kebutuhan keamanan lingkungan secara bersama serta penyediaan sarana keamanan lingkungan secara bersama-sama. Keamanan lingkungan

bukan sekedar keamanan orang per orang atau individual, tetapi keamanan seluruh warga. Oleh karena itu kebersamaan merupakan kunci penting dalam menjaga keamanan.

4.2.4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia akan berubah menjadi lebih baik. Pentingnya ilmu pengetahuan dapat dilihat dari pepatah: “Carilah ilmu sampai ke negeri Cina” dan “tuntutlah ilmu sejak dalam buaian hingga ke liang lahat”. Dengan pepatah tersebut menunjukkan pentingnya ilmu bagi manusia yang tanpa batas, baik tempat maupun usia. Oleh karena itu transfer ilmu harus tetap berjalan meskipun dalam lingkup terkecil seperti Rukun Warga.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan warganya adalah dengan mendirikan “Taman Baca RW 08”. Dengan adanya “Taman Baca” tersedia berbagai jenis buku bacaan, yang akan menjadi sarana pendukung untuk menuntut ilmu. Disamping itu, dengan adanya “Taman Baca” bisa menjadi sarana interaksi diantara warga untuk saling berbagi pengetahuan. Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pengetahuan warga adalah dengan mendatangkan *Trainer* secara periodik untuk memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kebutuhan warga, misalnya pelatihan membuat tanaman hidroponik, pelatihan pembuatan kue, pelatihan tentang pengolahan sampah dengan metode *composting* dan sebagainya.

4.2.5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi factor penting dalam peningkatan kesejahteraan warga. Mengingat secara sosial ekonomi, warga perumahan Larangan Mega Asri, strata sosial ekonominya heterogen, ada yang berpenghasilan tinggi dan ada yang berpenghasilan rendah, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah RW harus membentuk lembaga ekonomi yang mampu menopang kegiatan ekonomi warga. Lembaga ekonomi yang saat ini telah terbentuk dan sudah berperan dalam peningkatan kesejahteraan warga adalah Tim Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP) yang memiliki tugas

melakukan pemberdayaan terhadap kegiatan ekonomi warga, baik pembinaan, pembekalan atau peningkatan pengetahuan dalam produksi maupun pemasaran. Dengan bantuan lembaga ini, warga terbantu dalam cara melakukan dan peningkatan produksi, pemasaran hasil produksi dan peningkatan pendapatan.

Selain Team Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP) Lembaga Ekonomi yang akan dikembangkan adalah “Koperasi Lamegas”. Koperasi ini akan bergerak dalam bidang produksi, perdagangan dan jasa. Koperasi ini beranggotakan warga Perumahan Mega Asri dan dikelola oleh warga. Dengan dibentuk koperasi ini, diharapkan dapat menyediakan barang-barang kebutuhan warga, sehingga warga tidak perlu membeli ke tempat lain, dan keuntungannya nanti juga akan dinikmati oleh warga. Selain menyediakan barang barang kebutuhan warga, koperasi ini juga menampung hasil-hasil produksi yang dibuat warga untuk dipasarkan. Misalnya warga yang memproduksi minuman dan makanan dapat menjual melalui Koperasi Lamegas. Usaha lain yang akan dilakukan oleh Keperasi Lamegas adalah usaha jasa diantaranya adalah jasa servis AC dan cuci kendaraan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi warga serta sosialisasi diversifikasi pangan menuju hidup sehat adalah menyelenggarakan Festival Pangan dan Lomba Cipta Kreasi Kudapan non beras dan non terigu. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan resonansi baik kepada warga Perumahan Larangan Mega Asri maupaun kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur.

4.2.6. Peningkatan kesadaran tentang keberagaman

Keberagaman merupakan keniscayaan yang harus disadari oleh semua lapisan masyarakat, terutama di lingkungan perumahan. Mengingat warga perumahan umumnya sangat heterogen, datang dari berbagai daerah, etnis, suku, agama dan lain sebagainya. Kesadaran terhadap keberagaman akan meningkatkan kesadaran untuk menghargai dan menjaga keberagaman itu sendiri. Sehingga tidak akan ada konflik yang tidak perlu hanya karena keberagaman.

Kesadaran akan keberagaman ditandai dengan terminimalisirnya konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, ras dan agama, serta semakin tingginya kerjasama diantara warga tanpa melihat perbedaan

suku, ras dan agama. Oleh karena kegiatan bersamaan seluruh warga tanpa melihat Suku, Agama dan adat-istiadat sangat penting.

Penyediaan forum seperti festival makan, festival kartini, kepanitiaan idul qurban, festival ramadhan, dan festival lainnya yang dilakukan bersama merupakan sarana efektif untuk peningkatan kesadaran tersebut.

4.2.7. Pembinaan bidang sosial, mental dan spiritual

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga Perumahan Larangan Mega Asri tidak hanya pembangunan fisik dan jasmaniah saja, namun juga diimbangi dengan pembangunan bidang sosial, mental dan spiritual. Dengan pembangunan/pembinaan bidang sosial, mental dan spiritual ini, diharapkan warga Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur tidak hanya sehat secara fisik saja, namun sehat jasmani dan rohani serta terbentuk tatanan dan hubungan sosial yang harmonis. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembinaan bidang sosial, mental dan spiritual ini antara lain: bantuan biaya pendidikan kepada anak warga miskin, santunan untuk pada dhuafa, kajian ilmu agama, pelayanan kesehatan untuk Balita (Posyandu) dan Lansia, dan lain sebagainya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Visi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur adalah “Menjadikan RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri Sebagai Pelopor “*Kampoeng Bermutu*” di Indonesia. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur melalui usaha mandiri.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur melalui pembinaan rohani dan kegiatan sosial.
 - c. Meningkatkan peran serta warga RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri dalam pembangunan Rukun Warga.

- d. Meningkatkan kesadaran warga untuk hidup sehat melalui diversifikasi pangan dan perbaikan lingkungan.
 - e. Meningkatkan kesadaran warga untuk menghargai dan menjaga keberagaman.
 - f. Meningkatkan pengetahuan warga melalui gerakan edukasi bersama.
2. Permasalahan utama yang dihadapi Rukun Warga adalah:
- a. Di wilayah sekitar perumahan telah beralih fungsi dari sawah menjadi perumahan, sehingga daerah resapan berkurang akibatnya sering terjadi banjir saat musim penghujan.
 - b. Lokasi perumahan berdekatan dengan Pasar dan Terminal Larangan Sidoarjo serta cukup banyak akses jalan masuk dan keluar perumahan, sehingga sangat rawan terhadap keamanan/pencurian.
 - c. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian warga karena pola makan yang kurang sehat serta penyakit yang ditimbulkan faktor sanitasi yang kurang baik
 - d. Sebagian warga mempunyai jiwa bisnis, namun potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal serta belum ada lembaga yang representative yang mewadahi kreativitas warga tersebut.
 - e. Warga perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur berasal dari berbagai macam suku, etnis, agama, dan golongan sehingga rentan terjadi konflik sosial.

5.2. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Perumahan Larangan Mega Asri program yang dilakukan adalah peng-anekaragaman pangan serta perbaikan sanitasi serta pelestarian lingkungan.
2. Untuk menurunkan terjadinya kerawanan keamanan diperlukan program peningkatan keamanan lingkungan yang dilakukan dengan menanamkan kesadaran kepada warga perumahan tentang pentingnya keamanan lingkungan.
3. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur

- dilakukan dengan peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya ilmu pengetahuan melalui edukasi secara istiqomah.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur selain dibentuk Tim Pemberdayaan Ekonomi Perempuan juga diperlukan lembaga ekonomi yang dapat menampung dan menyalurkan hasil kreativitas warga.
 5. Untuk mencegah/meminimumkan terjadinya konflik sosial antar warga perlu ditanamkan kesadaran kepada warga untuk menghargai dan menjaga keberagaman yang ada di Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur.
 6. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur tidak hanya pembangunan fisik dan jasmaniah saja, namun juga diimbangi dengan pembangunan bidang sosial, mental dan spiritual.

REFERENSI

- Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moeljarto. 1993. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rosmedi, and Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point Dan Center Point*. Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudarmanto dkk. 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Cet Ke-1. Bandung: Ravika Adimatama.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori Dan Penerapan)*. Yogyakarta: CV. Rihama-Rohima.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana.

Biografi Penulis 1



Sutarmin, lahir di Wonogiri, 03 November 1966. Saat ini bersama istri tinggal di Perumahan Magersari Permai blok Z-21 Sidoarjo. Lulus SMA Negeri 2 Surakarta, S1 Universitas Sebelas Maret, S2 Universitas Dr Soetomo Surabaya. Memiliki ketertarikan dalam bidang pemasaran dan hobi *traveling*. Perjalanan hidup panjang dari sebuah desa di Wonogiri mendorong untuk tetap berjuang dan merantau di Surabaya. Ia merupakan dosen tetap di Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya mulai tahun 1992 sampai sekarang. Orang hidup harus aktif dan inovatif sehingga sampai sekarang selalu menggeluti kegiatan-kegiatan antara lain (1) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi AKDP wilayah Surabaya-Malang-Blitar, (2) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa transportasi AKDP wilayah Surabaya-Madiun-Magetan, (3) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa perpanjangan ijin trayek UPT LLAJ Jember, (4) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa perpanjangan ijin trayek UPT LLAJ Banyuwangi, (5) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa operasional Terminal Minak Koncar Kabupaten, (6) tim peneliti penyusunan indeks kepuasan masyarakat pengguna jasa operasional Terminal Situbondo Kabupaten Situbondo, (7) beberapa kegiatan penelitian dengan dana dukungan lembaga donor luar negeri untuk *support* kesehatan masyarakat dari HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Timur tahun 2006 – 2018, (8) tim tutorial Universitas Terbuka – Ekonomi – Program Studi Manajemen, dan (9) masih ada kegiatan lain yang mendorong untuk selalu mengabdikan dan berjuang untuk ibadah.

Biografi Penulis 2



Sugiyanto, lahir di Magetan, tanggal 05 September 1964. Setelah lulus SMA Negeri Maospati Magetan, melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dan jenjang S2 pada perguruan Tinggi yang sama dengan mengambil Program Studi Ilmu Manajemen. Semenjak Lulus S1 sebagai aktif tenaga analis data pada lembaga consultant manajemen dengan spesifikasi pada bidang keuangan. Pada tahun 1993 bergabung dengan

Universitas Dr. Soetomo, sebagai Dosen Tetap pada di Fakultas Ekonomi hingga sekarang. Organisasi profesi yang diikuti adalah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Selain menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo, juga masih aktif sebagai tenaga ahli pada lembaga konsultan manajemen serta pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Surabaya (2) Penyusunan Corporate Plan PD Pasar Surabaya. (3). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Tahun 1999-2000. (4). Pembardayaan Masyarakat Sekitar Waduk pada Implementasi Dawuhan Model Dam Kabupaten Madiun. (5) Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Telaga Wahyu Kabupaten Magetan. (6) Kajian Dampak Keberadaan pasar Modern terhadap Pedagang Tradisional di Kota Balikpapan. (7) Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Mojokerto. (8) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi Masyarakat Sekitar Waduk Dawuhan Madiun. (9) Pendampingan Proses Produksi Pembuatan Gula Kelapa di Kabupaten Pacitan



Jl. Semolowaru No.84 Surabaya 60283
Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp. (031) 592 5970
Fax. (031) 593 8935

